



**SATU DATA
INFORMASI
BAWASLU
TINGKATKAN
KEAMANAN SIBER**

**HAK PREROGATIF
MENJADI KUNCI**

**TUNGGU WAKTU
KABINET BARU**

**NETRALITAS ASN
PALING RAWAN
TIAP PILKADA**

**TIGA SRIKANDI
BEREBUT KURSI
GUBERNUR JATIM**

**PELUANG
MENANG
KONTESTAN
PILGUB SUMSEL**



Rp75.000,-

PILKADA LEBIH RAWAN DARI PEMILU?

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

COMING
SOON

• iNOVASI UNTUK NEGERI •
info indonesia
AWARD 2024



**DARI
SUMSEL
UNTUK
INDONESIA
EMAS**

EDISI
BULAN
SEPTEMBER
2024

DAFTAR ISI

AN PEMILIHAN SERENTAK
ALONAN, KAMPANYE DA
GUT HITUNG

a | Jakarta, 26

Bawaslu_RI



7

INFO BAWASLU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024. Seperti apa hasilnya?



20

INFO UTAMA

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 kian mendekat. Isu format dan personel kabinet ikut melesat.



34

INFO SUMSEL

Sumatera Selatan berupaya semaksimal mungkin menciptakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berjalan aman dan damai. Untuk itu Penjabat Gubernur Sumsel, Elen Setiadi bersama kepala daerah kabupaten/kota melaksanakan rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak.



50

INFO PROFIL

Masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kini menanti jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Dimana pada kesempatan kali ini, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pengusaha, H M Toha Tohet bakal maju sebagai bakal calon Bupati Muba.



64

INFO PILKADA

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2024 menjadi pertarungan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi melawan Rudy Mas'ud-Seno Aji.



76

INFO MUBA

Pemerintah Kabupaten (Pekab) Musi Banyuasin mendapat dana insentif sebesar Rp 19,06 milyar lebih. Dana ini sebagai bentuk apresiasi Kabupaten Muba yang sukses menjalankan tiga kinerja penting.



87

INFO KHUSUS

Rancangan kabinet kementerian beriringan dengan urusan fiskal. Jadi, pembahasan Rancangan Undang-Undang Kementerian pun memerlukan sinkronisasi dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



3 DARI REDAKSI

32 OPINI

44 INFO PALEMBANG

78 INFO EKONOMI

82 INFO ISTANA

86 KAJI

46

INFO PROFIL

Sosok Hj. Lucyanti tidak terlalu asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, wanita yang kini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sumsel ini dulunya merupakan istri mendiang Pahri Azhari, Bupati Muba 2 periode pada tahun 2008-2012 dan 2012-2015.

ZAKEN

Kita sudah menyimak rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kabinet zaken (zakenkabinet) sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Namun, satu hal yang perlu mendapat perhatian: pengertian atau batasan zakenkabinet itu sangat longgar, bahkan boleh dibilang tidak jelas definisinya.

Zakenkabinet jika diterjemahkan secara bebas dari bahasa Belanda berarti kabinet bisnis, untuk membedakannya dengan kabinet (partai) politik. Mungkin padanan yang lebih pas dalam bahasa adalah kabinet kerja, dengan kecakapan mencapai target-target pemerintahan lebih dari sekadar kepentingan partai atau orientasi politiknya.

Nah, dari pengertian longgar itu kita dapat memahami zakenkabinet yang dikemukakan oleh Pak Sekjen Muzani. Ia mengemukakan Prabowo ingin pemerintahannya bersifat zakenkabinet, yakni yang menduduki kursi kabinet adalah ahli di bidangnya meskipun berasal atau diusulkan oleh partai politik.

Tersirat di sini, zakenkabinet sekalipun, pembentukannya mustahil menghindari keterlibatan partai politik. Bagaimana mungkin membentuk pemerintahan dalam sistem demokrasi tanpa keterlibatan partai politik, padahal partai-partai itu yang bekerja dan ahli, bahkan memiliki wewenang (authority) berdasarkan konstitusi.

Dari sejarah sistem politik Indonesia pun, pembentukan zakenkabinet senantiasa melibatkan partai-partai politik. Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri M Natsir tetap memiliki menteri dari partai politik namun melibatkan teknokrat masa itu seperti Djuanda Kartawidjaja sebagai Menteri Perhubungan. Sedangkan Wakil PM adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tak berasal dari partai manapun saat itu. Begitu pula Kabinet Djuanda. PM Djuanda tetap memiliki menteri-menteri dari partai-partai politik meskipun banyak pula diisi oleh figur non-partai. Sama halnya dengan Kabinet Wilopo yang berisi menteri-menteri dari parpol dan non-partai.

Di masa Orde Baru, banyak menteri pilihan Presiden Soeharto berasal dari kalangan akademisi dan teknokrat. Apakah kabinet Pak Harto disebut zakenkabinet meskipun dapat dipadankan dengan kabinet karya mengingat dominasi Golongan Karya dalam lansekap politik Indonesia? Toh yang digunakan malah Kabinet Pembangunan, meskipun muncul istilah Mafia Berkeley, terkait almamater para akademisi dan teknokrat itu.

Nah, bagaimana dengan zakenkabinet yang dikemukakan oleh Muzani? Tampak Prabowo akan mengombinasikan anggota kabinet yang berasal dari partai politik dan non-partai pada posisi menteri-menterinya. Justru pesan tersirat Muzani adalah partai-partai politik hendaknya mengusulkan figur yang kompeten dan dapat mencapai target-target pemerintahan Prabowo.

Pada akhirnya, pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Kita berharap pilihan-pilihan Prabowo membawa Indonesia lebih baik dari masa yang sudah-sudah. Tanpa banyak bongkar-pasang di tengah jalan. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

• TELP 021-791 96781
• FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadh, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



WASPADA KERAWANAN PILKADA SERENTAK

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024. Seperti apa hasilnya?





Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebut tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung sebagai tahapan paling rawan saat pemilihan. Tiga tahapan tersebut memiliki turbulensi yang paling besar dari semua tahapan.

"Dari seluruh rangkaian tahapan, di sini yang paling besar. Dan di sinilah teman-teman menjadi pasien Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan residu pemilu itu masih ada di DKPP sampai dengan saat ini. Nah, inilah PR kita bersama untuk memetakan dan melakukan pencegahan," ungkap Bagja dalam Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2024.

Bagja menyebut, pada tahapan pencalonan turbulensi sudah muncul di tengah Agustus lalu. "Kita dihadapkan pada turbulensi besar di awal-awal tahapan ini. Alhamdulillah saya enggak di sini. Tapi saya deg-degan, kalau KPU diduduki, tidak mengikuti putusan (MK) 60 dan 70, maka akan pindah turbulensinya ke Bawaslu," katanya.

Kemudian di tahapan kampanye, Bagja menyerukan untuk Bawaslu daerah melakukan pengawasan melekat.

"Kami sampaikan ke Pak Puadi bahwa dalam kampanye, hadiah besarnya seberapa. Bazar limitnya berapa dan bagaimana cara pengawasannya. Ini PR kita bersama," ungkapnya.

Terakhir, dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bagja mengingatkan soal pentingnya pengawasan terkait politik uang. Bawaslu daerah harus menanamkan prinsip bahwa masa tenang merupakan masa tidak



Pada 2023, Bawaslu menyusun dan meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024

tenang untuk Bawaslu.

"Kami harapkan teman-teman pengawasan, begitu masa tenang, sudah tidak tenang. Teman-teman harus berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dalam melakukan patroli pengawasan.

Sampai dengan hari H, untuk memastikan seluruh pemungutan suara kita tidak diwarnai dengan politik uang," ungkap Bagja.

Bagja berharap, peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 dapat meminimalkan pelanggaran yang terjadi.

"Kami harapkan seluruh proses yang kita lakukan dalam pemetaan kerawanan ini dapat dilakukan dengan baik oleh Bawaslu daerah," kata Bagja.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyampaikan, pelaksanaan tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung yang berintegritas menjadi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Dalam Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ditegaskan, jika ketiga tahapan ini tidak dijaga dan dikawal dengan baik, maka berpotensi besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di pemilihan. Hal ini terekam dari hasil pemutakhiran (update) Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang dipublikasikan Bawaslu Agustus 2024.

"Peristiwa yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu berpengaruh terhadap kerawanan dalam pemilihan,"



kata Lolly.

Dia menyampaikan, dari ketiga tahapan yang diukur dalam pemetaan tersebut, setiap tahapan memiliki kerawanan yang harus segera diantisipasi. Kerawanan Pemilihan juga disumbang oleh kondisi sosial politik yang terjadi pada level nasional hingga daerah.

Menurutnya, Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung merupakan bagian dari rangkaian tindak lanjut kajian dan riset IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diluncurkan pada 2022 lalu.

Sebelumnya, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 juga sempat diperdalam oleh Bawaslu pada 2023 untuk menguatkan agenda pencegahan terhadap beberapa isu strategis pada penyelenggaraan pemilu.

"Pada 2023, Bawaslu menyusun dan meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024," terang Lolly.

Dia menambahkan, isu strategis pada Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini, di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, tahapan pungut hitung menjadi yang paling rawan. "Setelah itu tahapan kampanye dan tahapan

pencalonan," ujar Lolly.

Pada tahapan pencalonan kerawanan dipengaruhi oleh potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon unsur petahana, ASN, TNI, dan Polri seperti melakukan rotasi jabatan.

Kerawanan pada tahapan kampanye disumbang oleh potensi praktik politik uang, pelibatan aparat pemerintah di antaranya ASN, TNI dan Polri, peng-

gunaan fasilitas negara dalam kampanye dan konflik antarpeserta dan pendukung calon.

Potensi kerawanan pada tahapan pungut hitung disumbang oleh beberapa isu yang berpotensi terjadi berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Beberapa di antaranya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan adhoc, pemungutan suara



ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan.

Potensi Kerawanan pada ketiga tahapan tersebut juga dipengaruhi oleh konteks sosial politik pada level nasional hingga daerah. "Hal yang paling mempengaruhi kerawanan pada konteks sosial politik adalah potensi adanya intimidasi, ancaman dan kekerasan secara verbal dan fisik antarcalon, antarpemilih maupun calon pemilih kepada penyelenggara Pemilihan," jelas Lolly.

Rawan Tinggi

Hasil Pemetaan kerawanan Pemilihan serentak 2024 merekam provinsi dengan kategori kerawanan tinggi. Terda-

334 kabupaten/kota (66 persen) yang masuk kategori kerawanan sedang, dan 90 kabupaten/kota (18 persen) yang masuk kategori kerawanan rendah.

Isu Strategis

Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan Pilkada 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

1. Netralitas aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan.

Langkah antisipasi dalam menjaga

Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan berjalan. Politisasi SARA, penggunaan hoax, dan fitnah potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon.

4. Penggunaan media sosial untuk kontestasi

Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi



pat lima provinsi yang rawan tinggi (13 persen), 28 provinsi rawan sedang (76 persen), dan empat provinsi rawan rendah (11 persen).

"Lima provinsi yang masuk kategori tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah," urai Lolly.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 merekam ada 84 kabupaten/kota (16 persen) yang masuk kategori kerawanan tinggi. Kemudian ada

netralitas aparat pemerintah pada pelaksanaan Pemilihan hendaknya menjadi prioritas seluruh stakeholders.

2. Praktik politik uang

Metode praktik politik uang yang semakin berkembang seperti penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari, membuat pencegahan yang masif harus dilakukan oleh seluruh pihak.

3. Polarisasi masyarakat dan dukungan publik

dari dinamika politik di dunia digital.

5. Konteks keserentakan pemilu dan pemilihan

Jarak antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dengan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan dalam tahun yang sama. Salah satunya proses pencalonan pemilihan menjadi kurang partisipatif. Peristiwa mutakhir terkait syarat pencalonan berkontribusi pada kerawanan pada proses pendaftaran calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

6. Keamanan

Intimidasi, ancaman, dan kekerasan berupa verbal hingga fisik berpotensi terjadi. Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan pemilihan harus segera disiapkan.

7. Kompetensi penyelenggara ad-hoc

Penyelenggara pemilu ad-hoc harus memperkuat pemahaman tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

8. Hak memilih dan dipilih

Penguatan terhadap jaminan hak memilih dan dipilih, di antaranya adalah pemutakhiran daftar pemilih.

9. Layanan kepada pemilih

Penyelenggara pemilihan wajib memastikan layanan dan fasilitas pelaksanaan tahapan pemilihan yang akses bagi semua pihak, khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas dan kelompok minoritas.

10. Bencana alam dan distribusi logistik

Antisipasi terhadap bencana alam wajib menjadi perhatian bagi seluruh pihak, terutama untuk menentukan lokasi TPS yang akan digunakan untuk pemungutan suara.

11. Perselisihan hasil pemilihan

Masifnya gugatan terhadap hasil Pemilu 2024 harus menjadi fokus utama. Maka dari itu pentingnya pemahaman penyelenggara, pengarsipan dokumen, dan pengamanan surat suara beserta dokumen pendukungnya yang harus diawasi oleh semua pihak.

12. Kebijakan pemilihan yang berubah

Politik yang dinamis efek dari penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berpotensi terhadap perubahan aturan hukum yang cepat. Maka dari itu perlu kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan agar kebijakan disiapkan dengan baik, sehingga ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan.

Indeks Kerawanan Pemilihan Jadi Pedoman

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menegaskan, pemerintah mengarahkan aparat intelijen untuk memantau dinamika yang terjadi pada gelaran Pilkada Serentak 2024.

Dia menyebut, Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu

jadi pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Saya selalu wanti-wanti kepada aparat intelijen harus bekerja 24 jam mengantisipasi jangan sampai ada gangguan," tegasnya.

Hadi mengatakan, tugas intelijen harus mengetahui secara detail apapun yang akan terjadi. Jika ada daun yang jatuh, maka intelijen harus mengetahui



bisa menjadi pedoman dan pegangan bagi seluruh kementerian/lembaga, dan TNI/Polri.

"Sehingga dari kepolisian sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu yang setiap hari dihitung bagaimana antisipasi, termasuk aparat intelijen," kata Hadi.

Dia mewanti-wanti aparat kepolisian dan TNI, termasuk intelijen, untuk selalu waspada terhadap potensi gangguan-gangguan yang akan ter-

penyebabnya.

"Harus tahu, jatuh kenapa, jatuh di-petik, atau (kapan) waktunya (jatuh). Artinya, intelijen ini harus benar-benar memperhatikan, melihat, jangan sampai ada kerawanan sekecil apapun," kata mantan Panglima TNI itu.

Dia mengatakan, aparat intelijen harus menguasai seluruh wilayah. Di samping itu, pemetaan yang dilakukan Bawaslu akan menjadi rujukan utama bagi aparat intelijen. ●

SATU DATA INFORMASI BAWASLU TINGKATKAN KEAMANAN SIBER

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menekankan pentingnya keamanan siber, terutama menjelang Pemilihan Serentak 2024.

Anggota Bawaslu, Puadi, menegaskan, satu data informasi Bawaslu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan siber. Hal ini didasari oleh banyaknya aplikasi milik Bawaslu yang menyebabkan informasi tidak terintegrasi dengan baik.

"Kalau mau jujur kita di Bawaslu itu banyak aplikasi. Ada Siwaslu, Sigap Lapor, lalu Siwaskam, dan di penyelesaian sengketa pun ada SIPS. Ini kita ingin aplikasi ini bukan sekadar aplikasi. Kaitannya dengan kegiatan ini bahwa Bawaslu secara konsisten ingin terus berupaya mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan terpercaya dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas," kata Puadi saat membuka Rakornas Data dan Informasi Bawaslu Tahun 2024 di Banten, Rabu, 4 September 2024.

Puadi men-
erangkan, dalam
Pemilihan 2024,
Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Data Infor-

masi menjadi PIC (People in Charge, penanggung jawab) dari tahapan kampanye. Ini membuat pentingnya perlindungan dan integrasi data, baik data pengawasan, penanganan pelanggaran, maupun sengketa terhubung dengan baik.

Dia mengatakan, ada tiga alasan perlunya keamanan infrastruktur dan aplikasi berbasis TIK di lingkungan Bawaslu. Pertama, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan tindakan pencurian data pengawasan pemilu yang dikuasai oleh Bawaslu.

Kedua, untuk melindungi dan menjaga keamanan data sebagai manifestasi tanggung jawab Bawaslu terhadap perlindungan data pribadi. Ketiga, untuk menjaga reputasi kelembagaan dan merawat kepercayaan publik.

Menurutnya, sistem satu data Bawaslu sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menghendaki tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan.

"Ini kaitannya dengan visi Bawaslu menjadi pengawas pemilu yang terpercaya. Perbawaslu yang berikatan dengan satu data, ini harus goal. Sehingga semua apa yang menjadi

keingi-
n a n
kita,
data
d i

pengawasan, penanganan pelanggaran, dan sengketa, semua satu data. Dan ini satu wujud yang dalam waktu dekat agar kaitannya dengan keamanan siber utama juga berkaitan tentang informasi ini bisa terwujud dengan baik," katanya.



Bawaslu dan jajarannya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi maraknya kampanye hitam, hoaks, dan ujaran kebencian selama pilkada.

Puadi mengatakan, jajarannya saat ini sudah menyiapkan sistem keamanan untuk mengantisipasi kampanye hitam.

"Bawaslu dan jajarannya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi maraknya kampanye hitam, hoaks, dan ujaran kebencian selama pilkada," kata Puadi.

Saat ini, Bawaslu memiliki sistem keamanan dan proteksi internal berupa Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk memproteksi dan juga mengawasi kampanye di dunia maya.

"CSIRT ini bukan hanya sistem proteksi, melainkan kampanye di dunia maya bisa diawasi secara maksimal," katanya.



Lebih lanjut, Puadi mengatakan bahwa khusus di ruang siber, pihaknya mengupayakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM), terutama para operator, yang bertujuan memastikan keamanan dapat terjamin.

Apalagi, saat ini dunia maya atau ruang siber menjadi tempat yang sering untuk berinteraksi satu sama lain, sehingga pengawasannya pun lebih diperketat supaya pesta demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan.

"Kami juga menguatkan dan memproteksi terhadap jaringan internal dengan penguatan SDM yang akan menjadi operator keamanan siber Bawaslu," ujarnya.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menjelaskan, dalam era digitalisasi, Bawaslu akan ambil langkah dalam mengawal pengawasan siber.

Lolly mengungkapkan, hasil pengawasan Pemilu 2024, pelanggaran tertinggi di wilayah siber, khususnya media sosial, adalah ujaran kebencian.

Dirinya menyampaikan di media sosial ujaran kebencian tertinggi disampaikan di Facebook dengan 33,2 persen, lalu Instagram dengan 29,9 persen, disusul X 28,5 persen, Tiktok 7,9 persen, dan Youtube 0,6 persen.

"Tertinggi trennya ujaran kebencian loh. Jadi, adaptasi terhadap situasi kekinian dibutuhkan," kata Lolly dalam Rapat

Koordinasi Nasional Pengawasan Siber pada Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.

Lolly memberikan semangat kepada jajaran Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota untuk jeli dan memahami pengawasan siber. Sebab, dia melihat butuh percepatan dan kemampuan untuk menjangkau dan mendistribusi informasi.

"Ini pengawasan yang spesifik hanya untuk siber ya, maka tanggung jawab kita sangat besar, karena jangkauan objek pengawasan kita luas. Ini berbicara perihal terhubung dengan jejaring internet," jelasnya.

Lolly juga menegaskan, teknologi

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan yang saat ini sangat perlu diwaspadai Bawaslu. Sebab, beberapa oknum memanfaatkan AI untuk memfitnah atau melakukan pelanggaran, yang membuat Bawaslu kesulitan mengidentifikasi dan memverifikasi kebenarannya.

"Karena kecanggihan teknologi, jika tidak diimbangi kecanggihan pengawasan pasti akan berbahaya. Mari kita jaga Pemilihan Kepala Daerah melalui kewarasan dalam bertindak, dalam menyerap rasa, buka telinga lebar lebar, buka mata dengan tajam melihat, gunakan mulut dan jari untuk luwes menyampaikan informasi itu bentuk dari kesatuan Bawaslu," harap dia. ●



NETRALITAS ASN PALING RAWAN TIAP PILKADA

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu isu paling rawan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Seyogianya, ASN harus menjaga netralitas agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan sukses.

Meski tahapan Pilkada 2024 baru berjalan, netralitas ASN terkesan sulit dijaga. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut sudah ada 30 pelanggaran netralitas ASN yang ditangani Komisi Aparatur Sipil Negara baru-baru ini.

"Dalam indeks kerawanan pilkada atau pemilihan yang Bawaslu keluarkan, maka isu netralitas ASN adalah isu ketiga yang terawan dalam pemilihan kepala daerah," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam acara bertajuk Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 17 September 2024.

Bagja menyebut, pada Pilkada 2020 yang diselenggarakan di 170 wilayah, pelanggaran netralitas ASN tercatat sebanyak 1.010 perkara.

Menurut Bagja, titik rawan netralitas ASN terjadi pada hampir semua tahapan pilkada. Mulai dari tahapan pendaftaran, kampanye, hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

"Tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu bisa dijadikan setahapan. Kami sebut sebagai tahapan tungsura," tutur Bagja.

Oleh karena itulah, dalam momentum rapat koordinasi kali ini, Bawaslu mencurahkan segala daya dan upaya untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder agar bisa sama-sama menjaga netralitas

ASN.

Bagja mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, telah mengeluarkan surat edaran agar Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindaklanjuti laporan dan temuan terhadap pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024. Dia menyebut, BKN telah menerima banyak laporan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota ihwal pelanggaran netralitas ASN.

"Dan kita dapat lihat beberapa pergerakan tentang netralitas ASN di media sosial maupun di media cetak maupun media elektronik juga," ungkap Bagja.

Bagja menambahkan, Bawaslu mencatat 400 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 sejak tahapan pendaftaran. Ia menduga, angka kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024 akan lebih tinggi dibanding Pilkada 2020 karena pilkada kali ini digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Bagja menyebut ada dua kerawanan setiap pelaksanaan pilkada. Pertama adalah politik uang dan kedua ialah netralitas penyelenggara pemilu. Menurut Bagja, kerawanan itu terjadi karena pilkada dipicu hubungan antar ASN dengan cakada.

"(Picu kerawanan lain) kedekatan tingkat daerah lebih dekat daripada pada saat pemilu nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden," tutur Bagja.

Ia mengatakan, sanksi bagi para ASN yang tak menjaga netralitasn-





ya di bawah kewenangan BKN. Bawaslu hanya berwenang melakukan penanganan pelanggaran.

"Kalau ASN bisa dipecat. ASN diberhentikan dari jabatannya ada," kata Bagja.

Perlu diketahui, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 464 laporan pengaduan dugaan ketidaknetralan ASN menjelang dan selama masa Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Ketua KASN, Agus Pramusinto, dalam rapat Komisi II DPR dengan KASN, Kementerian PANRB dan BKN pada 12 Juni 2024.

Agus mengatakan, KASN menerima 262 laporan ASN yang diduga tidak ne-



Dalam indeks kerawanan pilkada atau pemilihan yang Bawaslu keluarkan, maka isu netralitas ASN adalah isu ketiga yang terawan dalam pemilihan kepala daerah.

tral selama 2023 selama Pemilu 2024 di sepanjang 2023. Dari 262 kasus, 259 laporan atau 99 persen sudah ditangani KASN dengan hasil 141 orang ASN terbukti melanggar sikap netralitas.

Agus mengatakan dari jumlah total rekomendasi yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK, saat ini 98 ASN atau 70 persen di antaranya telah ditindaklanjuti. Sementara, pada 2024, KASN menyerahkan rekomendasi terkait laporan pelanggaran netralitas terhadap 202 ASN kepada PPK. Dari hasil rekomendasi tersebut, terdapat 67 ASN atau 43 persen yang ditindaklanjuti. •



Bawaslu - CNE Timor Leste

BERBAGI PENGALAMAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan National Commission for Election (CNE) Republik Demokratik Timor Leste menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam pengembangan kapasitas SDM dan lembaga.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan peningkatan kapasitas seluruh jajaran dari kedua lembaga.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan, CNE memiliki kesamaan tugas dengan Bawaslu dalam penanganan sengketa dan penegakan hukum pemilu.

"CNE memiliki tugas mengawasi seluruh proses pemilihan umum di Timor-Leste dan penanganan sengketa dan penegakan hukum pemilu di Timor-

Leste," kata Bagja saat memberikan sambutan saat Penandatanganan Kerja Sama dengan CNE Republik Demokratik Timor Leste di Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Perbedaannya, kata Bagja, CNE memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa hasil di Timor Leste, sementara Bawaslu hanya pada penyelesaian sengketa proses.

"Bawaslu menyelesaikan sengketa proses bukan result-nya (hasilnya), jadi ini perbedaan CNE dan Bawaslu," jelasnya.

Bagja berharap implementasi kerja sama tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga Bawaslu dan CNE dapat saling berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di negara masing-masing.

"Kami (Bawaslu) berharap penandatanganan ini membuat kita (Bawaslu dan CNE) dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan peningkatan kapasitas SDM di masing-masing lembaga, juga dapat meningkatkan nilai-nilai demokrasi di kedua negara tersebut," ujarnya.





Bagja juga berharap bisa berbagi pengalaman tersebut tidak hanya terjadi dengan CNE Timor-Leste, melainkan dengan penyelenggara pemilu lainnya di Asia Tenggara.

Ajakan Bagja tersebut disambut baik Presiden CNE Republik Demokratik Timor-Leste, Jose Agostinho da Costa Belo Pereira, yang siap mendukung pertemuan dan berbagi pengalaman dari penyelenggara pemilu di Asia Tenggara.

Terlebih, kata Jose, Bawaslu dan CNE memiliki komitmen membangun komunikasi yang baik, terutama dalam berbagi pengalaman guna menjaga proses demokrasi semakin baik.

Dalam kesempatan itu, dia mengakui kesuksesan Pemilu di Indonesia dengan segala dinamikanya. Juga pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten kota yang akan dilaksanakan secara serentak, akan menjadi salah satu pembelajaran guna memperbaiki proses-proses demokrasi di Timor-Leste.

"Sebagai negara tetangga kami akan belajar, sehingga akan memperbaiki hal-hal yang kurang dalam proses demokrasi di Timor-Leste," ujarnya.

Kerja sama ini dinilainya merupakan sarana tepat untuk mempelajari peradilan pemilu di Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari kerja sama ini adalah pertukaran pegawai. Para pegawai kedua lembaga diharapkan saling mempelajari

dan memberikan edukasi dalam penanganan penegakkan hukum pemilu seiring perubahan zaman.

Jose pun mengaku takjub dengan Indonesia karena punya banyak pakar kepemiluan. Ia menyatakan keinginan agar negaranya dapat mempelajari hal positif tersebut dari Indonesia. Sebab, keberadaan pakar sangat penting, terutama saat terjadi sengketa pemilu.

"Semua pakar, baik itu bagian hukum, legislasi bagian pemilu itu baik. Jadi pembelajaran buat kita (Timor-Leste),"

katanya.

Dia menekankan, ada banyak hal yang patut dicontoh oleh peradilan pemilu di negaranya dari Indonesia. Salah satunya yakni peradilan pemilu bukan semata-mata untuk mencari pihak yang benar atau salah.

"Penyelesaian sengketa (pemilu) yang begitu tidak hanya masalah bagaimana siapa yang benar atau siapa yang tidak. Tetapi proses untuk mengikuti proses pembelajaran dari segi intelektual," ujarnya. •



KUATKAN KOLABORASI SENTRA GAKKUMDU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang dirangkai dengan Gakkumdu Award 2024 sebagai penghargaan terhadap Sentra Gakkumdu di seluruh Indonesia.



Diselenggarakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 19 September 2024, Rakornas Gakkumdu Award ini juga dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Hadi Tjahjanto, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengapresiasi kinerja sentra Gakkumdu dalam Pemilu 2024 yang telah berhasil menindak sebanyak 65 tindak pidana. Atas dasar kinerja itu, Bawaslu mengapresiasi kepada sentra gakkumdu baik provinsi dan kabupaten/kota dengan memberikan penghargaan berdasarkan tujuh kategori.

Selaku dewan penasihat Sentra Gakkumdu, Bagja mengatakan, forum ini merupakan bentuk penghargaan terhadap jerih payah dan kerja keras Sentra Gakkumdu terhadap berbagai masalah tindak pidana yang terjadi dalam Pemilu 2024.

"Kita (Sentra Gakkumdu) telah berhasil melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan di Pemilu 2024. Alhamdulillah Sentra Gakkumdu juga telah berhasil menindak tindak pidana di luar negeri," ungkap Bagja.

Dia mengatakan, 65 putusan tindak pidana dilaksanakan bukan tanpa catatan, terdapat beberapa evaluasi yang harus dilakukan terkait dengan penanganan tindak Pidana. Terlebih, Gakkumdu Pusat berhasil membuat catatan penanganan tindak pidana Pemilu di luar negeri dengan locus delicti di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ke depannya, Bagja berharap Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan bisa meningkatkan kebersamaan, koordinasi, dan komunikasi terhadap penanganan tindak pidana Pemilihan 2024.

"Memang terdapat perbedaan aturan

pidana dalam pemilu dan pemilihan, sehingga kita harus menyamakan persepsi kembali,” kata alumnus Universitas Indonesia itu.

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, meminta Sentra Gakkumdu menjaga sinergitas untuk mengawal proses demokrasi di Pemilihan Serentak Tahun 2024.

“Seluruh komponen Sentra Gakkumdu dapat bersinergi dan kolaborasi. Ada tiga hal kolaborasi yang benar-benar harus ditaati, yang pertama kolaborasi internal antara anggota Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian,” kata Hadi.

Hadi mengatakan, kolaborasi selanjutnya yaitu kolaborasi Sentra Gakkumdu pusat dan daerah dan peraturan lembaga guna mengoptimalkan kerja-kerja Sentra Gakkumdu.

“Yang kedua yaitu kolaborasi antara Sentra Gakkumdu pusat dan daerah serta kolaborasi Sentra Gakkumdu dengan peraturan lembaga untuk mengoptimalkan pengawasan dan penindakan tindak pidana pemilu,” ungkap Hadi.

Hadi juga memberikan apresiasi atas kerja-kerja Sentra Gakkumdu dalam Pemilu 2024.

“Seluruh tahapan Pemilu 2024 telah berakhir. Saya mengapresiasi kepada bapak/ibu anggota Sentra Gakkumdu yang telah melakukan pencegahan dan menerapkan hukum pemilu, khususnya dalam hal tindak pidana pemilu,” ungkap Hadi.

Daftar peraih penghargaan Sentra Gakkumdu Award 2024:

Kategori Pembinaan Terbaik

1. Banten
2. Sulawesi Utara
3. Nusa Tenggara Timur
1. Kabupaten Ponorogo
2. Kabupaten Lembata
3. Kabupaten Belitung Timur

Kategori Inovasi Terbaik

1. Sulawesi Tengah
2. Kepulauan Riau
3. Banten
1. Kabupaten Siak
2. Kabupaten Kebumen
3. Kabupaten Soppeng

Kategori Soliditas Terbaik

1. Nusa Tenggara Timur
2. Kalimantan Utara
3. Sulawesi Utara
1. Kabupaten Teluk Wondama

2. Kabupaten Nunukan
3. Kabupaten Lombok Utara

Kategori Fasilitas Terbaik

1. Banten
2. Sulawesi Utara
3. Jawa Tengah
1. Kota Makassar
2. Kabupaten Belitung Timur
3. Kabupaten Bangli

Kategori Laporan Kinerja Terbaik

1. Banten

2. Sulawesi Utara
3. Jawa Tengah
1. Kabupaten Luwu Timur
2. Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Kabupaten Lampung Timur

Kategori Komunikatif Terbaik

1. Sulawesi Selatan
2. Kalimantan Selatan
3. Kalimantan Barat

Kategori Daerah Otonom Baru Terbaik

- Papua Selatan •





TUNGGU WAKTU KABINET BARU

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 kian mendekat. Isu format dan personel kabinet ikut melesat.

Politisi handal perlu paham soal momentum dan proyeksi dinamika politik. Begitulah, meski di acara Turnamen Bulu Tangkis DPR dan MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo memanfaatkan momentum itu untuk mengangkat isu penyusunan kabinet di pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Harap maklum, dalam momentum pembukaan acara turnamen bulu tangkis itu, hadir sejumlah politisi lintas partai yang duduk di parlemen. Dengan retorika kelakar, Ketua MPR Bambang

Soesatyo yang juga politisi Partai Golkar ini memulai sambutan menyapa para hadirin.

Saat menyapa Nusron Wahid, sesama politisi Golkar yang masih menjadi Ketua Panitia Khusus Angket Haji, Bamsoet (nama ringkas Ketua MPR) menyebut Nusron sebagai calon menteri. "Sekali lagi, tepuk tangan kepada Pak Nusron, calon Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Beliau hendaknya Menteri Perhubungan," ungkap Bamsoet di acara yang berlangsung di Gedung Olah Raga Kompleks DPR Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024

Serentak keriuhan menyala. Begitu pula saat Bamsoet menyapa Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Maulani.

"Yang saya hormati Pak Viva Yoga. Ini juga santerbut-sebut calon menteri. Karena pembicaraan banyak

di warung kopi, PAN dapat kursi lima menteri. Salah satunya adalah Mas Viva Yoga," sambung Bamsoet sambil menambahkan, sudah mendengar jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran berjumlah 44 orang.

Masih dengan nada canda, ia mengingatkan para anggota legislatif yang nantinya mendapat kesempatan menjadi menteri mungkin saja mendapat kritikan dari DPR yang semula menjadi mitra kerjanya. "Karena nanti jumlah bertam-



bah dari 34 menjadi 44, ya. Ya mudah-mudahan kawan kita yang hari ini di DPR berkesempatan untuk menjadi eksekutif sehingga bisa merasakan dimaki-maki kolega sendiri,” ujar Bamsoet.

Toh sambutan dengan nada kelakar itu mendapat tanggapan serius. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang ditanya mengenai perkembangan penyusunan kabinet mengemukakan, jumlah menteri dan kementerian mungkin bertambah. Namun, jumlah pastinya belum ada kepastian.

“Penambahan iya. Mungkin sekitar itu,” kata Zulhas, nama ringkas Ketua Umum PAN, menjawab pertanyaan mengenai 44 menteri, Rabu, 11 September 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta..

Menurut dia, pengisian nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden nantinya. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN. “Kita tahu itu haknya Bapak Presiden,” kata dia.

Senada dengan itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. “Jadi kalau kita ini jangan berkomentar melampaui batas berkomentar. Serahkan semuanya kepada pak Presiden terpilih, Pak Prabowo,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis, 12 September 2024.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengemukakan pula tidak masalah jika jumlah menteri bertambah di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk kebutuhan percepatan. “Nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya saja saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style berbeda,” ujarnya.

Ia pun meyakini bahwa Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai ketua umum partai, dia mengaku sudah berkomunikasi mengenai jumlah menteri.

Namun dia meminta agar publik menunggu kepastian jumlah menteri yang akan ditetapkan maupun yang akan didapat oleh Partai Golkar. “Ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya dan saya pikir tunggu

tanggal mainnya,” katanya.

Toh, Bamsoet mengakui format maupun personel kabinet memang masih dalam pembahasan. “Nggak isu aja itu, gosip, gosip. Mudah-mudahan, masih evaluasi, berubah-ubah, karena denger-denger,” kata Bamsoet kepada wartawan.

Bamsoet menyebut sampai saat ini belum ada kepastian mengenai format

Nah, kembali ke momentum, wacana pembentukan kabinet itu bermula sejak akhir pekan sebelumnya. Antara lain, saat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina Rembuk Pemuda, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengemukakan pertemuan Presiden Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo. “Salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari



kabinet di pemerintahan selanjutnya. Dia mengatakan Golkar sendiri menyerahkan kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia terkait komunikasi yang berkembang menjelang pemerintahan berikutnya.

“Belum, belum ada kepastian. Belum fixed, masih dalam pembahasan. Saya juga dengar-dengar aja. Tapi kalau Golkar yang terlibat kan ketua umum, Pak Bahlil. Jadi apa pun pasti kita dukung,” kata dia.

Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto. Beliau baru tadi malam touch-down dari berkeliling negara-negara ASEAN,” kata Sara saat menyampaikan sambutan di acara Rembuk Nasional Pemuda Indonesia ke-II, Minggu, 8 September 2024.

Selanjutnya Sara mengungkapkan Prabowo sedang memanggil beberapa pihak, termasuk Hashim ke kediamannya di Hambalang untuk membahas

berbagai hal menjelang pelantikannya sebagai presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. "Siang hari ini beliau enggak keluar dari Hambalang, beliau justru memanggil salah satunya Pak Hashim juga dipanggil, karena ini sudah detik-detik sebelum pelantikan. Jadi banyak persoalan yang harus difinalisasikan hari ini," jelas Sara.

Jadi, kata Sara, absennya Prabowo dan Hashim, harap dimaklumi bukan menganggap acara Rembuk Nasional Pemuda tidak penting. "Intinya teman-

Nusantara yang menjadi menteri dalam Kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. "Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung dua, tiga, empat menteri," katanya di auditorium Universitas Podomoro, Jakarta Barat, Sabtu, 7 September 2024.

Dalam acara Dialog Nasional bertajuk "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045" itu Hashim mengatakan di-

jadi sumber jenderal-jenderal itu dari sekolah Magelang, dan saya dengar akan jadi sekolah lagi ya Pak ya di Bandung ada di Malang ada di Makassar juga ada, karena Pak Prabowo ini penting sekali kita pemeratakan kesempatan untuk anak-anak kita perempuan maupun laki-laki untuk dapat kesempatan untuk jadi eksekutif bukan hanya tentara, bisa jadi manager manager handal," ujarnya.

Hashim lalu membocorkan akan ada empat lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Dia mengaku sudah berjanji untuk tidak membocorkan ke publik dulu "Akan diumumkan saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tapi saya janji tidak boleh bocorkan, ke istri pun juga saya diam-diam, dia selalu siapa ya siapa ya," ungkapnya.

Pada kesempatan sama, Hashim juga memuji sosok Kepala SMA Taruna Nusantara Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman yang juga hadir dalam dialog tersebut. Dia berharap SMA Taruna Nusantara dapat terus menghasilkan pemimpin-pemimpin di masa depan. "Prabowo angkat seorang mayor jenderal bintang dua yang amat cerdas jadi kepala sekolah, bukan rektor karena kepala sekolah amat penting, nanti sumber jenderal itu dari sekolah di Magelang," tandasnya.

Selanjutnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga alumni SMA Taruna Nusantara mengaku sudah berbicara dengan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto soal posisi menteri di struktur kabinet lima tahun mendatang.

Ia menyebut, komunikasinya itu berjalan dengan baik, walaupun pembahasan tidak dilakukan setiap saat. "Sudah (ada komunikasi terkait posisi menteri), komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya," kata AHY di sela acara ulang tahun partainya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2024.

Toh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini hanya menekankan, dirinya selalu berdialog dengan Prabowo dan para pimpinan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM)



teman tetap penting. Tetapi, kalau bicara antara kita dan kepemimpinan bangsa, satu untuk lima tahun ke depan saya yakin teman-teman di sini bisa memahami," ujarnya.

Sedangkan sehari sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) menyebutkan akan ada empat alumni SMA Taruna

rinya telah mengetahui keempat nama alumni SMA Taruna yang akan jadi menteri. Namun, dia telah berjanji kepada Prabowo untuk tidak membocorkan nama-nama tersebut.

Mulanya, Hashim mengatakan Prabowo memberikan kesempatan kepada anak-anak dari lulusan Taruna Nusantara untuk menjadi bagian eksekutif. "Sekolah Taruna luar biasa, nanti

dalam beberapa kesempatan. Namun, AHY mengungkapkan, topik yang dibahas tidak semuanya berkaitan dengan urusan posisi atau jabatan yang bakal diberikan ke Demokrat maupun partai politik lainnya.

"Tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog, tapi yang saya senang kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke partai Demokrat atau partai-partai lainnya, tapi banyak sekali tentang visi besar, gagasan, bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat," lanjutnya.

AHY menjelaskan, pembahasan yang selama ini dilakukan di internal KIM bersama Prabowo adalah terkait dengan visi serta gagasan bagi bangsa Indonesia. "Bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat, memiliki kemandirian di bidang pangan, energi, kemudian juga infrastrukturnya juga semakin kuat, termasuk juga mengintegrasikan seluruh daerah di Indonesia dan sumber daya manusia yang juga semakin berkualitas," ujarnya.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai, siapapun nantinya yang terpilih sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran harus memiliki kesamaan visi dan misi sebagai pembantu di pemerintahan. "Sehingga ke depan kalau para pembantu presiden memahami betul visi-visi pemimpinnya, saya rasa kerja-kerja di lapangan akan lebih fokus, lebih serius, dan juga tepat sasaran," tegas AHY.

Nah,

dalam pada itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo ingin kabinetnya diisi oleh individu-individu kompeten, meskipun mereka diajukan oleh partai politik. "Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Muzani menambahkan, keputusan final terkait susunan kabinet akan diumumkan langsung oleh Prabowo setelah pelantikan. "Kementerian harus dipimpin oleh orang yang relevan dengan tugasnya, agar tidak kehilangan fokus

hingga malam harinya. Karena itu banyak petinggi parpol seperti Muzani, Bahlil, dan Zulhas hadir di parlemen.

Alhasil, Baleg DPR menyetujui agar RUU Kementerian Negara dibawa ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Sejumlah perubahan dalam RUU ini antara lain, penyisipan pasal yakni Pasal 6A soal pembentukan kementerian tersendiri. Kemudian disisipkan juga Pasal 9A soal presiden yang dapat mengubah unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu,



dalam mengemban tanggung jawab," ujarnya.

Beriringan dengan itu, setelah lebih dari tiga bulan tak ada kabarnya, rancangan UU tentang perubahan UU Kementerian Negara kembali dibahas pada 9 September 2024. Badan

Legislasi DPR pada hari itu menyelenggarakan rapat marathon bersama pemerintah. Dari s i a n g

presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.

Wakil Ketua Baleg yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi mengemukakan rancangan UU tentang perubahan UU Kementerian Negara akan disahkan di rapat paripurna DPR sebelum 30 September 2024. "Bisa jadi di paripurna ini kalau keburu. Kalau enggak keburu ya paripurna minggu depan," kata Awiek, nama ringkasnya, Senin, 9 September 2024.

Memang momentumnya. Pelantikan Presiden yang terjadwal 20 Oktober 2024 kian dekat, isu kabinet pun langsung mencuat. •





HAK PREROGATIF MENJADI KUNCI

Hak prerogatif Presiden menjadi kunci penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dalam praktik, hak prerogatif tetap lazim melibatkan lembaga lain.

Semakin dekat dengan pelantikan Presiden, penyusunan kabinet pemerintahan memang menjadi banyak pertanyaan. Namun, sikap para politisi lebih banyak bersandar pada konstitusi yang mengatur hak prerogatif Presiden. Salah satunya adalah bunyi Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan wewenang Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri serta membentuk, mengubah dan membubarkan kementerian negara.

Demikianlah maka para politisi maupun partai politik pun lebih banyak menyerahkan keputusan postur maupun personel kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Partai Demokrat sebagai salah satu partai di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-

Gibran, misalnya, menegaskan menyerahkan keputusan postur dan personel kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengaku menyerahkan semua soal kabinet itu kepada Presiden terpilih. Apakah mendapatkan jatah tiga hingga empat kursi menteri atau tidak sama sekali. Ia mengaku Partai Demokrat tak akan mengintervensi Prabowo dalam menentukan jatah menteri.

"Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, ya jadi bagi Demokrat tidak ingin mengganggu pemikiran beliau sebagai Presiden dalam menentukan jumlah dan kriteria, ya serahkan saja, dan pada akhirnya nanti kita tunggu apa yang akan diumumkan oleh Presiden pada waktunya," kata Her-



man Khaeron kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2024.

Ia menegaskan, penentuan menteri kabinet adalah hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden terpilih. Oleh sebab itu, Partai Demokrat memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk menentukan kriteria, portofolio, dan jumlah kabinetnya. Apalagi, lanjut dia, dalam revisi UU Kementerian sudah diatur bahwa jumlah kementerian menjadi kewenangan penuh Presiden.

"Saya kira wacananya adalah kementerian ke depan harus efektif, kerjanya untuk rakyat, ada target yang harus dicapai. Dan tentu pada akhirnya, kita bisa memenuhi terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," sambungnya.

Herman juga mengatakan Demokrat mendukung penuh langkah Prabowo membentuk zaken kabinet. Menurut dia, zaken kabinet bisa membuat pemerintahan efektif terutama dalam merealisasikan program-program prioritas dan andalan Prabowo-Gibran.

"Ya tentu menjadi harapan besar bahwa zaken kabinet dengan kerja-kerja

yang lebih efektif kemudian memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bisa menjalankan tugas-tugas kementeriannya, ya itu saya kira hal keniscayaan yang harus menjadi kriteria dan keinginan Presiden, tapi semuanya kita kem-



Saya kira wacananya adalah kementerian ke depan harus efektif, kerjanya untuk rakyat, ada target yang harus dicapai.

balikan ke presiden," jelasnya.

Lebih lanjut, Herman mengatakan Partai Demokrat menyerahkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal nama-nama yang disiapkan

untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. "Ya boleh ditanya kepada ketua majelis tinggi atau kepada ketua umum, karena pengambil keputusan tertinggi ada di ketua majelis tinggi dan ketua umum," kata Herman.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tidak terlalu memikirkan soal jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Raka-buming Raka. AHY mengemukakan kursi menteri merupakan hak prerogatif Prabowo-Gibran nantinya.

"Saya benar-benar menghormati, Demokrat benar-benar menghormati hak prerogatif dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan termasuk penyusunan Kabinet karena pembantu-pembantu beliau tentunya diharapkan bisa benar-benar memberikan dukungan penuh," ujar AHY.

Putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, mengaku tak mau berandai-andai soal jatah Partai Demokrat. Jika

dipilih, AHY pun siap bertugas menjadi menteri apapun.

"Oleh karena itu saya siap ditempatkan dan ditugaskan di manapun, saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri," kata AHY.

Nah, menurut Mahkamah Konstitusi (MK), berdasarkan pendapat hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XIII/2015, secara teoritis hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu, yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain. Hak prerogatif ini biasanya dimiliki oleh kepala

Widodo pada periode kepemimpinan pertama meminta KPK melakukan track-ing terhadap kandidat menteri.

Begitulah pandangan pakar hukum Andryan yang menulis disertasi mengenai hak prerogatif Presiden. Keterlibatan lembaga lain, kata dia, tampak pada 'persetujuan', atau 'pertimbangan'. Konsep persetujuan antara lain dapat dibaca dalam rumusan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam menyatakan perang, membuat perdamaian, atau perjanjian dengan negara lain, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Demikian pula hak presiden membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan

dalam pengangkatan menteri-menteri selaku pembantu presiden, dalam pandangan Andryan, intervensi lebih bernuansa politik. Tetapi ada kalanya, presiden berinisiatif mengundang keterlibatan lembaga negara lain.

Nah, sebelumnya, partai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mulai menyetorkan nama-nama yang diusulkan untuk menjadi calon menteri pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan, nama-nama yang diajukan oleh partai politik sudah mulai disaring dan dipilah sebelum diputuskan sebagai menteri.



negara seperti presiden dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional.

Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh lembaga eksekutif yang diberikan oleh konstitusi dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya. Terutama bagi negara penganut sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan.

Toh dalam praktiknya, hal prerogatif Presiden juga melibatkan lembaga negara lain. Contoh yang dapat dikemukakan, misalnya, langkah Presiden Joko

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Sedangkan syarat perlunya pertimbangan dari DPR dapat dilihat dalam Pasal 13 (pengangkatan dan penerimaan duta), dan Pasal 14 ayat (2) tentang pemberian abolisi dan amnesti). Sedangkan Pasal 14 ayat (1) Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi.

Jadi, dalam beberapa hal keterlibatan lembaga negara lain dalam pelaksanaan hak dan kewenangan presiden merupakan amanat konstitusi. Sedangkan

"Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilihan dan pemilihan," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2024..

Dalam kaitan itu, perkembangan internal partai politik yang seiring dengan penyusunan kabinet dapat mengundang dugaan figur politik tertentu akan duduk sebagai salah satu menteri di ka-

binet Prabowo. Langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengangkat Ketua Harian DPP PKB, misalnya, dianggap petunjuk ketua umumnya, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bakal sibuk di kabinet pemerintahan baru. Namun Cak Imin menyangkalnya.

"Tentu regenerasi itu mutlak dibutuhkan sehingga bukan soal saya sibuk apa, soal saya mau bagaimana. Tapi, memang spektrum pekerjaan PKB semakin luas, maka saya harus berbagi tugas dengan ketua harian dalam berbagai bidang," katanya Rabu, 18 September 2024.

Cak Imin pun menegaskan, pengangkatan menteri kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo selaku presiden terpilih. PKB, sambungnya, menghormati hal tersebut dan tidak akan mengintervensi.

"Soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun, mutlak itu hak prerogatif presiden. Sehingga kita secara moral punya tanggung jawab agar pemerintahan yang datang betul-betul bermanfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan," kata politisi yang masih menjabat Wakil Ketua DPR RI ini.

Cak Imin memang telah mengumumkan susunan kepengurusan baru partainya pada Rabu, 18 September di DPP PKB, Jakarta Pusat. Dari jajaran kepengurusan baru itu, Cak Imin khusus memperkenalkan jajaran Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian yang diisi Gen Z, biasanya lekat dengan generasi kelahiran 1997-2012, awal berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya jaringan internet.

Ketua Harian PKB yang ditunjuk Cak Imin adalah anggota DPRD Kota Surabaya Dapil I, Ais Shafiyah Asfar. Ais terpilih menjadi Ketua Harian PKB di usianya yang baru genap 23 tahun. Di bawah Ais, ada enam Wakil Ketua Harian yang mendampingi. Mereka antara lain Najmi Mumtaza Rabbany, Riezal Ilham Pratama, Gielbran Muhammad Noor, Nadya Alfi, Lukman Maulana, dan Muhammad Aji Pratama.

"Kita berharap Ketua Harian yang usianya masih muda, jadi mereka ini mengalami seleksi panjang, ada yang belum berpartai sama sekali, ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah men-

coba partai-partai, ada yang sudah PKB dari awal," kata Cak Imin dalam pengumuman tersebut.

Cak Imin mengharapkan keberadaan ketua harian dan para wakilnya di kepengurusan PKB bisa menggaet suara Gen Z hingga milenial. Cak Imin mengatakan Ketua Harian memiliki tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili dirinya.

"Jadi kalau Ketua Harian melaksanakan tugas harian. Ketua Umum bertang-

Abdul Mu'ti menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi antara tokoh ormas Islam dengan presiden terpilih. Mu'ti tak membantah bahwa pertemuan Ketum PP Muhammadiyah dan Presiden Terpilih tersebut membahas berbagai isu penting terkait masa depan bangsa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah susunan kabinet mendatang.

"Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi dan dialog tentang bagaimana



gung jawab terhadap seluruh program secara umum," ujarnya.

Nah, rupanya proses penyusunan kabinet bukan hanya melibatkan partai politik, melainkan juga organisasi kemasyarakatan semisal Muhammadiyah. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengemukakan, hasil pertemuan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

masa depan bangsa dan juga tentang bagaimana susunan kabinet yang akan datang," kata Mu'ti, Selasa, 17 September 2024. Meskipun begitu, ia mengaku belum mengetahui rincian susunan kabinet.

Alhasil, kita tunggu saja Presiden Prabowo Subianto menerapkan hak prerogatifnya dalam memilih para menteri pembantunya. Yang lebih penting, semoga kinerja pemerintahan periode 2024-2029 lebih baik dari yang sudah-sudah. ●

PRABOWO GANDENG MESRA MEGAWATI

**Presiden terpilih
Prabowo Subianto
sudah bertemu dengan
semua ketua umum
partai politik parlemen.
Kecuali dengan Ketua
Umum PDI Perjuangan.
Apa urgensi pertemuan
Prabowo-Mega?**

Satu-satunya perempuan yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri malah memilih terbang ke luar negeri. Sementara di dalam negeri, wacana, bahkan dorongan untuk mempertemukannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah mengemuka.

Ketua DPP PDIP Bidang sumber Daya, MS Said Abdullah, misalnya, mengemukakan pertemuan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto yang dinilai hanya menunggu momentum. Said menyebut

ada peluang pertemuan itu dilakukan sebelum pelantikan presiden terpilih 20 Oktober 2024.

"Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari. Karena pelantikan tanggal 20 Oktober sudah di depan mata kita bersama," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024.

Said mengatakan semua pihak tengah menyambut presiden terpilih untuk dilantik. Ketua Banggar DPR itu menyebut pertemuan Megawati dengan Prabowo akan ter-

jadi. "Kita semua bersiap-siap untuk menyambut presiden terpilih dilantik tanggal 20 Oktober. Dan insyaallah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak



Prabowo," tambahnya.

Toh Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR periode 2019-2024 menegaskan, jika kelak pertemuan itu terjadi, bukan berarti menjadi sinyal koalisi atau PDIP menyerah menjadi oposisi. "Tidak ada, ketika kedua pemimpin bangsa bertemu berdua, tiba-tiba kita datang pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan melunak, kemudian masuk ke dalam (koalisi)," ujarnya.

Jadi, ia meminta publik tidak menyimpulkan pertemuan Prabowo dan Megawati sebagai sinyal koalisi. Ia menegaskan bahwa posisi PDIP baik di dalam dan di luar pemerintahan tidak ada bedanya meskipun memiliki visi yang sama. "Maka kesimpulan itu tahan dulu. Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia.

"Kalau itu punya kesamaan, insya Allah kami melihatnya bagi PDI Perjuangan, baik di dalam maupun di luar sama saja," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa PDIP juga bukan partai yang gampang baper (membawa perasaan) jika tidak dapat jatah kursi kabinet. "Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri. Atau sebaliknya, PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek. Itu tidak ada ceritanya," demikian Said Abdullah.

Toh momentum yang dikemukakan Said belum juga tampak tanda-tandanya. Malah hingga Rabu, 18 September 2024, Mega dikabarkan berziarah ke pemakaman massa korban pengepungan Leningrad di Piskaryovskoye Memorial Cemetery, St Petersburg, Rusia.

Ia disambut oleh pejabat dari Departemen Hubungan Organisasi Internasional Komite Hubungan Eksternal St. Petersburg Dmitry Krutoy. Presiden ke-5 RI itu memberi penghormatan dengan meletakkan karangan bunga dan mendoakan para korban peristiwa yang terjadi pada era perang dunia kedua itu.

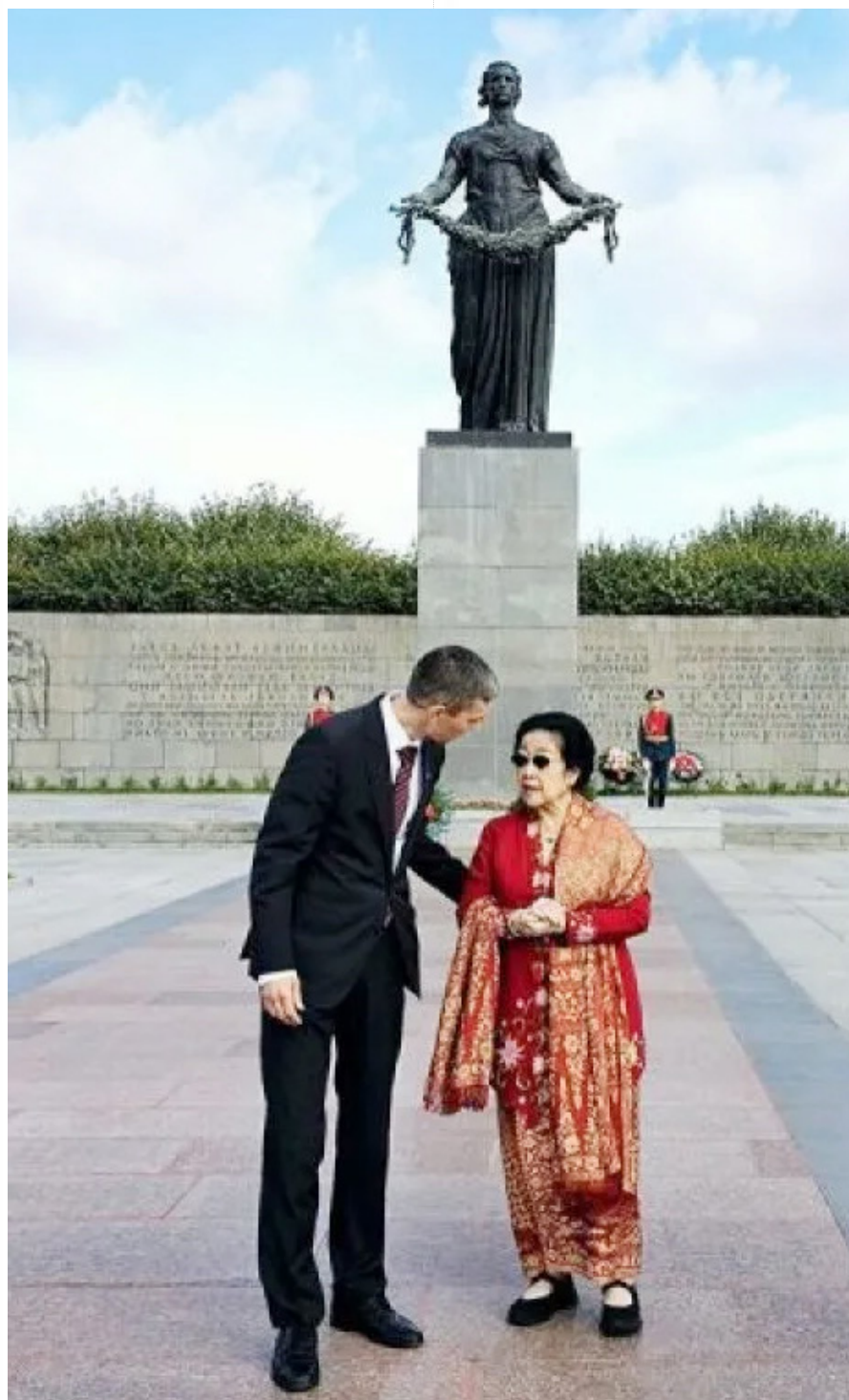
Nah, kunjungan Mega ke Rusia yang dapat dikaitkan langsung dengan dinamika politik dalam negeri adalah ajakannya agar pemerintah negara-negara di dunia untuk segera menyusun hukum internasional yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan atau artificial

intelligence (AI).

Megawati menyampaikan hal itu dalam kuliah umum bertajuk Tantangan Geopolitik dan Pancasila sebagai Jalan Tata Dunia Baru. Kuliah disampaikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-300 Universitas Saint Petersburg di Rusia, Senin, 16 September 2024. Turut mendampingi Megawati saat kuliah umum di Universitas St. Petersburg, Duta Besar Dunia Pendidikan dan Iptek untuk Universitas St. Petersburg, Connie Ra-

hakundini Bakrie. Terlihat juga mendengarkan kuliah umum, antara lain, Dubes Indonesia untuk Rusia Jose Tavares.

Dalam kesempatan itu Megawati mengemukakan risiko AI jika disalahgunakan oleh para aktor non-negara (non-state actors). Menurut dia, dunia kini dihadapkan pada persoalan yang lebih kompleks, volatile, penuh ketidakpastian, dan berpotensi terjadinya eskalasi konflik. "Potensi konflik harus segera dimitigasi, termasuk akibat penyalahgu-



• INFO UTAMA

naan kemajuan teknologi, termasuk artificial intelligence,” kata Megawati.

Ia mengakui perkembangan teknologi di satu sisi membawa kemajuan bagi peningkatan taraf kehidupan. Namun, jangan lupa di sisi lain teknologi untuk senjata pemusnah massal bisa menghancurkan peradaban.

Mega yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menilai keadaan saat ini yang menyebabkan mengapa persoalan geopolitik makin kompleks, bersifat

Di luar hal tersebut, kata dia, ancaman penggunaan senjata kimia dan biologi juga kian mencemaskan. Pada titik itu, Megawati memandang perlu mencermati keterlibatan aktor non-negara sebab setiap negara setidaknya memiliki paradigma ideal atas negaranya dalam posisi internasionalnya.

“Namun, apakah demikian dengan aktor non-negara? Bagaimana kalau kemajuan artificial intelligence dalam hubungannya dengan persenjataan modern yang membahayakan kes-

Lantas, apa kaitannya ajakan Mega terkait artificial intelligence atau kecerdasan buatan dengan dinamika politik di dalam negeri? Harap maklum, yang antara lain menjadi perhatian publik adalah polemik akun Fufufafa pada platform forum diskusi online Kaskus dan tersebarnya rincian penerbangan jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Baik polemik akun Fufufafa maupun rincian penerbangan Gulfstream melibatkan analisis perangkat kecerdasan buatan dan kian ramai dengan exposure media sosial berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Unggahan lama akun Fufufafa kembali dimunculkan di berbagai media sosial pada akhir Agustus dan terus berlanjut hingga September 2024. Isinya antara lain pernyataan negatif terhadap tokoh-tokoh politik, termasuk presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Banyak pihak menuding akun Fufufafa dikelola Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Namun, Gibran membantah kepemilikan akun Fufufafa dengan mengatakan, “Ya, tanya yang punya akun. Koq ke saya?”.

Sedangkan rincian perjalanan jet pribadi Gulfstream menyangkut gaya hidup putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Malah Kaesang yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu sampai mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan klarifikasi.

Lebih dari itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespons putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang menggunakan jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat (AS) bersama sang istri, Erina Gudono. Hasan bilang banyak tokoh yang juga menggunakan jet pribadi, termasuk Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri hingga Jusuf Kalla.

“Mas Kaesang ini bukan pejabat publik dan dia sudah dewasa, dia sudah punya hidup sendiri, sudah punya bisnis sendiri dan dia bukan pejabat publik. Banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet, saya enggak tahu kapan terakhir misalnya kapan Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil,” ujar Hasan lewat akun media sosial Instagram pribadinya, Rabu, 18 September



multipolar, multiaktor., Spektrumnya pun semakin luas karena munculnya aktor-aktor non-negara.

Ia menjelaskan bahwa potensi konflik juga terjadi akibat perbedaan kepentingan nasional dan benturan penguasaan sumber daya. Konflik juga dipicu melalui identitas agama, etnisitas, dan lahirnya berbagai paham baru. Kesemuanya memunculkan konflik asimetris dengan wataknya yang radikal, anti kemapanan, rasial, dan pengaruhnya menembus lintas batas negara.

elamatan umat manusia dikuasai aktor nonnegara?” katanya.

Megawati melanjutkan, “Dalam pandangan saya, yang harus segera hukum internasional harus mengatur ini. Seluruh potensi konflik harus dimitigasi melalui hukum internasional.”

Toh Mega juga mengingatkan agar hukum internasional tersebut dibangun dengan semangat kesetaraan. Bukan atas dasar semangat dominasi sebuah negara besar terhadap negeri lainnya di dunia.

2024.

Ia pun mengatakan posisi Megawati dan Kaesang mirip. Megawati juga merupakan tokoh publik. "Nah terus orang bilang ibu Mega bukan pejabat publik, Kaesang juga bukan pejabat publik. Kaesang kan anak Presiden tapi Ibu Mega kan kalau misalnya di atas lima tahun lalu ibunya Menko PMK. Kalau lima tahun terakhir ibunya Ketua DPR kira-kira posisinya relatif mirip-mirip lah," ujarnya.

Hasan juga menyinggung mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang beberapa kali menggunakan jet pribadi untuk bepergian. "Misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik privat jet, Pak Mahfud misalnya, dan beliau mengakui sendiri beliau sering naik private jet dan lebih sering naik private jet Pak Jusuf Kalla," kata Hasan.

Dia mengatakan bahwa ada peradilan sepihak karena Kaesang menggunakan jet pribadi. Sedangkan pejabat lain menggunakan jet pribadi tidak heboh. "Libatkan juga dong yang lain, biar fair masyarakat melihatnya. Kalau hanya untuk Mas Kaesang, kemudian mereka heboh tapi untuk yang lain Ibu Mega, pak Mahfud, ibu Puan dan yang lain-lain mereka enggak ambil pusing mereka, tapi untuk kaesang tiba-tiba mereka begitu antusias," tandasnya.

Pernyataan Hasan Nasbi mengundang polemik lanjutan pula. Toh Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengemukakan perjalanan Megawati merupakan perjalanan kebangsaan. "Kalau soal jet pribadi kan Kaesang sudah menjelaskan ke KPK," ujar Said di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 September 2024.

Menurut dia, tanggapan Istana itu biasa saja. "Itu kan lagi perjalanan kebangsaan, kan tidak substansial. Sahut-bersahutan itu yang tidak produktif untuk apa juga," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufrmi Dasco Ahmad, mengemukakan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak terlalu ambil pusing dengan akun Fufufafa yang menjadi viral belakangan ini. "Setahu saya, Pak Prabowo enggak terlalu pusing soal itu," ujar Dasco di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September

2024.

Dasco juga menegaskan hubungan Prabowo dan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak akan retak, hanya gara-gara akun tersebut. Bahkan, kata dia, akun tersebut tidak pernah dibahas sama sekali oleh Prabowo.

"Jadi begini, yang begitu-gitu enggak pernah dibahas, gitu lho. Jadi kemudian apa namanya, ditulis seolah-olah keretakan-lah atau segala itu," tandas Dasco.

Karena itu, Dasco mengatakan dirinya tidak tahu jika nantinya Gerindra

jam itu, SBY memberikan masukan kepada Prabowo terkait tugas dan tantangannya ke depan sebagai Presiden Ke-8 RI.

Selepas bertemu Prabowo SBY menolak menjawab pertanyaan wartawan yang menunggu di depan pagar rumah Prabowo. Ia memilih langsung meninggalkan kediaman Prabowo.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut keduanya dalam pertemuan itu berdiskusi seperti biasa. "Pak Prabowo mendengarkan



akan melaporkan ke polisi akun Fufufafa tersebut. Pasalnya, akun tersebut tidak pernah dibahas oleh Prabowo dan tak dihiraukan.

Dalam perkembangan lain, pada Kamis, 19 September 2024, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat berkunjung ke kediaman pribadi Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta. Pada pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu

masukan dari Pak SBY terkait tugas beliau dan tantangan kepemimpinan beliau lima tahun ke depan, mengingat kondisi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis ke depan," kata Dahnil.

Toh kondisi geopolitik dan geostrategis juga yang menjadi pembahasan Mega di Rusia. Apakah sepulang dari Rusia Mega akan memberi masukan pula kepada Prabowo?

Jika ya, berarti pertemuan akan terjadi dan banyak polemik akan terjawab. Tapi lihat saja kelak kenyataannya. ●

SERUAN MENCEGAH KERUNTUHAN DEMOKRASI

Joko Widodo telah berhasil menerobos dan masuk pada lapisan elite politik nasional yang selama ini diisi oleh elite politik lama, baik warisan Orde Lama, Orde Baru, ataupun peninggalan kolonialisme dan feodalisme.

Oleh:
Mangadar Situmorang
Rektor Universitas Parahyangan
Periode 2015-2023

Memasuki dasawarsa ketujuh sebagai negara merdeka, Jokowi tampil sebagai presiden ketujuh. Sebuah prestasi dan karier politik yang mencengangkan sejarah. Dengan latar belakang rakyat biasa, "tukang kayu" itu menapaki posisi politik sebagai Wali Kota Solo (2005), Gubernur DKI Jakarta (2012), dan mencapai puncaknya sebagai presiden sejak 2014.

Satu hal yang Jokowi, dan semua warga Indonesia, tidak boleh lupakan adalah bahwa itu bisa terjadi hanya dalam sebuah sistem politik bernama demokrasi. Sistem ini menegaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental bernegara, seperti penghargaan atas kebebasan, kesamaan hak, supremasi hukum, dan peralihan kekuasaan dan pemerintahan secara damai.

Prinsip dan nilai-nilai tersebut dituangkan dalam berbagai aturan main (undang-undang) dan menjadi acuan bagi institusi pemerintahan, organisasi politik dan kemasyarakatan. Dan, itu semua adalah buah perjuangan penuh air mata dan darah dari Gerakan Reformasi 1998.

Amanat utama Reformasi adalah penolakan terhadap segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena praktik KKN merusak dan menihilkan demokrasi dan mengancam keberlangsungan negara Indonesia. Maka, setiap kebijakan dan kegiatan yang ditengarai hendak mengembangkan praktik KKN harus dilawan.

Kelemahan demokrasi

Dalam pelajaran tentang demokrasi ada ungkapan yang mengatakan bahwa "democracy is the worst form of government except for all others which have been tried". Entah berasal dari Plato atau Winston Churchill, ungkapan itu lebih diartikan bahwa demokrasi lebih baik dari yang lain seperti monarki atau okrasia atau yang lain.

Namun, kita lupa bahwa demokrasi tidak hadir dan berkembang dengan sendirinya, apalagi menjadi panacea untuk semua persoalan bangsa. Pada diri demokrasi itu sendiri terdapat sejumlah kelemahan dan kekurangan karena antara lain selalu membuka ruang dan kesempatan bukan hanya untuk eksis dengan ragam perbedaan, melainkan juga untuk pertarungan berbagai ide, kepentingan, dan perebutan kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia saat ini, terdapat tiga kelemahan demokrasi yang bersifat institusional, kontekstual, dan operasional. Secara institusional, tidak semua prinsip dan nilai yang dikandungnya bisa dan harus dirumuskan ke dalam hukum-hukum, lembaga atau organisasi, dan prosedur yang bisa dikategorikan demokratis.

Sebab, semakin banyak aturan, hal itu dikhawatirkan justru menghasilkan pembatasan dan pengekan hak itu sendiri. Demikian pula dengan lembaga-lembaga politik, semakin banyak lembaga atau organisasi malah menimbulkan

ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemerintahan, termasuk yang terkait dengan proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan.

Secara kontekstual, ekonomi-politik global saat ini dan ke depan tidak hanya diwarnai oleh tingkat persaingan yang ketat dan sumber daya yang makin terbatas. Ekonomi-politik global juga diwarnai oleh volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA), dan yang saat ini disebut brittle, anxious, non-linear, dan incomprehensible (BANI).

Situasi ini tidak hanya menuntut kecepatan dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan kesempatan, tetapi juga membuka ruang pada keberanian bereksperimentasi, berkreasi, dan berinovasi seraya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Jika aspek eksternal tersebut digabungkan dengan aspek internal, baik berupa ambisi untuk memenuhi janji-janji politik (kampanye) maupun mengatasi persoalan riil masyarakat (seperti kemiskinan), dorongan untuk bertindak cepat, berani, dan kreatif semakin diperlukan. Ini sering kali menjadi dalih atau bahkan pembenaran untuk "nyerempet" prinsip-prinsip demokrasi. "Tujuan menghalalkan cara" berlaku.

Secara operasional, karakter socio-political entrepreneurship di atas tampak efektif untuk memobilisasi dukungan politik, baik dari institusi-institusi politik formal (partai politik dan parlemen) maupun yang berasal dari luar (organisasi keagamaan, kemasyarakatan, dan barisan sukarelawan). Dalam hal ini, penting untuk disebutkan bahwa keberadaan sukarelawan "Projo" yang dipahami sebagai pendukung Jokowi telah tampil menjadi kekuatan politik nonpartai dan nonparlemen.

"Kewirausahaan politik" tersebut terjabarkan pula ke dalam algoritma politik yang berbasis pada kalkulasi dan simulasi matematis dan aspek-aspek kuantitatif. Paradigma post-positivis ini menghadirkan pembenaran terhadap kebijakan, keputusan, serta praktik politik berdasarkan data dan angka.

Angka pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi, besaran pengambilalihan saham perusahaan asing, seperti Freeport, atau penurunan angka kemiskinan dan tengkes (stunting), atau perbandingan volume dan nilai ekspor-impor menjadi instrumen-instrumen politik penting. Dan, yang lebih fenomenal adalah kegiatan survei dan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah.

"Garuda Biru dan Seruan Darurat"

Tidak sedikit pujian yang dilontarkan kepada Jokowi atas

kelihaihan, kepiawaian, atau kecerdasannya “menyiasati” kelemahan institusional, kontekstual, dan operasional dari demokrasi Indonesia selama sepuluh tahun menjadi presiden. Lawan-lawan politik tampaknya kesulitan menemukan pasal-pasal jelas dan tegas dalam konstitusi serta undang-undang untuk menyatakan Jokowi bersalah karena melakukan pelanggaran serius.

Tidak demikian halnya bagi sebagian kecil masyarakat, baik yang berasal dari kalangan intelektual dan akademisi, tokoh agama dan kemasyarakatan, asosiasi profesional, media maupun para mahasiswa. Mereka mampu melihat secara intelektual dan intuitif bahaya yang mengancam akibat praktik-praktik lihai dan entrepreneurship politik terhadap kelemahan legal, institusional, dan prosedural demokrasi di atas. Paradigmanya adalah etika dan moral politik.

Secara sederhana, ada tiga hal yang sangat dikhawatirkan.

sedang berkuasa gagal dan memberi dukungan jika berhasil.

Siasat kooptasi dan intervensi ini tidak hanya mengancam runtuhnya supremasi hukum karena digantikan oleh kompromi-kompromi politik, tetapi juga memungkinkan terjadinya self-perpetuation of power baik melalui gerbong koalisi dan terutama politik dinasti.

Kekhawatiran kedua adalah tergerusnya nilai-nilai keadilan yang membuka ruang yang bebas, terbuka, dan adil bagi semua warga untuk berpartisipasi secara proporsional dalam proses-proses politik, pemerintahan, dan pembangunan. Nilai keadilan ini tidak hanya terancam hilang oleh politik dinasti dan kolusi atau koalisi, tetapi juga oleh hegemonisasi kebenaran dan kebaikan yang berbasis pada hasil survei.

Berbagai program pengentasan rakyat dari kemiskinan melalui bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial (bansos) atau yang sejenis hanya akan menghasilkan raupan suara dalam



Pertama, pudar dengan kemungkinan hilangnya independensi lembaga-lembaga politik dan pemerintahan sebagai landasan berlangsungnya mekanisme checks and balances yang terlembaga.

Ini dilakukan dengan politik kooptasi, yakni dengan merangkul dan memasukkan lawan politik (oposisi) ke dalam jajaran pemerintahan. Selain itu, juga dengan siasat intervensi, yakni dengan menempatkan kawan politik pada posisi strategis pemerintahan, seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian atau panglima.

Praktik semacam ini terjadi karena pemegang kekuasaan tampaknya tidak punya keberanian dan keterampilan yang memadai untuk mengelola perbedaan dan perlawanan politik secara elegan. Sebaliknya, oposisi tidak punya ketetapan hati dan kepercayaan diri untuk menjadi oposisi yang terhormat dan siap menjadi alternatif yang tepat jika kekuatan politik yang

pemilu, tetapi tidak memungkinkan rakyat mengatasi sendiri kemiskinannya. Implikasi lebih lanjut dari praktik “pembelian suara” ini adalah kemiskinan akan berkelanjutan, yang jika APBN tidak sanggup memenuhinya, pemberontakan rakyat dan revolusi sosial sangat mungkin terjadi.

Terakhir, ketidakmampuan institusi-institusi demokrasi (yang pertama) untuk menghasilkan partisipasi yang adil dan substansial (yang kedua) dengan sendirinya akan menggerus dan melemahkan struktur utama dari sebuah negara. Keberlangsungan negara dengan segala nilai-nilai dan cita-cita luhur yang dimiliki terancam bubar.

Garuda Biru dan Seruan Darurat tidak semata-mata untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada, tetapi ajakan kewaspadaan mencegah keruntuhan demokrasi dan seruan kewiraan menuju Indonesia Emas. ●



CIPTAKAN PILKADA AMAN DAN DAMAI

Provinsi Sumatera Selatan berupaya semaksimal mungkin menciptakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berjalan aman dan damai. Untuk memantapkan komitmen tersebut Penjabat Gubernur Sumsel, Elen Setiadi bersama kepala daerah kabupaten/ kota melaksanakan rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak.

Pj Gubernur Elen Setiadi menjelaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 adalah momentum krusial bagi demokrasi di seluruh daerah Indonesia termasuk Sumatera Selatan. Untuk itu ia mengajak semua elemen untuk menciptakan Pilkada serentak yang aman dan damai.

Dijelaskan Elen Setiadi, wilayah Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota, 241 kecamatan, 403 kelurahan dan 2.855 desa. Dengan luas wilayah 86,771 km² dan jumlah penduduk sebanyak 8,64 juta jiwa sehingga diperlukan kerja keras bersama untuk kesiapan pilkada.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur mempunyai dua peran yaitu Kepala Daerah Otonom dan Wakil Pemerintah Pusat yang

melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan Bupati/Walikota yang juga sebagai Kepala Daerah Otonom.

Berdasarkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Gubernur berperan dalam isu strategis nasional seperti pemulihan ekonomi nasional dan dalam kesempatan Rakor ini adalah memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan sesuai prinsip demokrasi.

Lebih jauh Elen menjelaskan berdasarkan KPU Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 6,37 Juta pemilih yang tersebar di 13.185 TPS dalam 241 kecamatan, 3.249 kelurahan/ desa di 17 kabupaten/kota.

Untuk menentukan kualitas menyelenggarakan Pilkada dan demokrasi yang akan di Sumatera Selatan. Fokus utama pembahasan yang harus menda-

pat perhatian bersama dalam rapat koordinasi ini meliputi beberapa hal.

Pertama Penguatan Koordinasi Antar Lembaga. Sinergi antar Lembaga yakni Pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya akan menjadi pondasi utama keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari sebelum, selama proses pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan Pilkada.

Kedua, Kesiapan Infrastruktur dan Logistik. Pilkada memerlukan kesiapan infrastruktur dan logistik di semua aspek; mulai dari sarana dan prasarana pemungutan suara hingga teknologi informasi untuk penghitungan suara.

Untuk membantu fokus kesiapan infrastruktur dan logistik, untuk itu di-

harapkan dapat menetapkan target waktu sehingga mengarahkan prioritas yang harus diselesaikan dan yang tidak penting. Dengan demikian kesiapan infrastruktur dan logistik dapat selesai jauh-jauh hari sebelum hari pemungutan suara.

Ketiga, Pengamanan dan Stabilitas. Aspek keamanan adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan Pilkada. Saya mengharapkan TNI dan Polri, sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas keamanan, untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu.

Keempat, Netralitas dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Netralitas ASN adalah syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik dalam pelaksanaan Pilkada.

"Saya menegaskan bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta di kabupaten/kota, fokus menjalankan tugasnya dengan profesional, mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon," jelasnya.

Kemudian pimpinan OPD dapat melakukan sosialisasi intensif tentang netralitas dan membentuk tim pemantau netralitas ASN di setiap kabupaten/kota.

Pj Gubernur Elen Setiadi juga berpesan kepada para camat, 241 Camat di Sumatera Selatan adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik.

"Oleh karena itu, peran Saudara bersama dengan Forum Pimpinan Kecamatan, Danramil, Kapolsekta, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan/Desa dan berbagai pihak lainnya agar bersinergi di wilayah masing-masing," harapnya.

Dengan sinergi yang baik maka selain Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, hal itu juga mencegah konflik horizontal dalam masyarakat.

Dalam kesempatan itu Elen juga mengajak semua untuk berkomitmen bersama memantau setiap tahapan Pilkada.

"Pastikan semua persiapan Pilkada berjalan sesuai rencana agar kita dapat

mewujudkan Pilkada yang demokratis, bersih, dan berkualitas," terangnya.

Sementara itu Ketua Panitia sekaligus Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel Dr Sri Sulastri mengatama tujuan diadakannya Rakor ini adalah memperkuat sinergitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Selain itu juga untuk memperkuat tugas dan fungsi Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat dalam pelaksanaan

Pilkada serentak tahun 2024 sehingga terwujudnya penyelenggaraan pilkada serentak yang lancar aman dan damai.

"Juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang pembangunan dan pengembangan potensi daerah di Sumatera Selatan," tambahnya.

Dalam Rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel tentang pembangunan dan pengembangan potensi daerah. •



DORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN HINGGA KE DAERAH

Pembangunan secara merata hingga ke daerah terus dilakukan Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk pemerataan hingga ke daerah. Pemerataan itu bukan hanya bidang ekonomi tapi juga infrastruktur.

Salah satunya saat Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel) Elen Setiadi bersama Pj Bupati Muara Enim, H. Henky Putrawan, meresmikan jembatan rangka baja Air Lematang Desa Ujan Mas Lama Kabupaten Muara Enim.

matera Selatan, saya mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan Jembatan Air Lematang. Pembangunan jembatan ini merupakan salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan

jukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat.

Elen berharap, dengan adanya Jembatan Air Lematang yang lebih ko-



Peresmian jembatan sepanjang 140 Meter tersebut ditandai dengan pemecahan kendi dan penandatanganan prasasti oleh Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Pj Gubernur Elen Setiadi mengatakan, pembangunan jembatan ini telah lama dinantikan karena menjadi penghubung utama sekaligus jalur lalu lintas alternatif bagi warga yang bermukim di Kecamatan Ujan Mas, khususnya untuk keperluan aktivitas ekonomi atau mengangkut hasil pertanian warga.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Su-

masyarakat," ungkapnya.

Elen menuturkan, jembatan yang memiliki panjang 140 meter dengan struktur rangka baja itu dibangun menggunakan dana yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBD Kabupaten Muara Enim dan didukung hibah rangka baja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Jembatan ini dibangun secara bertahap dari tahun 2021 hingga tahun 2023," tuturnya.

Pembangunan jembatan ini menun-

koh, luas dan aman diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

"Jaga dan rawat keberadaan jembatan ini, sehingga dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang," tandasnya.

Sementara Pj Bupati Muara Enim Hengky Putrawan mengungkapkan sebelumnya masyarakat sekitar mengandalkan jembatan gantung sebagai

akses kegiatan sehari-hari. Sehingga dinilai perlu dibuatkan jembatan permanen rangka baja.

"Alhamdulillah pada hari ini, jembatan permanen rangka baja di Desa Ujan Mas Lama telah selesai dan diresmikan Pj Gubernur Sumatera Selatan," katanya.

Hengky merinci, Jembatan Ujan Mas Lama ini terdiri dari 3 bentang dengan total panjang 140 meter dan lebar 7 meter, yang dibangun selama 4 tahun dari tahun 2021 sampai ke 2024 dengan total biaya sebesar Rp 33 miliar.

"Pada tahun 2024 akan dibangun bangunan pelindung (fender) pilar jembatan sebesar 3 (tiga) miliar rupiah dan lanjutan peningkatan jalan di seberang jembatan sebesar 3 (tiga) miliar rupiah melalui dana APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024," imbuhnya.

Hengky berharap, dengan adanya Jembatan Air Lematang Desa Ujan Mas Lama ini dapat menunjang aktivitas masyarakat, meningkatkan kelancaran mobilitas barang dan jasa sehingga semakin efisien dan meningkatkan konektivitas ke kabupaten tetangga. Serta mendukung pengembangan wilayah di kawasan Kecamatan Ujan Mas dan sekitarnya.

Jembatan Sako (T3) di Kabupaten OKU

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi meresmikan Jembatan Sako (T3) di Aula Wisma Ganesha, Perkantoran PT. Semen Baturaja Tbk, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Ucapan terima kasih juga disampaikan Elen kepada PT. Semen Baturaja yang telah membangun jembatan ini sehingga dapat berguna bagi operasional perusahaan dan juga masyarakat sekitar tambang.

"Harapan kami kedepan tentunya agar PT. Semen Baturaja dapat memberikan bantuan-bantuan infrastruktur lainnya untuk Kabupaten OKU, sehingga dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat dapat merasakan langsung efek positif dari PT. Semen Baturaja untuk masyarakat," jelas Elen.

Elen mengatakan dengan diresmikannya pembangunan Jembatan

Sako T3 Kabupaten OKU dapat memperluas aksesibilitas sehingga aktivitas sosial dapat berjalan lancar guna meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah sekitar.

"Besarnya harapan kita bersama dengan adanya pembangunan jembatan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dan semua lapisan masyarakat," tambah Elen.

Pj Gubernur juga mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

gendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, stunting dan peningkatan akses pendidikan.

Misalnya angka kemiskinan, meski angka kemiskinan di OKU lebih rendah dari Provinsi namun angka tersebut masih di atas nasional dan butuh perhatian bersama.

Sementara itu Komisaris PT Semen Baturaja Tbk, Inosentius Samsul memaparkan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung keberlanjutan



sangat mengharapkan program peningkatan infrastruktur dapat didukung segenap lapisan masyarakat dan pemerintah daerah sehingga program infrastruktur dapat maksimal dan tepat sasaran.

"Kolaborasi seperti ini yang kita harapkan agar percepatan pembangunan di Sumsel lebih cepat terwujud," jelasnya.

Elen juga mengingatkan dan mengajak segenap Pemda dan badan usaha untuk bersama-sama fokus pada pen-

tan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa inisiatif strategis.

Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap kelestarian lingkungan, PT Semen Baturaja telah mengembangkan program Green House.

Program ini bertujuan mengurangi jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas industri melalui penghijauan di sekitar area pabrik dan lingkungan sekitarnya. ●

DEKATKAN PELAYANAN PUBLIK KE MASYARAKAT

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumsel. Salah satunya dengan launching Pelayanan Perizinan untuk Publik (Laksan) di lantai 3 Palembang Square (PS) Mall.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi pada saat launching Laksan ini menegaskan, langkah ini penting dilakukan dalam menyikapi perubahan paradigma bagi pelayanan pemerintah. Jika sebelumnya pemerintah itu yang dicari masyarakat, sekarang pemerintah yang hadir di tengah masyarakat.

Menurut Elen, DPMPTSP Sumsel berusaha memberikan layanan ke masyarakat yang ingin berinvestasi, untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja karena ada multiefek sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi.

"Konsepnya meski sederhana tapi tempatnya representatif sehingga mereka lebih mudah ditambah lagi berada di PS Mall karena banyak UMKM

dan masyarakat membutuhkan," ucapnya.

Elen menjelaskan, jam kerja Laksan berada di PS Mall sesuai dengan jam operasional mall bahkan Sabtu dan Minggu pun bisa diberikan pelayanan.

"Jadi masyarakat tidak terbatas untuk mengurus perizinan sehingga sangat membantu masyarakat terutama meningkatkan pelayanan ke publik. Untuk mengikuti investasi dan usaha bagi UMKM. Jadi akan lebih mudah mereka mengurus akses perizinan," tambahnya.

Dia berharap pelayanan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Gunakan layanan ini, dan berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Insya Allah dengan memberikan pelayanan

yang baik maka akan banyak yang berinvestasi dan membuka usaha sehingga lapangan kerja juga akan terbuka," tuturnya.

Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sumsel, Kurniawan Abadi mengatakan tujuan di launchingnya gerai perizinan suatu inovasi agar perizinan lebih dekat guna meningkatkan pelayanan yang prima.

"Semoga di launchingnya pelayanan perizinan dapat secara lebih dekat bagi pelaku usaha untuk mempermudah bagi masyarakat melakukan perizinan," pungkasnya.

Resmikan Sekretariat Bersama

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi juga meresmikan Sekretariat Bersama



Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sumsel, di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung di Jalan Jendral Sudirman Palembang.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sumsel.

Penandatanganan dilakukan langsung Pj Gubernur Elen Setiadi, Kepala OJK Sumsel Babel, Arifin Susanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky P Gozali, Kepala Wilayah DJPB Sumsel, Rahmadi Murwanto, Kepala BPS Provinsi Sumsel, Moh Wahyu Yulianto dan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel, Elis Nurhayati.

Pj Gubernur Elen Setiadi menjelaskan keberadaan sekretariat bersama ini akan menjadi tempat melakukan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan program pengembangan ekonomi dan keuangan d Sumsel.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa meresmikan ruang sekretariat bersama yang secara sukarela dan disepakati disediakan oleh OJK dan ini adalah untuk kolaborasi, kerja bersama antar instansi di Sumsel tekad nya yakni hanya satu bagaimana kita secara bersama melakukan pengembangan ekonomi di Sumsel dan instansi-instansi yang terlibat bekerja sesuai dengan perannya masing-masing," kata Elen.

Elen meyakini dengan upaya pengembangan ekonomi di Sumsel masyarakat bisa sejahtera dan angka kemiskinan di Sumsel dapat menurun.

"Dengan pengembangan ekonomi itu kita yakin bahwa tindak kesejahteraan masyarakat akan meningkat, ekonomi berjalan makan tingkat kemiskinan di Sumsel juga akan turun. Artinya outputnya masyarakat kita bisa sejahtera, tentu dalam mewujudkan ini tidak bisa dilakukan oleh saya sendiri, ini memerlukan banyak pihak," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyebut sekretariat ini nantinya akan menjadi tempat untuk merumuskan, memetakan dan memfokuskan strategi dan kebijakan dalam upaya membangun dan mengembangkan perkomomian di Sumsel secara masif, terstruktur dan berkelanjutan.

"Disini nanti kita akan memfokuskan program secara yang sama secara bersama dengan tujuan yang sama, sasaran yang sama dan daerah dimana saja akan kita diskusikan sehingga dengan demikian daya ungkit kerja bersama ini memberikan daya ungkit yang besar un-

rah, BUMN, BUMD," tambahnya.

Elen juga menambahkan di sekretariat bersama akan menerima usulan-usulan dari instansi lainnya terkait untuk pengembangan ekonomi di Sumsel melalui nomor kontak yang akan disediakan.



tuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Dia menilai keterlibatan semua pihak akan mampu menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tusi dan peran nya.

"Tujuan kita sama, yakni untuk pengembangan ekonomi di Sumsel, BPS dengan data-datanya, BI, OJK memfasilitasi bagaimana sektor perbankan dan non perbankan memfasilitasi kegiatan usaha sekaligus pengendalian inflasi, begitu juga dengan yang lain-lainnya baik itu pemerintah dae-

"Jadi sinergi inilah yang kita yakin pasti bisa segera meningkatkan ekonomi sekaligus mengurangi kemiskinan di Sumsel. Nanti juga ada nomor kontak nya sehingga bapak dan ibu sekalian bisa memberikan masukan, saran ataupun program apakah bapak ibu juga ingin memberikan bantuan yang ingin disalurkan juga bisa kita akan terima dan diskusikan bersama untuk mewujudkan Sumsel di bidang ekonominya meningkat dan kemiskinan menurun," terangnya. •



PASTIKAN STOK DAN KEBUTUHAN BERAS MENCUKUPI

Guna memastikan kebutuhan beras di Sumatera Selatan, Penjabat (Pj) Sumsel Elen Setiadi, bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo meninjau Gedung Bulog Cabang Jua-jua Kayuagung OKI dan penggilingan padi milik PT Belintang Panen Raya 2 Karya Jaya Palembang.

Perinjauan yang dilakukan di kedua lokasi tersebut guna memastikan stok beras di Sumsel mencukupi. Dimana untuk saat ini total stok beras Bulog yang ada di Sumbagsel ada 36 ribu ton. Sedangkan yang tersimpan di gudang Bulog OKI sebanyak 1.254.020 kg. Artinya untuk stok beras sudah mencukupi.

"Kita tadi kunjungan ke Bulog untuk cek stok bulog. Total stok bulog yang ada di Sumbagsel ada 36 ribu ton lebih kita sudah pastikan," katanya.

Dia mengatakan, beras 10 kg untuk

program bantuan pangan juga tersedia dan siap di distribusikan. Karena ada bantuan pangan se Indonesia 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di bulan 8, 10 dan bulan 12 itu dipastikan berjalan.

"Tadi juga kita cek bersama pak Gubernur dan Bupati itu sudah siap dan dipastikan berjalan. Satu lagi SPHP yang 5 kg untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan itu stoknya juga ada," imbuhnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Elen Setiadi mengatakan kunjungan ini dalam rangka menjaga ketahanan pangan di

Sumsel.

"Kita ingin sekarang mengejar bagaimana produksinya, dalam mengejar produksi ini kita sudah diskusikan bersama Kepala Bapanas dan Pak Mentan, kita akan mengoptimalkan yang lahan rawa, ini akan segera kita kerjakan supaya nanti input produksinya bertambah," tuturnya.

Disela-sela tinjauannya di Gudang Bulog Kayu Agung OKI kali ini i Pj Gubernur Sumsel bersama Kepala Bapanas RI secara simbolis menyerahkan bantuan beras kepada warga.

Selanjutnya rombongan bergerak menuju penggilingan padi milik PT Belitang Panen Raya 2 yang terletak di seberang pintu tol Keramasan Karya Jaya.

Ditempat ini, Pj Gubernur Elen Setiadi bersama Kepala Bapanas RI melihat langsung proses pengeringan, packingan beras serta produksi bihun sebagai hilirisasi dari produksi pangan di pabrik penggilingan padi tersebut.

Launching Program Genius

Pj Gubernur Elen Setiadi bersama Kepala Bapanas Arief Prasetyo juga mengunjungi Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) guna launching Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (Genius). Program Genius ini sebagai langkah pemerintah dalam membangun generasi emas 2045.

Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak sehingga program Genius dapat terlaksana di Kabupaten OKI Provinsi Sumsel.

"Program Genius di inisiasi Bapanas RI sehingga pada hari ini kita bisa sampaikan secara masif baik orang tua, guru bagaimana pola makan sehat," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah mendorong generasi muda untuk mengonsumsi makan yang sehat itu di dalamnya mengandung sepertiga karbohidrat, sepertiga sayur-mayur, seperenamnya lauk pauk kemudian buah-buahan.

"Selain melaksanakan program Genius, kita juga mengkampanyekan stop boros pangan," terangnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Elen Setiadi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bapanas RI yang sudah menjadikan Kabupaten OKI menjadi tuan rumah pelaksanaan program Genius tingkat Provinsi Sumsel.

Elen mengatakan, Sumsel menjadi satu dari sepuluh provinsi yang sudah launching program Genius ini.

"Kita tidak hanya menyiapkan, melanjutkan program ini tetapi juga dari hulu nya produksi, sampai pengolahan dan distribusinya ke anak-anak," ucapnya.

Dengan demikian kata Elen, hal tersebut menjamin anak-anak kedepan mendapatkan gizi yang cukup sehingga siap untuk mengejar Indonesia emas 2045.

"Insya Allah Sumsel siap untuk pro-

gram Genius ini. Sekali lagi kita apresiasi kepada Kepala Bapanas RI yang menunjuk Sumsel untuk launching program Genius," tutupnya.

Ditempat yang sama Pj Bupati OKI Asmar Wijaya mewakili masyarakat OKI menyebut, Genius merupakan program yang luar biasa dalam menempah generasi yang sehat, kuat, cerdas dan ceria menuju generasi emas 2045.

"Maka dari itu kami Kabupaten OKI menyambut baik program Genius ini dalam mewujudkan generasi emas 2045," ujarnya.

Usia launching program Genius, Pj Gubernur bersama Kepala Bapanas RI dan Penasehat DWP Badan Pangan Nasional RI, Neila Pasha bergabung bersama anak-anak sekolah menikmati asupan makanan sehat dan bergizi. •



BERIKAN AKSES BERKARYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian lebih dengan memberikan kesempatan untuk mereka berkarya dan bekerja. Dukungan perlu dilakukan khususnya dari pemerintah sendiri. Untuk itu Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi akan terus memberikan perhatian, mendorong para penyandang disabilitas untuk terus maju.

"Mereka melakukan sama yang seperti kita lakukan seperti membaca puisi dan membaca, bernyanyi dan lainnya. Namun yang diperlukan mereka bahwa mereka perlu diberikan akses, dukungan dan dorongan," kata Elen pada saat Pemecahan Rekor Muri Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Elen disabilitas ini telah memberikan inspirasi bagi semua termasuk yang hadir malam ini, artinya tidak ada yang tidak bisa karena semangat itu lah yang dicerminkan oleh mereka ini.

"Terima kasih OJK, BSB mereka diberikan akses berupa tabungan," ucapnya.

Lebih lanjut Elen Setiadi menambahkan, jika para penyandang disabilitas diberikan akses yang cukup dan fasilitas maka mereka akan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya.

"Kita yakinkan bahwa Pemprov Sumsel memberikan akses yang sama. Ini kewajiban kita untuk memberikan perhatian yang sama kepada mereka," imbuhnya.

Elen mengaku sangat terharu apa yang telah dilakukan para anak-anak disabilitas ini meskipun dengan keterbatasan tapi sudah memberikan inspirasi yang luar biasa.

"Disabilitas bukan penghalang, tapi semangat dan spirit untuk

maju dan kita harus memberikan ruang buat mereka bukan hanya sektor perbankan tapi pekerjaan dan lainnya," ucapnya.

Elen memberikan apresiasi pelaksanaan pemecahan Rekor Muri Kejar Sekolah Luar Biasa Terbanyak ini sungguh luar biasa.

"Ini membuka akses perbankan bagi para disabilitas. Untuk Rekor Muri ini InsyaAllah ini yang pertama di Indonesia," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Bank Sumsel Babel, Ahmad Syamsudin mengatakan Bank Sumsel Babel telah melaksanakan rangkaian program Bank Goes To School untuk inklusi dan literasi keuangan di 48 kabupaten/kota di Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung.

"Salah satu program Bank Goes To School yaitu KEJAR yang merupakan bentuk aksi pelajar Indonesia menabung dalam rangka implementasi Keputusan Pres-

iden no 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

"Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan citra positif baik bagi BSB, Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung dan di catat rekor Muri sebagai Pembukaan Rekening Tabungan Pelajar Siswa Sekolah Luar Biasa Terbanyak," ujarnya.

Adapun jumlah sekolah luar biasa yang diikuti sertakan pada kegiatan KEJAR ini diantaranya SLB Provinsi Sumsel lanjut dia, ada sebanyak 39 dengan jumlah rekening 2.043 dan SLB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 dengan jumlah rekening 1.141 sehingga total keseluruhan 48 SLB dan 3.184 rekening.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumsel dan Kepulauan Bangka Bel-



tung yang telah mendukung termasuk sekolah luar biasa yang sudah bersinergi untuk pelaksanaan ini," pungkasnya.

Launching Sekolah Lansia

Selain disabilitas Pemprov Sumsel juga memberikan perhatian pada lanjut usia atau Lansia yang dilaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumsel. Pj Ketua TP PKK Sumsel Melza Elen Setiadi melakukan kunjungan kerja untuk pembinaan dan penilaian 10 program pokok PKK, monitoring dan evaluasi Galeri Pelangi sekaligus launching sekolah Lansia di Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.

Melza mengungkapkan kunjungan sekaligus penilaian 10 program pokok PKK ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan melihat secara langsung pelaksanaan di daerah sekaligus sebagai evaluasi bagi TP PKK Sumsel.

Apabila seluruh program dan kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh daerah termasuk di desa/kelurahan melalui kelompok Dasawismanya, Melza optimis keluarga sejahtera akan terwujud secara merata di Pagar Alam.

Begitu pula jika sumber daya alam maupun sumber daya manusia digerakkan dan dimanfaatkan secara positif dan maksimal, tentu akan mendapatkan hasil sesuai harapan.

"Saya dengar bahwa Dasawisma di kelurahan ini cukup aktif, bahkan kader yang berprestasi mendapatkan stimulan. Hal ini sesuatu yang menggembirakan buat saya, bahwa kader PKK yang rata-rata adalah relawan sudah diberikan perhatian dan penghargaan. Mudah-mudahan bisa menambah semangat dan motivasi," ucap Melza.

Terkait sekolah Lansia yang baru saja diresmikan, Melza menyambut baik dan mengapresiasi atas terbentuknya sekolah Lansia. Sekolah tersebut sebagai bentuk dan wujud kepedulian, perhatian dan penghormatan terhadap lansia

"Harapan kami melalui pembentukan sekolah lansia ini, Lansia kota Pagar Alam, khususnya lansia menjadi siswa sekolah ini, harus menjadi lansia yang tangguh, mandiri, sehat, aktif, energik, produktif dalam kehidupan," imbu Melza. •





INFLASI DAN HARGA KOMODITI MASIH TERKENDALI

Melalui berbagai upaya yang dilakukan, inflasi di Kota Palembang masih dalam kondisi terkendali. Meski ada sejumlah komoditi yang mengalami kenaikan namun secara umum Palembang malah mengalami deflasi.

Keberhasilan menekan laju inflasi merupakan upaya Penjabat (Pj) Walikota Palembang, A Damenta beserta jajaran yang banyak melakukan terobosan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang mengungkapkan kalau pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang pada Agustus 2024 (Month to Month) mengalami tingkat deflasi sebesar 0,27 persen atau inflasi sebesar -0,27 persen.

"Untuk Inflasi Years on Yearsnya sebesar 1,85 persen. Deflasi di Bulan Agustus ini merupakan yang keempat kali terjadi di kota Palembang sepanjang tahun 2024, yakni bulan Januari (-0,02), Juni (-0,07), Juli (-0,31) dan Agustus (-0,27)," kata Kepala BPS Kota Palembang, Yudhistira Arya Noegraha.

Yudhistira menjelaskan, angka inflasi Month to Month menunjukan bahwa

selama bulan agustus 2024 telah terjadi kenaikan inflasi 0,04 persen dibandingkan bulan Juli 2024.

Sementara Pj Walikota Palembang, A Damenta menyebut, berdasarkan capaian angka inflasi tersebut, dapat dikatakan bahwa perkembangan harga, baik makanan maupun non makanan selama bulan Agustus 2024 di kota Palembang masih terkendali.

"Walaupun ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan," ujarnya.

Pj Walikota Palembang itu juga berharap kepada OPD terkait agar dapat lebih berperan aktif dalam usaha pengendalian inflasi di kota Palembang.

"Sehingga sampai dengan akhir tahun 2024 nanti, inflasi Year on Year atau inflasi pada akhir tahun 2024 tidak akan melampaui target atau asumsi inflasi 2024 yakni 2 ± 1 persen," tuturnya.



Lakukan KAD Dengan Pemkab Brebes

Salah satu upaya menjamin ketersediaan pasokan komoditas bawang merah serta menekan angka inflasi, Pemerintah Kota Palembang melakukan kerjasama antar daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal pengadaan Bawang Merah yang banyak dibutuhkan warga.

Dari hasil kerjasama dan kunjungan ini, Pemkab Brebes siap memenuhi kebutuhan bawang merah untuk kebutuhan warga Palembang.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama itu dilakukan langsung oleh Pj Wali Kota Palembang A Damenta bersama Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Palembang Albert Midianto Amad dan Kepala Dinas KDPKP Brebes M Furqon di Kantor Bupati Brebes.

Pj Walikota Palembang, A Damenta mengungkapkan Kabupaten Brebes memberikan kontribusi yang besar bagi produksi nasional karena daerah ini merupakan sentra bawang merah terbesar

di Indonesia

Damenta mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Pemkab Brebes yang telah bersedia melakukan kerjasama antar daerah dengan Pemkot Palembang.

"Kita tau Brebes penghasil bawang



Rata-rata peminatan terhadap hasil pertanian kita sangat luar biasa.

terbesar, tujuannya membuat KAD untuk menjaga inflasi khususnya di sektor komoditas bawang merah," ucap A Damenta.

Ia menjelaskan bahwa Kota Palembang sangat banyak membutuhkan bawang merah, diiringi dengan harganya yang cenderung fluktuatif atau naik turun.

"Di samping berupaya menanam

sendiri, kebutuhan kami juga masih kurang. Untuk itu dilakukan kerjasama ini dengan target menjaga pasokan bawang agar tidak terjadi kekurangan," bebernya.

Sementara itu, Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar mengungkapkan, bahwa pada saat festival bawang sebelumnya sudah ada beberapa kabupaten, kota dan provinsi dari luar Jawa yang sudah berkolaborasi dengan Brebes.

"Rata-rata peminatan terhadap hasil pertanian kita sangat luar biasa, bawang Brebes penyuplai nasional kualitasnya juga bagus sehingga mungkin bisa menjadi daya tarik kabupaten kota bahkan investor untuk mengambil bawang dengan Brebes," ucapnya.

Iwan menuturkan bahwa Kabupaten Brebes tidak boleh egois karena bawang di daerah ini begitu melimpah, untuk itu Pemkab Brebes siap berkolaborasi dengan Pemkot Palembang.

"Apabila ada kurang pertanian di Palembang tentu harus kita suplai, terimakasih sekali lagi Brebes dipercaya Kota Palembang untuk memajukan masyarakatnya baik itu masyarakat Brebes maupun Palembang," tuturnya. •



Lucyanti

WUJUDKAN PENDIDIKAN DAN BEROBAT GRATIS

Sosok Hj Lucyanti tidak terlalu asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, wanita yang kini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sumsel ini dulunya merupakan istri mendiang Pahri Azhari, Bupati Muba 2 periode pada tahun 2008-2012 dan 2012-2015.

Sebelum terjun ke politik, Lucy, sapaan akrabnya, merupakan lulusan Sarjana Teknik dan memulai karirnya sebagai seorang konsultan teknik. Tepatnya menjadi Pimpinan Cabang PT. Pamintori Cipta Konsultan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan suaminya saat itu yang bernama Pahri Azhari terjun dalam dunia politik, dirinya pun akhirnya ikut berkarir di bidang politik.

Selama mendampingi Pahri Azhari sebagai Bupati Kabupaten Muba, alumni dari SMA Negeri 2 Kota Palembang itu terus melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya saat menjabat sebagai Ketua TP PKK Muba, Hj Lucyanti pernah menghidupkan Rumah Lansia.

Langkah

Lucy terjun ke politik pun terus berjalan, dimana saat itu dirinya pernah menjabat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumsel. Bersama PAN, ia mendapatkan amanah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel dari 2009 hingga 2015.

Kini, Lucy menjabat sebagai Ketua Pimda PKN Provinsi Sumsel. Partai yang didirikan oleh Dr. H. Anas Urbaningrum

M.Si tersebut mempercayai Lucy sebagai Ketua Pimda PKN

Sumsel sejak tanggal 14 Januari 2022.

Selama memimpin Pimda PKN Sumsel, wanita yang juga pengusaha ini bisa dikatakan berhasil. Karena Pimda PKN Sumsel berkontribusi dengan keberhasilan ikut serta pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dan



juga berhasil mendapatkan 6 kursi di Sumsel.

6 Kursi tersebut terdiri dari 4 kursi di DPRD Kabupaten Muba, 1 kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dan 1 kursi di DPRD Sumsel.

Alhasil, dengan modal 4 kursi yang dimiliki dan juga keinginan untuk berbuat yang terbaik bagi Masyarakat Muba, Lucy ikut serta dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Muba yang rencananya bakal digelar tanggal 27 November 2024 nanti.

Dengan berbagai pengalaman di bidang pemerintahan dan juga politik yang dimilikinya, Lucy yang memiliki tekad untuk mewujudkan pendidikan dan berobat gratis bagi Masyarakat Muba yang dulu sempat jaya dan menjadi pelopor bagi daerah lainnya.

Terlebih belakangan ini dirinya memiliki survei tertinggi sebagai calon Bupati Muba 2024. Terbukti dari banyaknya partai politik yang mengusung Lucyanti-Syaparuddin untuk maju dalam Pilkada Muba.

Hj. Lucyanti dan H. Syaparuddin maju sebagai Cabup dan Cawabup Kabupaten Muba, diusung oleh 11 Parpol, dengan rincian 8 Parpol yang memiliki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba hasil Pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, dan 3 Parpol yang tidak memiliki kursi.

Adapun 8 Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Muba serta mengusung Hj. Lucyanti dan H. Syaparuddin, yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 4 Kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) 10 kursi, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 7 kursi.

Kemudian Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 2 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 1 kursi, dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) 1 kursi.

Sedangkan Parpol yang tidak mendapatkan kursi namun memberikan dukungan kepada Hj. Lucyanti dan H. Syaparuddin yaitu Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Garuda.

Total suara yang diperoleh oleh pasangan Hj. Lucyanti dan H. Syaparuddin dengan dukungan dari 11 Parpol tersebut yakni 300.934 suara.

Sementara syarat minimal suara yang harus dimiliki oleh pasangan calon yang ingin mendaftar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muba yaitu 33.589 suara, yang berasal dari hitungan 8,5 persen dari total suara sah pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Muba tanggal 14 Februari 2024 yang lalu.

"Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih, dimana kami sudah diterima dan ditempatkan di tempat yang sangat terhormat. Kami

pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu prioritasnya.

Visi Hj Lucyanti adalah menjadikan Kabupaten Muba sebagai daerah yang maju dan sejahtera, dengan misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur.

Dia juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya ma-



ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," ucap Lucyanti beberapa waktu lalu usai menerima usulan rekomendasi dari beberapa parpol.

Bagi Lucy, Pilkada adalah momentum penting bagi perubahan dan pembangunan daerah. Hj Lucyanti berkomitmen untuk membawa perubahan positif bagi Kabupaten Muba melalui program-program yang inovatif dan pro-rakyat.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam

nusia melalui pelatihan dan pendidikan juga menjadi salah satu prioritasnya.

Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam memenangkan Pilkada. Hj Lucyanti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misinya.

"Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Muba menjadi daerah yang lebih baik dan sejahtera. Dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat berarti bagi saya," tutupnya. •

Muhammad Dja'far Shodiq

MANTAN TUKANG OJEK HARAPAN BARU BAGI OKI

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menjadi saksi bisu perjalanan hidup seorang pria sederhana yang kini digadang-gadang sebagai calon pemimpin daerah.



H Muhammad Dja'far Shodiq, atau akrab disapa Pak Shodiq, bukanlah politisi karbitan. Ia adalah representasi sejati dari akar rumput, seorang putra daerah yang merajut asa dari tanah transmigran yang ditempa kehidupan keras dan kini siap mengemban amanah kepemimpinan.

Menelusuri riwayat hidup Shodiq, kita akan dibawa pada perjalanan panjang yang sarat perjuangan. Lahir di Bojonegoro dan besar di Desa Makarti Mulya, Kecamatan Mesuji, OKI, Shodiq muda bukanlah anak orang berada yang dimanja kemewahan.

Ia merasakan getirnya hidup sebagai tukang ojek, mengantar penumpang dengan sepeda motor bututnya. Tak berhenti di situ, ia juga pernah menjadi pekerja tebang tebu di PT. Cinta Manis, berjibaku dengan terik matahari dan keringat yang mengucur deras.

N a - m u n , kerasnya kehidupan tak membuatnya menyerah.

Justru, pengalaman inilah yang menempa mental baja Shodiq. Ia belajar arti kerja keras, kegigihan dan pantang menyerah.

Nilai-nilai inilah yang kelak menjadi bekal berharga dalam perjalanannya di dunia politik.

Meski kini namanya digadang-gadang sebagai calon bupati OKI, Shodiq tak pernah lupa asal-usulnya. Ia tetaplah sosok sederhana dan merakyat, tak terpengaruh oleh gemerlap panggung politik.

Kesehariannya dihabiskan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mencari solusi bersama.

"Gawe opo arep wah mas, pang-gah penak biasa wae (Untuk apa hidup serba Wah Mas, lebih enak hidup biasa-biasa saja-red)," begitulah prinsip hidup Shodiq.

Ia menolak perlakuan istimewa dan lebih memilih hidup apa adanya. Baginya, jabatan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mengabdikan kepada masyarakat.

Kedekatan Shodiq dengan masyarakat bukan sekadar pencitraan. Ia benar-benar memahami denyut nadi kehidupan rakyat OKI. Ia tahu persis apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan dari seorang pemimpin.

Kesederhanaan inilah yang membuat Dja'far Shodiq dicintai rakyat. Ia bukan sekadar pemimpin, tapi juga sahabat, saudara, bahkan keluarga bagi masyarakat OKI.

Di tengah kesibukannya, Pak Shodiq selalu menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan para habaib, kiai, dan tokoh agama lainnya. Ia percaya, doa dan restu dari mereka adalah modal utama dalam perjuangannya.

Kehadiran Shodiq di panggung politik OKI memberikan harapan baru bagi masyarakat. Mereka melihat sosok pemimpin yang jujur, merakyat, dan memiliki komitmen kuat untuk memajukan daerah. Dukungan pun mengalir

dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, alim ulama, hingga rakyat biasa.

H Tarmusi, tokoh masyarakat berpengaruh di Kecamatan Kota Kayuagung, juga menyerukan dukungan kepada Pak Shodiq. Ia mengajak seluruh warga OKI untuk bersatu dan memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada nasib rakyat.

“Untuk itu mari kita satukan tekad dan tujuan agar kabupaten OKI jadi lebih baik dengan mengajak saudara, tetangga, handai tolan dan semua warga OKI untuk mendukung dan memilih H. M. Dja’far Shodiq dan Abdiyanto sebagai Bupati OKI Priode 2025 - 2030,” ajaknya.

Dukungan yang mengalir deras ini bukanlah sekadar angka, tapi sebuah amanah yang harus MDS junjung tinggi. Ia sadar, menjadi pemimpin bukanlah sekadar duduk di kursi empuk, tapi sebuah pengabdian yang menuntut tanggung jawab besar.

Dja’far Shodiq tak sekadar ingin menjadi bupati, ia ingin membawa perubahan nyata bagi OKI. Ia bermimpi tentang OKI yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berkeadilan.

“Wong tani, wong transmigrasi, wong cilik, semua punya hak yang sama untuk hidup sejahtera,” tegasnya.

Visi dan misinya yang pro-rakyat inilah yang membuat Dja’far Shodiq mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan ulama.

Perjalanan Pak Shodiq menuju kursi bupati OKI masih panjang. Tantangan dan rintangan pasti akan menghadang. Namun, dengan dukungan masyarakat dan restu para tokoh agama, ia optimistis bisa mewujudkan impiannya untuk membangun OKI yang lebih baik.

Shodiq sudah terlebih dahulu mel-

anglang buana merasakan kursi kepemimpinan dari lingkup terkecil hingga namanya besar di zona dan kawasan lintas timur.

Sebelum melejit karirnya, Shodiq juga

- 2019 dari Partai Golkar dapil V meliputi Kecamatan Mesuji, Mesuji Raya dan Mesuji Makmur.

Kedekatannya dengan masyarakat juga membuat Bupati OKI Iskandar



pernah merasakan menjadi kepala desa di Desa Makarti Jaya Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI masa jabatan 2009-2015.

Karena kepribadian yang sederhana karier politiknya terus menanjak dengan menjadi anggota DPRD OKI dari 2014

tertarik menggandengnya sebagai Wakil Bupati OKI periode 2019-2024. Puncak karirnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati OKI dan lalu ditunjuk menjadi Bupati Definitif selama 1,5 bulan dimulai dari Desember 2023 - Januari 2024. •

BIODATA

Nama : H. Muhammad Dja’far Shodiq
Tempat /Tanggal lahir : Bojonegoro /22 Februari 1969
Agama : Islam
Alamat : Kecamatan Mesuji, Kabupaten
Ogan Komering Ilir

RIWAYAT KARIR POLITIK

* Kepala Desa Makarti Jaya periode 2009-2015

* Anggota DPRD OKI dapil V periode 2014 - 2019 dari Partai Golkar
* Wakil Bupati OKI periode 2019-2024
* Bupati Definitif OKI periode Desember 2023 - Januari 2024.

RIWAYAT ORGANISASI

* Ketua DPC PKB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Toha Tohet TURUNKAN KEMISKINAN BANGUN SDM UNGGUL

Masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kini menanti jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Dimana pada kesempatan kali ini, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pengusaha, HM Toha Tohet bakal maju sebagai bakal calon Bupati Muba.

Toha, sapaan akrabnya akan berpasangan dengan salah satu tokoh agama daerah Muba yakni Kyai Rohman.

Tentu saja munculnya Paslon ini memberi harapan baru bagi masyarakat Bumi Serasan Sekate tersebut untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan.

Paslon Toha Tohet-Rohman yang diusung Koalisi Maju Bersama (KMB) di Pilkada Muba ini akan berhadapan dengan pasangan Lucyanti-Syafaruddin. KMB sendiri dipilih sebagai nama koalisi dimana terdapat 6 partai yang menjadi pengusung dan pendukung Toha-Rohman yaitu Nasdem, PKB, Demokrat, PSI, PBB, dan Garuda.

Dikenal sebagai Tokoh Masyarakat Muba, dalam bursa Pilkada serentak November 2024 mendatang, HM Toha menunjukkan komitmen seriusnya untuk berpartisipasi dalam arena kontestasi politik sebagai Bakal Calon Bupati Muba.

Toha Tohet juga dikenal sebagai pengusaha sukses di kabupaten Muba. Pria yang

lahir di Sungai Angit 2 Januari 1964 ini merupakan sarjana hukum jebolan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

Toha menjelaskan bahwa ia lahir dari keluarga yang sederhana di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat To-man, Kabupaten Muba. Pengalaman hidupnya yang berawal dari desa tertinggal hingga menjadi desa mandiri memberikan pemahaman mendalam tentang keluhan dan kebutuhan masyarakat.

"Saya lahir dari keluarga sederhana di Desa Sungai Angit. Dimana desa ini dulunya sempat menjadi desa tertinggal dan sekarang menjadi desa mandiri. Apabila ke depan menjadi bakal calon bupati Muba, Insya Allah akan ia jadikan desa percontohan," ujar Toha.

Saat ini, Toha memegang beberapa jabatan penting, di antaranya sebagai Direktur Utama PT Topsa Sejahtera Energi, Komisaris Utama PT Beringin Tosa Energi, Komisaris PT Tosa Energi, serta Ketua KUD Sareka Bersatu Jaya.

Pendidikan formal Toha Tohet dimulai di SDN Sungai Angit pada tahun 1972 hingga 1979. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP pada tahun 2003 dan di SMA Nasyiah pada tahun 2020.





Pada tahun 2024, ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

Selain berkarier di dunia bisnis, Toha Tohet juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia sering terlibat dalam kegiatan sosial dan melakukan aksi nyata untuk membantu masyarakat. Prinsip hidup yang dipegang teguhnya berasal dari pesan orang tuanya: "Jangan takut kepada siapapun, dan sebisa mungkin berbuat baiklah kepada diri sendiri, keluarga, dan orang banyak."

Toha menegaskan, dengan dirinya maju sebagai bakal calon Bupati Muba periode 2024-2029, ia memiliki moto dan visi yang jelas untuk pembangunan Kabupaten Muba yang lebih baik.

Fokus utamanya adalah pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Saya siap membangun Kabupaten Muba menjadi lebih baik lagi. Serta siap berupaya mengentaskan kemiskinan dan fokus membangun SDM yang baik," jelasnya.

Toha juga menyoroti beberapa

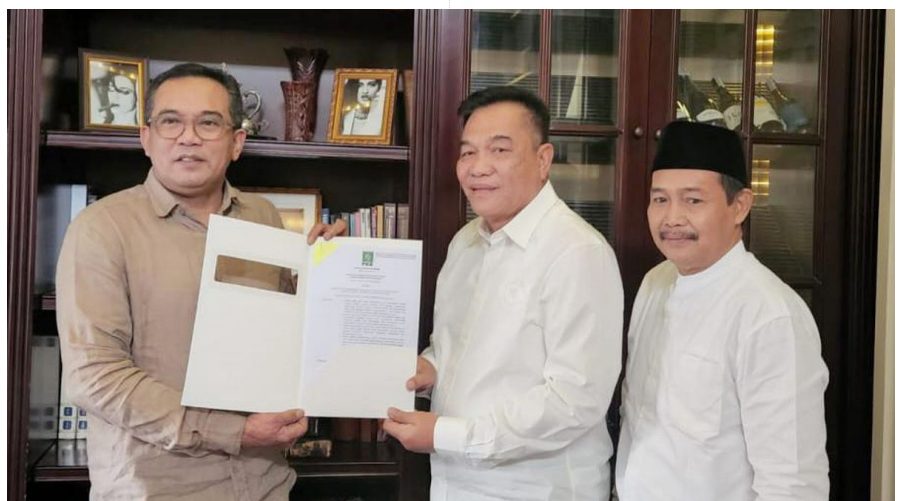
masalah penting yang diyakini sebagai persoalan mendasar dalam pembangunan Muba. Seperti tata kelola pemerintahan menduduki daftar teratas masalah yang akan dituntaskan pasangan ini.

"Hasil temuan BPK periode April 2024 menemukan banyak penyalahgunaan anggaran di daerah, banyak uang rakyat dikorupsi, inilah sumber utama penderitaan masyarakat, itulah mengapa Muba hingga hari ini lambat mengalami kemajuan," terangnya.

Selain itu, pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas Toha-Rohman. Belum lama ini Toha Tohet menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Muba.

"Ada 101.630 warga Muba masuk kategori miskin. Dan kita masih bertahan sebagai kabupaten termiskin ke 3 se-Sumatera Selatan, ini juga merupakan efek dari perilaku korupsi. Oleh karena itu pemerintah harus hadir menyelesaikan persoalan ini," lanjutnya.

Kemudian dalam rencana pemban-





gunan yang diusungnya, Toha menekankan pada beberapa aspek penting. Pertama, pengembangan infrastruktur desa dan kota untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang baik

antara daerah.

Hal ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kita orang Muba sudah sering disuguhi pemandangan jalan rusak, bahkan ada yang belum beraspal, tentu sangat merepotkan bila harus melalui jalan tersebut. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan," imbuhnya.

Kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Toha berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak di Muba mendapatkan pendidikan yang layak dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Ia berencana untuk membangun sekolah-sekolah dan pusat kesehatan baru, serta meningkatkan kualitas layanan di lembaga-lembaga yang sudah ada.

"Kita mesti mendorong dan memfasilitasi generasi muda di Muba melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Kesejahteraan guru khususnya yang masih honorer juga perlu mendapat perhatian serius. Kita juga akan memperhatikan pondok pesantren dengan membantu pengembangannya, karena santri adalah benteng



penjaga moral bangsa,” ucapnya.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Toha percaya bahwa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan memulai usaha sendiri, angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan.

“Seluruh masyarakat di Muba punya hak hidup layak dan sejahtera, tapi faktanya angka kemiskinan di Muba masih tinggi. Toha-Rohman



Saya siap membangun Kabupaten Muba menjadi lebih baik lagi.

berkomitmen mendorong dan memfasilitasi agar taraf hidup masyarakat bisa meningkat, bantuan modal usaha harus dipermudah, pemerintah wajib hadir membantu UMKM,” ungkapnya.

Namun, perjalanan Toha untuk menjadi Bupati Muba tentu tidak akan mudah. Ia akan menghadapi tantangan politik yang kompleks, termasuk persaingan dengan calon lain yang juga memiliki basis dukungan yang kuat.

Selain itu, ia juga harus bisa meyakinkan para pemilih bahwa program-program yang diusungnya dapat benar-benar membawa perubahan.

Meskipun demikian, Toha tetap op-



timis. Ia percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, dan dukungan dari berbagai pihak, ia dapat mewujudkan visinya untuk Muba. Ia berjanji akan terus bekerja keras dan berupaya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dan partai politik.

Dengan semangat yang tinggi dan dukungan yang kuat dari simpatisan, H M Toha Tohet siap untuk maju dalam Pilkada Muba 2024.

Komitmennya untuk membangun Kabupaten Muba yang lebih baik, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas SDM menjadi landasan utama dalam visinya.

Masyarakat Muba kini menanti langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Toha dalam mewujudkan visi tersebut, dan berharap bahwa ia dapat membawa perubahan yang positif dan signifikan bagi daerah mereka. •

BIODATA

Nama : H M Toha Tohet
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Angit, 2 Januari 1964
Asal : Musi Banyuasin

PENDIDIKAN

- * SDN Sungai Angit pada tahun 1972
- * SMP pada tahun 2003
- * SMA Nasyiah pada tahun 2020

- * Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda tahun 2024

KARIER

- Direktur Utama PT Topsa Sejahtera Energi
- Komisaris Utama PT Beringin Tosa Energi
- Komisaris PT Tosa Energi
- Ketua KUD Sareka Bersatu Jaya

Riezky Aprilia

ANDALAN PDI PERJUANGAN MENANGI PILGUB SUMSEL

PDI Perjuangan menurunkan kader perempuan terbaiknya Riezky Aprilia menjadi Bakal Calon Wakil Gubernur Sumsel di Pilgub 2024.

Perempuan kelahiran Palembang 18 April 1983 ini, menjadi pendamping Eddy Santana Putra (ESP) sebagai Bakal Calon Gubernur Sumsel diusung tunggal oleh PDI Perjuangan.

berlogo banteng ini, memulai karirnya sebagai Financial Konsultan Astra CMG Life di Bandung pada tahun 2002 sampai 2003.

Pernah menjadi jurnalis sebagai staf Ardan Radio Main Works di Band-

ung tahun 2003 sampai 2004. Selanjutnya dia meranah ke dunia bisnis menjadi Owner Willa Ravi Housing Bandung, Owner Fabi Housing Bandung, Owner Kamo Housing Jakarta dan Owner Green Hill Mua Thai Sport Camp Jakarta.

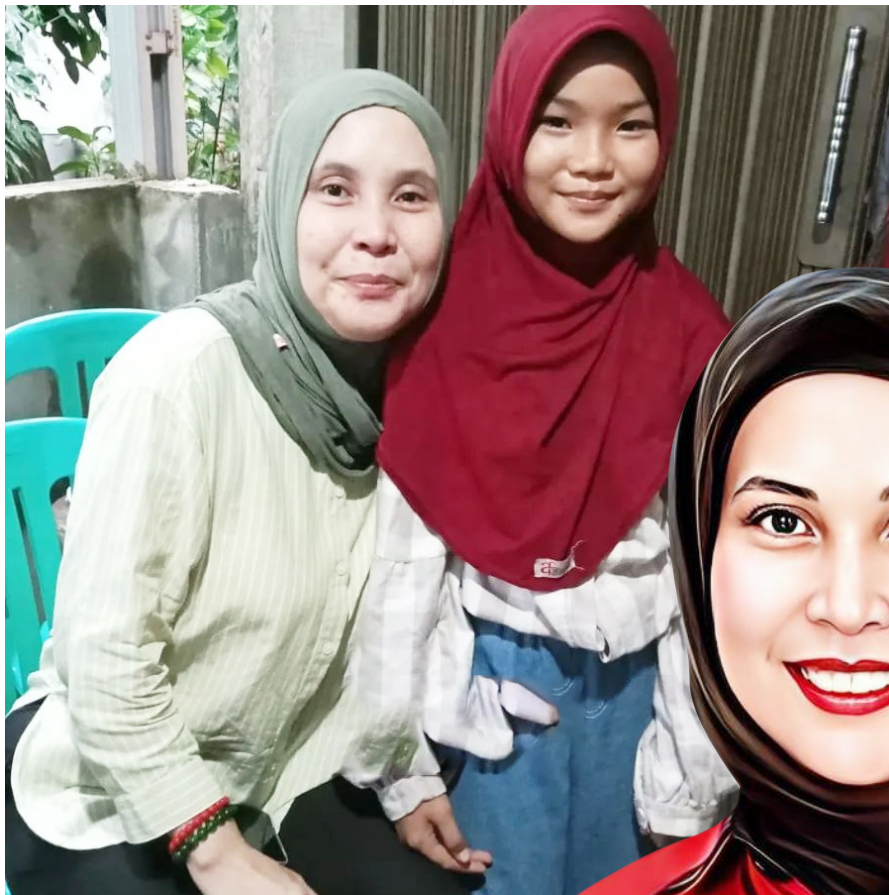
Karir politik Riezky Aprilia dimulainya saat mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024.

Dia mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan I, yang meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Saa itu juga Riezky mencampurkan diri di dunia politik dan menjadi kader PDI Perjuangan dan duduk di Komisi IV DPR RI.

Dia pun akhirnya dipercaya oleh Moncong Putih untuk menjadi kader yang maju di panggung mega pertarungan Pilgub Sumsel melawan kontestan lainnya.

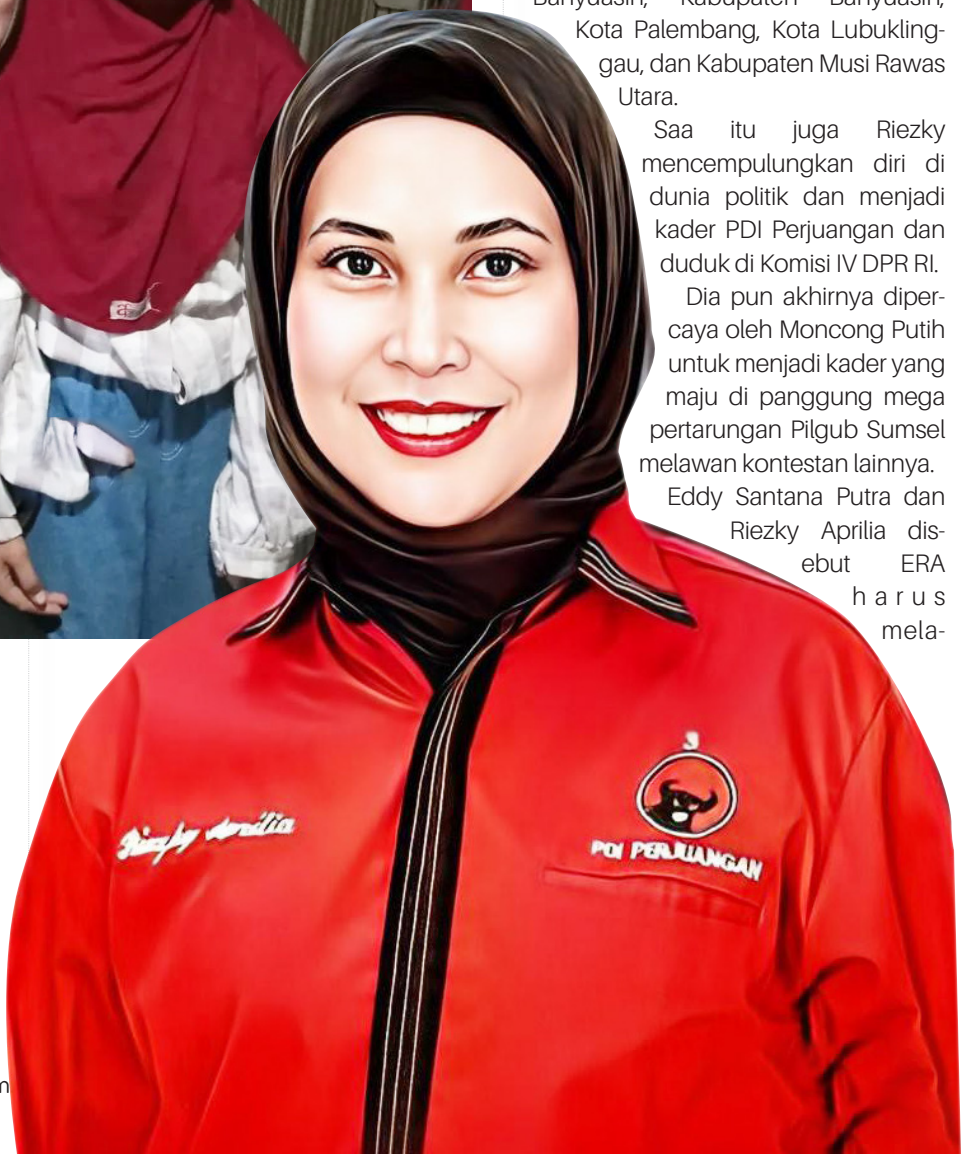
Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia disebut ERA harus mela-



Moncong putih memanfaatkan Putusan MK sehingga bisa mengusung calonnya sendiri sempat membuat panggung politik di Pilgub Sumsel 2024 heboh.

Namun disisi lain publik Sumsel happy karena calon pilihan lain di luar calon petahana mantan Gubernur Sumsel Herman Deru dan mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya.

Menariknya, sosok Riezky Aprilia selaku politisi perempuan andalan partai



wan pasangan Herman Deru - Cik Ujang julukan HDCU dan pasangan Mawardi Yahya - Anita Noeringhati dikenal dengan MATAHATI bertarung di Pilgub Sumsel 2024.



Karir politik Riezky Aprilia dimulainya saat mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024.

Sementara itu dari sisi pendidikan Riezky Aprilia bersekolah di Palembang sejak SD di Kartika 2 tahun 1987-1993 dan SMP Xaverius Maria tahun 1993-1996.

Kemudian dia melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Hukum Bandung tahun 2004-2008 dan S2 di Universitas Padjadjaran tahun 2009-2011 di Jawa Barat.

PDI Perjuangan bukan organisasi pertama yang diikutinya Riezky Aprilia,



dia menjadi anggota Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Jawa Barat tahun 2007-2010. Selanjutnya menjabat sebagai

Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Barat tahun 2007-2010 dan Wakil Ketua BMI Sumatera Selatan tahun 2017-2022. Wajar saja dia tertarik ke dunia politik karena rentetan pengalamannya organisasinya tersebut. •

BIODATA

Nama : Riezky Aprilia
Tempat Tanggal Lahir : Palembang 18 April 1982
Suami : Giovanni Battista Monsafor
Anak : Empat

PENDIDIKAN

- * SD Kartika 2 Palembang (1987-1993)
- * SMP Xaverius Maria Palembang (1993-1996)
- * SMA Negeri 2 Palembang (1996-1999)
- * S-1 Sekolah Tinggi Hukum Bandung (2004-2008)
- * S-2 Universitas Padjadjaran (2009-2011)

ORGANISASI

- * Anggota Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Jawa Barat (2007-2010)

- * Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Barat (2007-2010)
- * Wakil Ketua BMI Sumatera Selatan (2017-2022)

KARIER

- * Financial Konsultan Astra CMG Life Bandung (2002-2003)
- * Staf Ardan Radio Main Works Bandung (2003-2004)
- * Owner Villa Ravi Housing Bandung (2004-sekarang)
- * Commissioner PT Telaga Indonas Gas (2007-sekarang)
- * Owner Fabi Housing Bandung (2007-sekarang)
- * Owner Kamo Housing Jakarta (2009-sekarang)
- * Owner Green Hill Muay Thai Sport Camp, Jakarta Selatan (2014-sekarang)
- * Anggota DPR-RI (2019-2024)

Lidyawati GANTIKAN PERJUANGAN MEMBANGUN LAHAT

Berawal dari dorongan masyarakat Lahat untuk meneruskan kepemimpinan dan pembangunan yang sudah dilakukan suaminya Cik Ujang ketika menjabat Bupati Lahat periode 2018-2023, Lidyawati akhirnya mantapkan diri maju sebagai calon Bupati Lahat di Pilkada Lahat, 27 November 2024 mendatang.

Untuk warga Kabupaten Lahat sendiri, Lidyawati bukan sosok baru yang dikenal masyarakat.

masa kepemimpinan suaminya dilanjutkan, karena dirasa sangat bermanfaat untuk masyarakat, baik dari program infrastruktur, pertanian, perke-

ejahteraan, buat Lidyawati memutuskan maju sebagai kandidat pemimpin Kabupaten Lahat menggantikan suaminya.

Lidyawati mengenyam pendidikan di SDN 15 Muara Enim tamat tahun 1991 dan melanjutkan SMPN 1 Muara Enim tamat tahun 1994. Lalu, lidyawati menyelesaikan SMAN 1 Muara Enim tamat tahun 1997 hingga melanjutkan S1 Universitas Bengkulu tamat tahun 2002 dan S2 STIE Lahat tamat tahun 2022.

Karena Cik Ujang, meneruskan perjuangan sebagai calon Wakil Gubernur Sumsel, mendampingi Herman Seru sebagai calon Gubernur Sumsel.

Sejumlah pengorbanan dilakukan ibu tiga anak yakni Khansa Uly Anggaraini, M Ghatan Raka Altsagiif dan Aurel Bara Ghania untuk mewujudkan apa yang jadi keinginan masyarakat.

Lidyawati bahkan rela mengorbankan status Aparatus Sipil Negara (ASN) dengan pangkat eselon II, agar bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan suaminya selama menjabat Bupati Lahat bersama wakilnya, Haryanto SE MM MBa.

"Saya maju sebagai calon Bupati Lahat karena dorongan



Selama mendampingi suaminya dan menjabat sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Lahat, wanita kelahiran Palembang 12 Juli 1978 ini sudah banyak berbuat untuk masyarakat.

Terutama untuk kaum ibu dan anak-anak. Baik dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.

Dorongan masyarakat yang ingin

bunan, pendidikan, kesehatan hingga program peningkatan kes-





masyarakat. Masyarakat masih ingin program yang dilakukan oleh Cik Ujang, agar bisa diteruskan. Jika orang lain, belum tentu kembali dilanjutkan. Jika nantinya saya terpilih jadi Bupati Lahat dan Cik Ujang terpilih sebagai Wakil Gubernur Sumsel, tentunya akan lebih banyak yang bisa kami berikan ke masyarakat Kabupaten Lahat,” ujar Lidyawati.

Pernah di posisi eselon II Pemkab Lahat dan mendampingi suami memimpin Kabupaten Lahat, jadi modal Lidyawati optimis mampu memimpin Kabupaten Lahat lima tahun mendatang.

Apalagi wakilnya, Haryanto, juga merupakan ASN yang menguasai keuangan dan tata pemerintahan, mantan Kepala BPKAD dan Sekda Lahat, sekaligus pernah mendampingi suaminya sebagai Wakil Bupati Lahat.

“Bukti kerja nyata, sudah kami berdua lakukan untuk masyarakat. Saya dan Haryanto sangat mengetahui betul apa yang jadi permasalahan dan apa yang

diinginkan masyarakat Kabupaten Lahat. Karena itu, jika terpilih, program yang dijanjikan, dipastikan akan kami wujudkan,” sampai Lidyawati. •



BIODATA

Nama : Hj Lidyawati SHut MM
Tempat Tanggal Lahir : Palembang 12 Juli 1978
Suami : Cik Ujang SH
Agama : Islam
Alamat : Blok C, Kelurahan Bandar Jaya, Kota Lahat
Anak : 1. Khansa Uly Anggaraini
2. M Ghatan Raka Altsagiif
3. Aurel Bara Ghania

PENDIDIKAN

Formal

- * SDN 15 Muara Enim tamat tahun 1991
- * SMPN 1 Muara Enim tamat tahun 1994

- * SMAN 1 Muara Enim tamat tahun 1997
- * S1 Universitas Bengkulu tamat tahun 2002
- * S2 STIE Lahat tamat tahun 2022

Non Formal

Global Internasional Sistem tahun 2005-2009
Diklat Barang dan Jasa tahun 2007

ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 1997
Ketua TP PKK Kabupaten Lahat 2018-2023
Pengurus NU Lahat tahun 2018 sampai sekarang

PEKERJAAN

Aparatus Sipil Negara (ASN) tahun 2005-2024

Eddy Santana Putra SIAP BERI KEJUTAN MAJU TANPA DUKUNGAN GERINDRA

Politikus kondang Palembang Eddy Santana Putra atau ESP membuat publik terkejut. Pasalnya tidak disangkakan maju sebagai kontestan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024.

Uniknya lagi mantan Wali Kota Palembang dua periode tahun 2003-2008 dan tahun 2008-2013 adalah kader partai Gerindra. Namun ESP bisa tetap maju tanpa dukungan Gerindra.

Pria kelahiran Pangkal Pinang, 20 Januari 1957 ini, maju bukan diusung Gerindra melainkan PDI Perjuangan setelah munculnya Putusan MK.

ESP menempuh pendidikan di SD YKKP (Pusri) Palembang (1964-1969), lalu lanjut di SMP YSPP (Pusri) Palembang (1970-1972) dan SMA Xaverius 1 Palembang (1973-1975).

ESP merupakan lulusan Sarjana Teknik Sipil Universitas Sriwijaya Palembang (1976-1984), Pasca Sarjana Teknis Pengairan Jurusan Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai di Bandung (1990-1991) dan Pasca Sarjana Teknik Sipil Universitas Sriwijaya Jurusan Manajemen Sumber Daya Air di Palembang (2001-2004).

Moncong putih memberikan rekomendasi Eddy Santana Putra sebagai Calon Gubernur Sumsel bersama kad-

ernya Riezky Aprilia menjadi Calon Wakil Gubernur pada hari Selasa 27 Agustus 2024.

Setelah mendapatkan rekomendasi Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia menyebut diri mereka ERA besoknya tancap gas mendaftar KPU Sumsel Rabu 28 Agustus 2024.

Sontak itu menghebohkan panggung politik di Pilgub Sumsel 2024, karena diprediksikan hanya ada dua kontestan nantinya. Lantaran satu kontestan pasangan Heri Amalindo-Popo Ali (HAPAL) mundur.

Alhasil tersisa kontestan dipastikan mendaftar hanya pasangan Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) dan Mawardi Yahya-Anita Noeringhati (MATAHATI). Namun muncul ESP

buat jumlah kontestan menjadi tiga pasangan.

Padahal publik mengetahui Eddy Santana Putra adalah anggota DPR RI Komisi V dari fraksi Gerindra dapil Sumatera Selatan I terpilih masa jabatan periode 2019-2024. Terlebih lagi publik kaget sebab DPP Gerindra mengusung pasangan Mawardi-Anita Noeringhati (MATAHATI) di Pilgub Sumsel 2024.

ESP mengaku dirinya datang ke KPU dengan dukungan tunggal dari PDI Perjuangan akibat perubahan demokrasi yang luar biasa. Dengan adanya support dari PDI Perjuangan mereka pun berjanji akan bekerja sekuat tenaga untuk mensejahterakan Rakyat Sumsel.

"Kami (ERA) ingin membuat Sumsel lebih maju lebih cerah, cerdas dan sehat," kata dia usai mendaftarkan di KPU Sumsel, Rabu 28 Agustus 2024.

Dilanjutkannya,



ekonomi masyarakat Sumsel menjadi prioritas ERA jika nantinya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2025-2030.

"Tentu akan menjadi prioritas dalam kerja kami jika terpilih nanti sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel. Untuk mewujudkan Sumsel yang lebih baik ini era baru, harapan baru dan Pemimpin baru," jelasnya.

Bahkan Eddy menegaskan ERA dapat memenangkan pertarungan Pilgub 2024, meski hanya didukung partai besutan Megawati Soekarno Putri.

Eddy sendiri merupakan kader Partai Gerindra sedangkan Rizky Aprilia adalah kader PDIP.

"Kami optimis di Pilgub 2024 ERA yang keluar sebagai pemenang," kata dia.

Terkait statusnya sebagai Anggota DPRD RI, Eddy menjelaskan jika dirinya akan mengajukan mundur dari Anggota DPRD RI.

"Saya akan mengajukan mundur dari anggota dewan," kata dia

Sementara itu, ESP sendiri lahir di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ketika itu ayahanda sedang bertugas di sana. Ayahanda H. Animan Achyat (Alm) adalah seorang TNI dengan pangkat terakhir Kolonel Infanteri, pelaku sejarah dan ikut memimpin pasukan (Batalyon 30 Resimen 17) dalam rangka perang 5 (lima) hari 5 (lima) malam di Kota Palembang yang terjadi pada 1 Januari sampai 5 Januari 1947.

Ibunda, Hj. Chalidjah Animan (Alm) adalah Ibu Rumah Tangga biasa yang menyukai pekerjaan rumah tangga, menjaga dan merawat keluarga dan putra-putrinya sebagaimana layaknya ibu-ibu rumah tangga pada umumnya.

ESP menjadi Walikota Palembang termuda melalui mekanisme pemilihan DPRD Palembang pada tahun 2003. Kemudian terpilih kembali melalui mekanisme langsung pada tahun 2008.

Pada masa kepemimpinan ESP di Palembang mengalami banyak sekali kemajuan dan perubahan. Semua sektor dari pariwisata, transportasi, kesehatan, pendidikan sampai ke pengelolaan air minum.

Mengubah dan menertibkan kawasan kumuh di sekitar Jembatan Ampera menjadi kawasan yang bersih. Menjadi-

kan kawasan tersebut menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dan masyarakat lokal yang ingin menghabiskan waktu menikmati Sungai Musi.

Memiliki kedekatan dengan ormas dan organisasi pemuda di Palembang. Dengan kedekatan tersebut bisa menertibkan pasar 16 liris di pinggiran Jembatan Ampera.

ESP merupakan tokoh dan sosok di balik reklamasi kawasan Jakabaring, Palembang yang saat itu dia masih ter-

Selatan (1989-1992). Pimpro O dan P Jaringan Irigasi Kotamadya Palembang Dinas PU Sumsel (1992-1993). Pimpro Pengembangan Rawas (Reklamasi) Kotamadya Palembang Sub Dinas PU Pengairan Sumsel (1993-1998).

Pimpro Peningkatan/Pengembangan Situs Kerajaan Sriwijaya, Sub Dinas PU Pengairan Dati I Sumsel (1994-1998). Kasubdin Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan Dinas PU Pengairan Dati I Sumsel (1997-1998).



catat sebagai pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan.

Tidak hanya itu, ESP juga pernah menjabat sebagai Kasubsi Pembangunan Irigasi dan Pengairan Cabang Dinas PU Kabupaten Musi Rawas (1986-1988).

ESP juga pernah menjadi Staf Sub Dinas Pengairan Dinas PU Sumatera

Kepala Dinas PU Kotamadya Palembang (1998-2001), Kepala Dinas Kimpraswil Kotamadya Palembang (2001-2002). Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang (2002-2003) hingga Wali Kota Palembang (2003-2008) dan Wali Kota Palembang (2008-2013) serta Anggota DPR RI Komisi V (2019-2024).

• INFO PROFIL

Disisi lain ada yang menarik lagi dari ESP juga menjabat sebagai Panglima Perang Tim Pemenangan Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina (Fitri-Nandri) diusung koalisi NasDem, PAN dan PKB di Pilwalkot Palembang 2024.

Padahal pasangan Duo Srikandi itu tidak diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra yang kompak mengusung pasangan Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS). Dari sini terlihat ESP menjalankan apapun yang dinilai atau diputuskan itu benar tanpa mudah teringkat dengan hal apapun.

Hal itu terlihat jelas saat ESP menyebutkan tidak akan mundur dan tetap komitmen menjabat sebagai Panglima Perang Tim Pemenangan Fitri-Nandri

"Saya terima kasih sudah diangkat waktu itu, saya sudah menyatakan siap! Tahu-tahu jadi Calon Gubernur Sum-

perempuan dan Gen Z Palembang ikut mengawal kemenangan kita nanti," ucapnya.

Dia mengakui konsep BLACKPINK yang telah dibuat sangat menarik. Targetkan tim pemenangan untuk menggaet kaum perempuan dan Gen Z di Palembang. "Apa lagi konsep kita BLACKPINK luar biasa biar perlu kita buat nanti lagunya," tuturnya.

Menurut mantan Wali Kota Palembang periode 2003-2008 dan 2008-2013 ini, sangat tahu bagaimana mengurus kota Palembang. Dia bercerita dulu kota Palembang adalah kota kumu dan memiliki tingkat kriminalitas tertinggi benar-benar rawan penodongan.

"Dulu di Palembang apabila sudah jam 6 tutup (kondisi kota Palembang sepi tidak ada lagi yang keluar malam), masuk rumah nonton TV! Tidak ada lagi

akhirnya Palembang jadi seperti sekarang. Semua ilmu-ilmu akan saya berikan kepada Fitri dan Nandri karena bukan hanya sekarang 5 tahun kedepan tetap siap mengawal duo Srikandi kita ini," pungkasnya.

Dinilai Tidak Taat Intruksi Terancam Dipecat Gerindra, ESP: Mohon Izin Restui Saya Maju

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan ESP tak mematuhi perintah partai dengan maju sebagai bakal calon Gubernur Sumsel.

ESP diketahui telah mendaftar sebagai calon Gubernur Sumsel di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel. Dia berpasangan dengan Riezky Aprilia yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel, Kartika Sandra Desi mengatakan, seluruh kader partai harus taat dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra.

"Kalau di Partai Gerindra seluruh kader harus taat pada keputusan DPP, dengan keputusan Pak Eddy Santana mencalonkan diri melalui partai lain, artinya sudah tidak taat dengan perintah partai," katanya

Partai Gerindra sendiri telah mengusung Mawardi Yahya dan Anita Noer-inghati (MATAHATI) sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel pada Pilkada Serentak 2024 yang digelar 27 November mendatang.

MATAHATI telah melakukan pendaftaran sebagai Cagub dan Cawagub Sumsel periode 2024-2029 di Kantor KPU Sumsel.

"Mungkin Pak Eddy Santana sudah memilih untuk tidak menjadikan Partai Gerindra. Kami menghargai semua itu," ucap Kartika Sandra Desi.

Masih dikatakan Kartika, tentunya bakal ada sanksi bagi kader Partai Gerindra yang melanggar bahkan membelot dari keputusan pusat.

"Kalaupun mau disanksi, pasti artinya dikeluarkan dari anggota Partai Gerindra. Beliau juga tidak lagi DPR RI, sudah habis. Artinya, tidak akan bersama Partai Gerindra, masih banyak kader Partai Gerindra yang luar biasa," pungkasnya.

ESP mengatakan, memohon izin kepada partai Gerindra memberikannya



sel, tetapi saya tetap komit kita tetap blusukan sama-sama," kata ESP saat memberikan sambutan di deklarasi Fitri-Nandri di Posko Rumah Pemenangan Jalan POM IX, Palembang, Rabu, 28 Agustus 2024.

Sekali lagi ESP menegaskan secara pribadi akan tetap konsisten dan konsentrasi sebagai Panglima Perang Fitri-Nandri di Pilwalkot Palembang 2024. Dilanjutkannya, terpenting baginya pasangan duo Srikandi harus disukai dulu oleh semua masyarakat Palembang.

"Elektabilitas dan popularitas Fitri dan Nandri sudah bagus di Palembang. Tetapi elektabilitas tidak terlalu penting kalau tidak disukai. Saya minta kaum

yang keluar rumah. Karena ketakutan banyak preman rawan penodongan. Namun saat aku menjabat Palembang jadi tuan rumah PON tahun 2004. Kita bahwa menjadi kota yang diperhitungkan dengan beragam penghargaan bukan se Sumsel tetapi se Indonesia nomor 1 pelayanan publik, air bersih dan lainnya," ungkapny.

Dia mengaku kunci keberhasilan ESP bukan karena dirinya mengaku pintar atau hebat. Dia menyebutkan terpenting mau bekerja keras untuk Palembang dan memiliki hati yang bersih.

"Saya kerja keras semua jalan terang tidak ada lagi yang gelap. Kota dibersihkan dari semua sampah dan preman

restu untuk maju sebagai Bakal Calon Gubernur Sumsel 2024 diusung oleh partai PDI Perjuangan.

"Saya mohon izin kepada petinggi-petinggi partai Gerindra restui saya. Karena saya akan maju di pesta rakyat gembira dan tidak saling menjatuhkan. Saya siap bertarung tidak akan mundur dan biarkan rakyat memilih,"kata ESP.

Dia juga memberikan klarifikasi komentar Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel, Kartika Sandra Desi menyebutkan dirinya tidak taat aturan partai dan perintah partai.

"Ada pernyataan Ketua DPD Gerindra saya tidak taat aturan partai dan perintah partai! Saya nyatakan yang mana, selama ini Ketua DPD tidak pernah memanggil saya dan komunikasi dengan saya untuk urusan pencalonan Gubernur. Apa kekurangan ketokohan saya, harusnya wajar saya kader lebih senior dari yang dicalonkan 5 tahun saya di Gerindra. Semua saya lakukan perintah fraksi saya lakukan silahkan cek absen saya rapat Paripurna dan Fraksi saya selalu datang. Jadi tidak taatnya dimana,"kata ESP.

ESP menyebutkan PDI Perjuangan memberikan kesempatannya untuk maju salahnya dimana. ESP berkata semua masyarakat memanggilnya dan merasa lebih mampu mengurus Sumsel kedepannya.

"Saya berjuang saat Pilpres Prabowo menang dan saya juga cinta Prabowo. Saya merasa lebih mampu dengan pengalaman saya latar belakang pendidikan

saya. Mohon izinkan saya dan restui saya membuat Pilkada Indah tidak usah saling menyalahkan,"pungkasnya.

Dukung ESP! PDI Perjuangan Dik-eroyok di Panggung Pilgub Sumsel 2024

Moncong Putih julukan partai berlogo Banteng yaitu PDI Perjuangan nantinya akan dikeroyok oleh koalisi-koalisi lain di panggung politik dalam pertarungan

man Deru - Cik Ujang (HDCU) didukung oleh 4 koalisi partai terdiri dari NasDem, Demokrat, PKS dan Perindo. Kemudian pasangan Mawardi Yahya - Anita Noer-inghati (MATAHATI) didukung 9 koalisi partai diantaranya PKB, Gerindra, Golkar, Gelora, Garuda, PKN, Hanura, PAN dan PPP.

Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel) Haekal Hafafah mengatakan, Pilgub Sumsel menjadi tantangan berat



Pilgub Sumsel 2024.

Pasalnya hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai yang sendirian berani mengusung pasangan Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia (ERA) maju ke gelanggang pertempuran menantang semua kontestan lainnya pada bulan November mendatang.

Dua kontestan yang ditantang PDI Perjuangan itu yakni pasangan Her-

untuk PDI Perjuangan. Moncong Putih harus melawan banyak partai lainnya yang berkoalisi di dua kontestan di Pilgub Sumsel 2024.

"PDI Perjuangan mau memperlihatkan eksistensinya bahwa dia adalah partai besar yang mampu menjalankannya walaupun dalam kondisi tersebut. Namun tetap ini menjadi tantangan berat untuk PDI Perjuangan," ucapnya. ●

BIODATA

Nama : Eddy Santana Putra
TTL : Pangkal Pinang, 20 Januari 1957

PENDIDIKAN

- SD YKKP (Pusri) Palembang (1964-1969)
- SMP YSPP (Pusri) Palembang (1970-1972)
- SMA Xaverius 1 Palembang (1973-1975)
- Sarjana Teknik Sipil Universitas Sriwijaya Palembang (1976-1984)
- Pasca Sarjana Teknis Pengairan Jurusan Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai di Bandung (1990-1991)
- Pasca Sarjana Teknik Sipil Universitas Sriwijaya Jurusan Manajemen Sumber Daya Air di Palembang (2001-2004)

KARIER

- Kasubsi Pembangunan Irigasi dan Pengairan Cabang Dinas PU Kabupaten Musi Rawas (1986-1988)

- Staf Sub Dinas Pengairan Dinas PU Sumatera Selatan (1989-1992)
- Pimpro O dan P Jaringan Irigasi Kotamadya Palembang Dinas PU Sumsel (1992-1993)
- Pimpro Pengembangan Rawas (Reklamasi) Kotamadya Palembang Sub Dinas PU Pengairan Sumsel (1993-1998)
- Pimpro Peningkatan/Pengembangan Situs Kerajaan Sriwijaya, Sub Dinas PU Pengairan Dati I Sumsel (1994-1998)
- Kasubdin Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan Dinas PU Pengairan Dati I Sumsel (1997-1998)
- Kepala Dinas PU Kotamadya Palembang (1998-2001)
- Kepala Dinas Kimpraswil Kotamadya Palembang (2001-2002)
- Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang (2002-2003)
- Wali Kota Palembang (2003-2008)
- Wali Kota Palembang (2008-2013)
- Anggota DPR RI Komisi V (2019-2024)

Suryani Ngesti Rahayu Ridho Yahya **LULUSAN PERTANIAN SIAP MAJUKAN PRABUMULIH**

Sosok Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu yang merupakan calon Wali Kota Prabumulih dan telah resmi mendaftar di KPU Kota Prabumulih berpasangan dengan calon wakil walikota H Mat Amin SAg.

pernah menjadi Kasi Pengawasan & Pengujian Mutu Benih tahun 2002, Fungsional pengawasan benih tanaman tahun 2007 dan staf Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemkot Prabumulih tahun 2014.

Hj Ngesti yang diwawancarai beberapa waktu lalu mengungkapkan dirinya awal masuk kota Prabumulih sudah intens berkomunikasi dengan

para petani dan peduli dengan pertanian di Prabumulih.

Ia memulai karir dari bawah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Prabumulih.

Seiring waktu, Ngesti kemudian menjadi staf ahli wali kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM sejak tahun 2015 hingga pensiun dini.

Delapan bersaudara pasangan H Soekarmin Hadi Sasmito dan Soewarni ini memiliki riwayat organisasi pernah menjadi wakil ketua PKK Prabumulih tahun 2008-2013, Ketua PKK Prabumulih tahun 2013-2018, ketua Dekranasda Prabumulih tahun 2013-2018.

Tidak hanya itu, ibu yang memiliki hobi membaca itu juga pernah jadi ketua P2TP2A tahun 2014,

Ketua PMI Prabumulih dari tahun 2015-2020 dan dari tahun 2020-2025, Ketua PKK Prabumulih tahun 2018-2023, Ketua ICMI Prabumulih tahun 2021-2026 dan Ketua Dekranasda Prabumulih tahun 2018-2023.

Sementara penghargaan pernah diraih mulai dari Satya Lencana Karya



Hj Suryanti Ngesti Rahayu merupakan istri dari mantan Wali Kota Prabumulih dua periode yakni Ir H Ridho Yahya MM. Wanita yang akrab disapa Ngesti Ridho Yahya ini merupakan kelahiran Palembang pada 21 Juli 1967.

Ngesti Ridho memiliki tiga orang anak, dua diantaranya adalah dokter dan seorang anak laki-lakinya masih kuliah di negara Belanda.

Hj Ngesti mengenyam pendidikan di sekolah di SD Negeri 48 kota Palembang, SMP Negeri 9 kota Palembang dan SMA Negeri 6 kota Palembang serta pendidikan Strata 1 di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang.

Sedangkan Hj Ngesti Rahayu Ridho



Satya XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia yang diperoleh pada 5 Agustus 2016, penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Menteri Koperasi dan UKM serta penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN.

Terjunnya Ngesti Rahayu ke panggung politik lantaran banyak pihak menginginkan dirinya yang telah memiliki pengalaman dibidang pemerintahan dan turut mendampingi suami selama menjabat dinilai

akan mampu melanjutkan program-program yang telah ada bahkan makin baik lagi di kota nenas.

Tidak hanya itu, Ngesti Ridho Yahya juga didalam keluarga dinilai telah berhasil mendidik anak hingga menjadi orang hebat, dimana dua anak menjadi dokter dan satu sedang menempuh kuliah di Belanda.

Anak mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan itu

dinilai banyak pihak dapat memimpin kota Prabumulih lebih baik kedepannya. Terlebih berbekal pengetahuan, pengalaman bersama sang suami serta tau kondisi masyarakat bawah

dipastikan akan membuat dirinya akan terus berusaha membuat masyarakat sejahtera dan kota Prabumulih makin Prima Berkualitas serta makin maju dari segala sektor. ●



BIODATA

Nama : Hj Suryanti Ngesti Rahayu
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 21 Juli 1967
Suami : Ir H Ridho Yahya MM
Agama : Islam
Anak : 3

PENDIDIKAN

- SD Negeri 48 kota Palembang
- SMP Negeri 9 kota Palembang
- SMA Negeri 6 kota Palembang
- Strata 1 di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang

KARIER

- Kasi Pengawasan & Pengujian Mutu Benih tahun 2002
- Funsional pengawasan benih tanaman tahun 2007 dan staf Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pemkot Prabumulih tahun 2014
- Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Prabumulih

- Staf ahli wali kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM sejak tahun 2015 hingga pensiun dini
- Wakil ketua PKK Prabumulih tahun 2008-2013
- Ketua PKK Prabumulih tahun 2013-2018
- Ketua Dekranasda Prabumulih tahun 2013-2018
- Ketua P2TP2A tahun 2014
- Ketua PMI Prabumulih dari tahun 2015-2020 dan dari tahun 2020-2025
- Ketua PKK Prabumulih tahun 2018-2023
- Ketua ICMI Prabumulih tahun 2021-2026
- Ketua Dekranasda Prabumulih tahun 2018-2023

PENGHARGAAN

- Satya Lencana Karya Satya XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia yang diperoleh pada 5 Agustus 2016
- Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Menteri Koperasi dan UKM
- Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN



RUDI-SENO UNGGULI ISRAN-HADI BEREBUT SUARA GEN Z DAN MILENIAL

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2024 menjadi pertarungan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi melawan Rudy Mas'ud-Seno Aji.

Pertarungan di Pilgub Kaltim menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang strategis di Indonesia tahun ini. Pasalnya, wilayah provinsi itu bakal menjadi sentral pemerintahan Indonesia ketika ibu kota negara resmi pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Penajam Paser Utara (PPU).

Lembaga survei Panel Survei Indonesia (PSI) mengungkapkan, berdasarkan hasil survei dari kekuatan elektoral, Rudy-Seno diprediksi akan menang telak dari Isran-Hadi apabila pemilihan dilakukan saat ini.

Direktur Eksekutif PSI, Mahendra Zaini, menjelaskan, hasil survei dengan pertanyaan terbuka menunjukkan masyarakat yang memberikan pilihan secara Top of Mind pada pasangan Rudy-Seno sebanyak 51,6 persen. Kemudian sebanyak 30,1 persen

memberikan pada pasangan petahana Isran-Hadi dan yang tidak memberikan pilihan sebanyak 18,3 persen.

Mahendra menambahkan, pada survei tatap muka dengan pertanyaan tertutup menggunakan kertas kuisioner, Rudy-Seno menempati posisi teratas dengan perolehan suara 60,3 persen, Isran-Hadi memperoleh 32,4 persen suara, dan yang tidak memberikan suara 7,3 persen.

Lalu, dalam survei popularitas, Isran Noor-Hadi Mulyadi meraih 78,8 persen dan Rudy-Seno 74,3 persen. Namun, walaupun pasangan petahana populer, namun tidak otomatis disukai responden.

"Hasilnya, pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji disukai dan diterima oleh 72,6 persen responden. Sedangkan, pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi disukai dan diterima oleh 63,7 persen responden," kata Mahendra melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 September 2024.

Survei juga dilakukan terkait dengan persepsi Masyarakat Kalimantan Timur tentang kinerja Isran-Hadi

sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 59,7 persen menyatakan tidak puas pada kinerja kepemimpinan Isran-Hadi, 32,2 persen menyatakan puas, serta 8,1 persen tidak memberikan penilaian.

"Di sisi lain, hasil survei menunjukkan 70,1 persen masyarakat Kaltim akan datang ke TPS untuk menentukan pilihan saat Pilkada. Sedangkan, sisanya 29,9 persen belum menentukan untuk menyalurkan hak pilih di TPS," kata Mahendra.

Sementara itu, hasil riset awal Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM) menyebut, peta politik di Kaltim menunjukkan dua generasi kunci, yaitu milenial dan Gen Z, akan menjadi faktor penentu dalam hasil pemungutan suara pada Pilkada 2024.

Pemilih dari generasi Z dan milenial mencapai sekitar 61 persen dari total pemilih di Kaltim, menjadikan mereka bukan sekadar penentu, tetapi game changer dalam Pilgub Kaltim kali ini.

Direktur Eksekutif LPMM, Alamsyah Wijaya, mengatakan, hasil survei mengungkapkan temuan penting, yakni pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji men-



dominasi perolehan suara di kalangan Gen Z dan Milenial.

Sebanyak 60,4 persen Gen Z memilih Rudy-Seno. Sedangkan, dari kalangan milenial bahkan mencapai 62,7 persen. Sebagai perbandingan, Isran-Hadi hanya mendapatkan 30,1 persen dari Gen Z dan 29,6 persen dari milenial.

"Sebuah selisih yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik Rudy Mas'ud-Seno Aji di mata generasi muda," ujar Alamsyah.

Menurut Alamsyah, Rudy-Seno mendapatkan dukungan mayoritas dari kedua generasi tersebut berkat visi yang dianggap inovatif dan relevan. Pengalaman Rudy sebagai pengusaha sukses dan politikus muda dari kalangan milenial serta Seno Aji yang merupakan figur berpengalaman dari generasi X, menjadikan pasangan ini



Hasilnya, pasangan Rudi Mas'ud-Seno Aji disukai dan diterima oleh 72,6 persen responden. Sedangkan, pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi disukai dan diterima oleh 63,7 persen responden.

dipandang mampu membawa perubahan besar. Terutama dalam sektor industri kreatif, pengembangan UMKM, serta bisnis startup—faktor-faktor yang sangat resonan dengan kebutuhan generasi muda yang dinamis.

"Generasi muda, terutama Gen Z, memiliki ketertarikan kuat terhadap program-program inovatif yang menasar sektor kreatif dan UMKM. Pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji berhasil secara strategis memanfaatkan aspirasi ini, hingga berhasil menarik dukungan besar," ungkap Alamsyah.

Dalam temuan lain, survei mengungkapkan sebanyak 88,7 persen Gen Z, yang didominasi oleh pemilih pemula me-

iliki harapan yang sangat tinggi terhadap calon pemimpin Kaltim. Mereka menginginkan pemimpin yang netral, pro-rakyat, dan mampu menciptakan terobosan baru yang berdampak langsung bagi generasi muda.

Hasil survei juga menunjukkan generasi milenial yang cenderung lebih pragmatis dan skeptis tetap memberikan dukungan besar pada Rudy Mas'ud-Seno Aji.

"Dengan alasan bahwa mereka melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap rekam jejak kandidat dan dampak Pilkada sebelumnya terhadap Kaltim," kata Alamsyah.

Survei juga menemukan 66,4 persen



milenial dan 62,7 persen Gen Z sudah mantap dengan pilihan mereka, meskipun sebagian kecil masih terbuka untuk berubah. Ini menunjukkan mayoritas pemilih muda sudah memiliki preferensi politik yang kuat dan keyakinan terhadap calon yang mereka anggap mampu membawa perubahan nyata.

Alamsyah menambahkan kesimpulan hasil survei LPMM memberikan gambaran bahwa Gen Z dan Milenial bukan sekadar pemilih pasif, melainkan penggerak utama yang akan menentukan hasil Pilgub Kaltim 2024.

"Dengan kontribusi suara yang mencapai 61 persen dari total pemilih, kedua generasi ini memiliki potensi luar biasa untuk mengubah lanskap politik Kaltim," tegas Alamsyah.

Dikatakan, pasangan calon yang mampu secara tepat merangkul aspirasi kedua generasi ini memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilgub. Fakta pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji berhasil meraup dukungan mayoritas dari Gen Z dan milenial adalah sinyal kuat bahwa mereka adalah kandidat yang paling siap mengantarkan Kaltim menuju era baru.

Lebih dari itu, dengan populasi Kaltim yang didominasi oleh generasi muda, yakni sekitar 61 persen, keberhasilan pasangan Rudy-Seno dapat membuka jalan bagi transformasi besar yang akan membentuk masa depan Kaltim dalam 20 tahun ke depan.

Karena itu, menurut Alamsyah, harapan besar tertuju pada mereka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memaksimalkan potensi bonus demografi demi kemajuan Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu, pasangan ini dinilai lebih mampu memimpin Kaltim menuju visi 'Indonesia Emas 2045' dengan daya saing global, dibandingkan dengan Isran-Hadi.

"Mereka dipandang sebagai figur yang memahami pembangunan yang telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, sekaligus siap membawa Kaltim maju dengan inovasi, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. ●

Pilgub Sumsel 2024

SIAPA PALING SIAP MENANG?

Tiga kontestan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024 pasangan Herman Deru - Cik Ujang (HDCU), Mawardi Yahya - Anita Noeringhati (MATAHATI) dan Eddy Santana Putra - Riezky Aprilia (ERA) dinilai sama-sama memiliki peluang untuk menang.

Direktur Eksekutif Democracy Study Center Teras Indonesia, Haekal Hafafah mengatakan, tiga kontestan Pilgub Sumsel 2024 memiliki peluang yang sama.

"Iklim politik di Pilgub Sumsel 2024 semakin dinamis! Kenapa dinamis? Sebab tiga kontestan memiliki peluang yang sama," kata dia

Dilanjutkannya walaupun elektabilitas pasangan HDCU berada di urutan pertama dan MATAHATI di urutan kedua. Namun masuknya pasangan ERA diprediksi tidak akan menjadi pemecah suara atau hanya sebagai pelengkap saja.

"Masuknya Eddy Santana Putra atau pasangan ERA pastinya juga memiliki peluang. Walaupun kita tahu Eddy Santana harus bekerja lebih keras lagi. Sebab elektabilitas tertinggi pertama masih ada di HDCU dan kedua MATAHATI," jelasnya.

Menurutnya, Putusan MK menjadi angin segar PDI Perjuangan mengamobil langkah mendaftarkan pasangan yang diusungnya Eddy Santana Putra -

Riezky Aprilia (ERA) sontak menjadi sorotan publik Sumsel. Kondisi itu membuat iklim panggung politik di Sumsel berubah jadi dinamis dan masyarakat mendapatkan pilihan calon kepala daerah yang baru.

"Pasca mundurnya Heri Amalindo dukungan kepadanya tidak tahu bakal kemana. Walaupun Heri Amalindo menyatakan dukungan kepada Herman Deru dan Cik Ujang. Tetapi tetap saja masyarakat sekarang memiliki pilihan baru adanya Eddy Santana," pungkasnya

Sementara itu, Eddy Santana Putra adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra pada Pileg 2019. Setelah maju mendaftarkan diri di Pilgub Sumsel 2024 diusung PDI Perjuangan Eddy Santana Putra terancam dipecat keanggotannya sebagai kader Gerindra.

Kabar itu dipertegas oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi menyatakan, Eddy Santana Putra dinilai tidak taat dengan keputusan partai. Lantaran Gerindra mengusung pasangan Mawardi Yahya - Anita Noer-





inghati atau MATAHATI sebagai calonnya di Pilgub Sumsel 2024

Uniknya tidak seperti di setiap wilayah Pilkada Serentak Sumsel disokong oleh kekuatan dari KIM Plus. Kekuatanimbang itu juga terjadi karena KIM Plus di Pilgub Sumsel 2024 pecah koalisi alias tidak terbentuk seperti di wilayah lain di Sumsel.

KIM Plus adalah nama koalisi yang dibentuk dalam kontestasi Pilkada 2024. Koalisi tersebut merupakan perluasan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang sebelumnya mendukung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dibentuk atas inisiasi Prabowo Subianto. Tujuannya untuk menggabungkan partai-partai politik yang sebelumnya saling bertarung di Pilpres 2024.

KIM Plus terdiri dari 9 partai politik anggota KIM dan beberapa parpol di luar koalisi tersebut. Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Pri-

ma. Koalisi bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM Plus.

Namun di Pilgub Sumsel 2024 KIM Plus "terpecah" lantaran masuk ke dua kontestan petahana yaitu mantan Gubernur Sumsel Herman Deru dan mantan Wali Gubernur Sumsel Mawardi Yahya membuatnya terpecah karena sama-sama bertarung.

Pasangan Herman Deru - Cik Ujang (HDCU) didukung oleh 4 koalisi partai terdiri dari NasDem, Demokrat, PKS dan Perindo.

Lalu pasangan Mawardi Yahya - Anita Noeringhati (MATAHATI) didukung 9 koalisi partai diantaranya PKB, Gerindra, Golkar, Gelora, Garuda, PKN, Hanura, PAN dan PPP.

Sedangkan pasangan Eddy Santana Putra - Riezky Aprilia diusung oleh partai tunggal PDI Perjuangan notabene bukan KIM Plus. Moncong putih memiliki peluang melakukan serangan sebab KIM Plus tidak bersama di pertarungan Pilgub Sumsel 2024.

Pengamat Politik Sumsel Ade Indra

Chaniago menanggapi pecahnya koalisi KIM Plus di Pilgub Sumsel 2024 dikarenakan faktor tertentu.

"Faktornya ada perbedaan padangan politik KIM Plus di Pilgub Sumsel 2024. Padangan itu terkait calon diusung mereka mempunyai calon kuat yang berbeda. Artinya di Sumsel memang boleh saja ada KIM Plus tetapi di Pilgub Sumsel tidak terjadi. Bahkan di Lubuklinggau dan OI melawan kotak kosong karena disana ada KIM Plus Plus. Plus-nya dua kali KIM Plus Plus karena PDI Perjuangan juga ikut bergabung,"ucapnya

Dia juga menilai peluang untuk kontestan di Pilgub Sumsel 2024 sama-sama kuat. Terlebih lagi masuknya nama Eddy Santana Putra menjadi pilihan alternatif masyarakat Sumsel juga mempunyai pendukung setia khususnya di Palembang.

"Apa lagi nama besar ESP sangat dikenal masyarakat Palembang. ESP juga cukup dikenal di Sumsel. Jadi ketiga kontestan ini ketokohnya kuat dikenal oleh masyarakat Sumsel,"ucapnya. ●

3 KONTESTAN OPTIMISTIS MENANG

Herman Deru-Cik Ujang (HDCU)

Pasangan Herman Deru-Cik Ujang melakukan deklarasi sebagai bentuk kepastian berkompetisi di Pilgub Sumsel di halaman luar Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Selasa, 27 Agustus 2024.

Herman Deru mengatakan optimis bisa memenangkan persaingan sebagai kontestan di Pilgub Sumsel 2024.

"Dari hasil survei lembaga-lembaga terpercaya kalau Herman Deru dan Cik Ujang tertinggi. Nah ini semangatnya yang harus kita menyalahkan terus. Tentunya agar pada akhirnya nanti saat puncaknya di tanggal 27 November 2024 itu Herman Deru dan Cik Ujang

Pasangan HDCU dengan tagline Mengalah Abangku ini, mendapatkan tambahan dukungan dari partai lain. Sebelumnya HDCU diusung oleh koalisi partai NasDem, Demokrat, PKS dan Perindo.

"Hari ini bertambah PBB, artinya memang benar kita banyak dukungannya. Tinggal saya meminta doa dan restu dari masyarakat di Sumsel," pungkasnya.

Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei Pilkada Sumatera Selatan 2024. Hasilnya elektabilitas Herman deru sudah di atas 60 persen.

Dengan tingkat keterpilihan di atas

ita Noeringhati (MATAHATI) juga optimis menang saat deklarasi.

MATAHATI bahkan berjanji apabila terpilih akan memimpin Sumsel lebih baik dibandingkan gubernur-gubernur sebelumnya yang sudah baik, termasuk dari Gubernur Petahana Herman Deru dimana dia menjadi wakilnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ribuan pendukungnya yang datang dari segala penjuru Sumsel dengan beraneka ragam corak dan warna. Termasuk juga pendukung dari sebelas partai yang nampak sangat antusias berkumpul di tempat deklarasi yang berjarak 300 meter dari KPU Sumsel, Kamis 29 Agustus 2024.

"Saya dan Anita akan melanjutkan pembangunan Sumsel sebagai gubernur terbaik dari yang sudah baik," katanya.

Mawardi juga menyatakan haru dan kagum melihat membludaknya dukungan masyarakat Sumsel dan berkeyakinan dapat memenangkan Pilkada Sumsel di Pilkada November 2024.

Meski begitu, Mawardi mengaku tak jumawa dengan klaimnya tersebut. Beberapa program para gubernur terdahulu mulai dari Ramli Hasan Basri, Syahril Oesman, Alex Noerdin hingga Herman Deru akan dikomparasi untuk memajukan Sumsel ke arah pembangunan yang lebih baik lagi.

"Kami pasangan MATAHATI berkomitmen mengembalikan kejayaan Sumsel yang pernah ada," jelas dia.

Mawardi menerangkan, pemerataan pembangunan akan dilakukan di Sumsel tidak berfokus pada satu wilayah tertentu saja. Dirinya bahkan menjanjikan akan memperjuangkan pemekaran wilayah jika dirasa penting untuk membuka peluang bagi Sumsel berkembang.

"Termasuk soal pemekaran Sumsel-Barat jika dirasa perlu harus dilakukan, termasuk wilayah kabupaten dan kota di Sumsel yang sejauh ini memiliki wilayah cukup besar seperti Banyuasin Timur, Musi Banyuasin Timur hingga Pantai Timur, OKI," jelas dia.



menang atas kehendak Allah SWT," kata dia.

Menurut mantan Gubernur Sumsel periode 2018-2023 pada periode kedua ini, dirinya akan tetap menjalankan program yang sama. Ketua DPW NasDem Sumsel ini menyebutkan hanya akan memperkuat lagi program-program yang sudah ada sebelumnya.

"Kita akan melakukan keberlanjutan program kita mengoptimalkan periode yang lalu sudah kita lakukan. Misalnya seperti pendidikan, kesehatan dan membangun karakter masyarakat. Lalu untuk SMK SMK kita akan tingkatkan agar tamat sekolah langsung bisa bekerja," ungkapnya.

60 persen itu, Herman Deru sebagai calon dominan karena hingga saat ini masih dipandang positif dari berbagai sisi. Kemudian karena tak ada alternatif calon kuat dan kompetitif yang mampu menyaingi mantan Bupati OKU Timur 2 periode itu.

Sehingga dalam survei itu persentase jarak dengan pesaing terdekat mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya angka elektabilitasnya cukup jauh, mencapai 50 persen.

Mawardi Yahya- Anita Noeringhati (MATAHATI)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya-An-

Dirinya pun mengajak relawan, parpol pendukung hingga masyarakat Sumsel turut rembug bersama memenangkan pasangan Matahati.

Menurutnya, masyarakat lah yang akan memilih sehingga bisa menggunakan matahatinya untuk memberikan pilihan yang tepat memimpin Sumsel.

"Sampai saat ini tidak ada perbedaan pandangan antara saya dan Anita. In-sya Allah, Mawardi dan Anita punya tim yang kompak untuk dapat memimpin Sumsel lebih baik," jelas dia.

Deklarasi kali ini juga terlihat unik dan berbeda karena menampilkan pula sejumlah tokoh lintas agama, kesenian dari berbagai daerah baik yang ada di Sumsel maupun dari daerah lain dengan pakaian adat masing-masing.

Nampak hadir Bupati Empat Lawang Joncik, mantan Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya, serta sejumlah ketua partai pendukung yang berjumlah sebelas partai serta Ketua Tim Pemenangan Matahati, Syahrial Oesman yang sebelumnya menjadi Tim Pemenangan Herman Deru – Mawardi Yahya pada Pilkada 2018.

Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia (ERA)

Hal serupa juga dicetuskan oleh pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia optimis menang. Duet anggota DPR RI ini mendapat dukungan resmi PDI Perjuangan.

Suara sah Moncong putih ini telah mencukupi syarat untuk memajukan pemilik singkatan ERA (Eddy-Riezky Aprilia) di Pilkada Sumsel. Yakni sebanyak 543.067 suara sah atau 10,97%, sementara batas minimal syarat adalah 371.188 suara sah.

Eddy Santana Putra mengatakan dirinya hanya diusung 1 Parpol yakni PDIP. Dari jumlah suara sah milik PDIP telah mencukupi syarat ikut Pilkada Sumsel.

"Bisa dikatakan anak tunggal karena hanya diusung PDIP. Saya kira luar biasa perubahan demokrasi saat ini karena keluarnya putusan MK kemarin. Suara PDIP sudah cukup untuk memenuhi 7,5% jumlah suara sah," ujar Eddy.

Dalam pendaftaran itu, syarat pendaftaran yang dibawa ERA kurang lengkap, sehingga pengecekan berkas memakan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit.

"Kami ingin menjadikan Sumsel lebih maju dan cerah (cerdas, sehat dan sejahtera). Pelayanan kesehatan kerakyatan, ekonomi kerakyatan akan jadi

nal," kata dia

Dilanjutkannya pengumuman akan diberikan setelah rapat pleno selesai di Website resmi KPU Sumsel di link sumsel.kpu.go.id.

"Rapat pleno penetapan akan dilakukan hari Minggu 22 September 2024. Hari itu juga setelah selesai baru akan kita umumkan di Web KPU Sumsel,"



prioritas dan benar-benar dikerjakan," ungkapnya.

KPU Sumsel Umumkan Penetapan Calon Pilgub 2024 di Situs Resmi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) akan mengumumkan penetapan calon Pilgub Sumsel di situs resmi.

Ketua KPU Sumsel Andika PJ mengatakan, penetapan calon Pilgub 2024 akan dilakukan secara tertutup dan tidak bisa diikuti orang luar alias rapat internal.

"Kita akan melakukan penetapan melalui rapat pleno tertutup. Media juga tidak boleh masuk karena inter-

tuturnya.

Selanjutnya pihaknya baru akan melakukan pengundian nomor urut calon kontestan Pilgub Sumsel 2024. Kegiatan itu dilangsungkan secara umum alias kegiatan tidak dilaksanakan secara tertutup.

"Untuk pengundian nomor urut itu pada tanggal 23 September 2024 di lokasinya belum ditentukan masih dicari. Rencana di salah satu hotel di Palembang," pungkasnya.

Sementara itu sebelumnya KPU Sumsel memberikan pengumuman tiga pasangan bakal calon Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel lolos tes kesehatan. •

TEBAR PESONA CALON WALI KOTA PALEMBANG

Iklim kompetisi di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Palembang 2024 anginnya mulai deras, karena tiga kontestan mulai rajin tebar pesona kepada konstituen masyarakat Palembang.

Ketiga kontestan di Pilwalkot Palembang 2024, pasangan Yudha Pratomo Mahyuddin - Baharudin (Yudha-Bahar), Fitrianti Agustinda - Nandriani Octarina (Fitri-Nandri) dan Ratu Dewa - Prima Salam (RDPS).

Aksi rajin tebar pesona itu, sangat

marak melakukan senam sehat dan tes kesehatan gratis. Lalu pasangan Fitri-Nandri melakukan kunjungan ke rumah warga yang sakit dan membuka pasar sembako murah.

Sementara itu RDPS lebih menarik mintak warga Palembang dengan olahraga dengan menggelar event

kontestan Pilwalkot sah-sah saja tergolong masuk dalam sosialisasi para bakal calon kepala daerah di Palembang.

"Mereka menyebutnya sosialisasi ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat Palembang. Tebar pesona sah-sah saja asalkan mereka tidak melakukan ajakan untuk memilih," kata dia.

Menurut dosen Ilmu Politik dari kampus STISIPOL Candradimuka ini, status kontestan masih bakal calon dan belum mendapatkan nomor urut. Hal itu menyebabkan mereka belum sah untuk melakukan kampanye.

"Tidak ada nomor urut juga tidak bisa berkampanye. Tidak ada nomor urut kompetisi Pilkada 2024 belum resmi di mulai," pungkasnya.

Yudha Pratomo Mahyuddin - Baharudin (Yudha-Bahar)

Dari pantauan akun Instagram Yudha Pratomo Mahyuddin @yudhamahyuddin memposting beberapa foto dan video aktifitas blusukan yang dilakukannya.

Pasangan YudhaBahar terlihat mengunjungi beberapa masjid besar di kota Palembang dan bersilaturahmi dengan jamaah disana.

Selanjutnya Yudha terlihat mengunjungi sekolah SD N 77 Palembang, tempat dirinya pengenyam pendidikan setelah 33 tahun lulus.

Yudha juga mengundang semua alumni SD N 77 untuk bersilaturahmi dan berbincang dengan anak-anak sekolah SD N 77.

Pasangan YudhaBahar juga melakukan senam bersama warga Palembang dan melakukan cek kesehatan gratis.

Fitrianti Agustinda - Nandriani Octarina (Fitri-Nandri)

Dari pantauan akun Instagram Fi-



kelas terpantau dari akun sosial media atau medsos para kontestan dengan blusukan dari lorong ke lorong, kelurahan dan kecamatan.

Tebar pesona pasangan YudhaBahar terlihat turun ke lapangan dengan

bulutangkis dan melakukan nonton bareng Timnas Indonesia Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel) Ade Indra Chaniago mengatakan, tebar pesona dilakukan oleh

trianti Agustinda @fitrianti_agustinda memposting beberapa foto dan video aktifitas blusukan dilakukannya.

Finda nama sapaan akrab Fitrianti Agustinda mendatangi rumah warga Palembang yang mengalami musibah kebakaran dan melakukan Jumat berbagi memberikan makanan siang kepada ojek online di jalan raya. Lalu terlihat juga ada video postingan Fitri dan Nandri mendatangi korban dan memberikan bantuan.

Selanjutnya dari akun Instagram Nandriani Octarina @nandriani.official memperlihatkan foto dan video duo Srikandi Fitri dan Nandri mengunjungi warga sakit di kota Palembang.

Mereka memberikan bantuan dengan membawa tenaga kesehatan dan memberikan bantuan.

Kemudian melihat ibu hamil di Palembang dan melihat para sopir per-

Pasangan ini dinilai paling siap karena memulai deklarasi lebih awal dari pasangan lain menggelar deklarasi di hadapan publik di bawah jembatan Ampera pada hari Sabtu, 27 Juli 2024.

Pasangan duo Srikandi Fitri Nandri mendapatkan dukungan dan tiga kekuatan mesin partai yakni NasDem, PAN dan PKB.

Finda nama sapaan akrab Fitrianti Agustinda sendiri adalah Ketua DPD NasDem Palembang memang sebagai kader diusung maju di Pilwalkot Palembang 2024. Dalam deklarasi Finda sempat menyebutkan PAN dan PKB dua partai selalu royal mendukung dirinya dan almarhum kakak kandung Romi Hertan saat maju di panggung politik.

Finda pun cukup dikenal masyarakat Palembang setelah dua periode menjabat sebagai mantan Wakil Wali Kota

lawan kuat untuk kontestan lainnya.

Sedangkan Ratu Dewa seorang birokrat non partai diusung oleh partai Gerindra maju bersama Prima Salam Ketua DPC Gerindra Palembang. Awalnya Ratu Dewa baru mendapatkan satu partai pengusung dan dikhawatirkan kesulitan maju karena kekurangan kuota.

Luar biasanya setelah Putusan MK, tiba-tiba dua partai besar Golkar dan PDI Perjuangan yang belum menentukan rekomendasi memilih dirinya. Ratu Dewa dan Prima Salam resmi diusung tiga partai besar Gerindra, Golkar dan PDI Perjuangan.

Ratu Dewa kembali membuat kejutan saat mendaftar ke KPU membawa gerbong besar dengan tambahan 10 Parpol, yakni PSI, Hanura, PPP, Berkarya, Garuda, PBB, Buruh, Gelora Indonesia, PKN dan PRIM. Jika ditambah 3 Par-



Dari story instagram-nya pasangan RDPS menggelar open turnamen bulutangkis untuk warga di Kota Palembang.

ahu ketek dibawah jembatan Ampera.

Fitri dan Nandri melakukan acara tebus murah jual sembako kepada warga dengan harga murah.

Ratu Dewa - Prima Salam (RDPS)

Tak kalah dengan dua pasangan lain, terlihat dari akun Instagram Ratu Dewa @ratudewa hanya baru melakukan blusukan menggelar event olahraga.

Dari story instagram-nya pasangan RDPS menggelar open turnamen bulutangkis untuk warga di Kota Palembang.

Pasangan YudhaBahar adalah gabungan duet ketua kader partai di koalisi. Yudha Ketua DPC Demokrat Palembang dan Bahar Ketua DPD PKS kota Palembang.



(Wawako) Palembang mendampingi Wali Kota Harnojoyo periode 2016-2018 dan 2018-2023.

Kekuatan Finda semakin kokoh dengan menggaet Nandriani Octarina sebagai pasangan perpaduan kaum perempuan menjadi warna baru dan magnet besar di panggung politik Pilwalkot Palembang 2024.

Kekuatan duo Srikandi dan perpaduan Fitri-Nandri disinyalir bisa menarik suara dari kaum perempuan dan Gen Z di Palembang. Terlebih lagi popularitas Nandriani Octarina dari kalangan pengusaha muda non partai itu tiba-tiba melejit di kalangan ibu-ibu, kaum Milenial dan Gen Z dipastikan menjadi

pol sebelumnya total pasangan RDPS didukung 13 Parpol gerbong terbesar di Pilwalkot Palembang 2024.

Efek buah dari elektabilitas tinggi Ratu Dewa yang cukup dikenal masyarakat sebagai petahana mantan Pj Wali Kota Palembang. Predikat elektabilitas tertinggi membuat partai tertarik ke dalam koalisi besar.

Namun dari gerbong besar itu RDPS tidak bisa merangkul PAN dan Demokrat membuat koalisi KIM Plus tidak sempurna atau KIM Minus. Namun RDPS bisa merangkul PDI Perjuangan membuat koalisi besar RDPS bisa disebut KIM Minus Plus karena ditambah keikutsertaan Moncong Putih. ●

FENOMENA KOTAK KOSONG CARA ELITE AMPUTASI DEMOKRASI

Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan (Sumsel) batal melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024, kini hanya Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang memiliki calon tunggal tanpa lawan.

Kabupaten Empat Lawang batal melawan kotak kosong, setelah berkas pencalonan pasangan H Budi Antoni Al Fajri dan Henny Verawati atau HBA-Henny sudah diterima KPUD Kabupaten Empat Lawang, Sabtu 14 September 2024.

HBA-Henny diperkenankan meleng-

dan disaksikan Komisioner Bawaslu.

Ketua Tim Pemenangan HBA-Henny, Joni Rico melalui Wakil Ketua Dufan Wira, mengisyaratkan bahwa KPUD Empat Lawang tidak punya alasan untuk tidak menerima berkas yang diserahkan kemarin.

Karena langkah itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah

kan lalu dipersoalkan KPUD setempat.

Bagaimana bisa HBA-Henny kini melaju ke Pilkada Empat Lawang?

Komisioner KPU Empat Lawang Hendra Gunawan memberikan penjelasan bahwa kedatangan pihak HBA-Henny disambut dengan baik dan selanjutnya berkas akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.



kapi berkas kelengkapan dan menyehkannya ke KPU Empat Lawang sesuai Surat Keputusan KPU RI Nomor 2038/PL.02-SD/06/2024, yang memperbolehkan penerimaan kembali pasangan calon di daerah dengan hanya satu pasangan calon.

Berkas yang diantarkan relawan dan simpatisan koalisi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang HBA-Henny tersebut diterima Komisioner KPU Hendra Gunawan, Eko Leo Agustalia, dan Ongki Parnandes

tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan KPU RI nomor 2038/PL.02-SD/06/2024, yang memperbolehkan penerimaan kembali pasangan calon di daerah dengan hanya satu pasangan calon.

Pasangan HBA-Henny bisa mencalonkan diri sesuai Putusan MK, diung oleh tujuh partai PKB, PPP, Hanura, Gelora, PKN, Perindo, dan Partai Buruh. Pasangan HBA dan Henny, emua persyaratan administrasi pencalonan, termasuk surat dukungan yang dua pe-

Berkas bakal Pasangan HBA-Henny, kata dia, disusulkan sesuai Surat Dinas dari KPU RI No 2038, yang mana sebelumnya ada persyaratan pencalonan berupa Surat Kesepakatan dari Partai Politik yang telah mendaftarkan pasangan calon pada 27-29 Agustus lalu kemudian merubah arah dukungan.

Sebelumnya, pengamat Politik Sumsel Ade Indra Chaniago mengatakan, kotak kosong terjadi di dua Kabupaten Empat Lawang dan Ogan Ilir, sebagai efek terbentuknya KIM Plus Plus di dae-

rah tersebut.

"Kenapa ada kotak kosong di Empat Lawang dan Ogan Ilir, bukan hanya ada KIM Plus saja di sana. Tetapi PDIP Perjuangan ikut bergabung, sehingga di sana ada KIM Plus Plus," katanya.

Dilanjutkannya, dua kabupaten itu sudah terjadi permufakatan jahat antar elit politik, sehingga alternatif calon lain untuk dipilih oleh masyarakat malah menghilang.

Dia menilai berdasarkan teori demokrasi, ada kompetisi dan partisipasi tidak terwujud di dua wilayah tersebut.

"Partisipasi masyarakat ada, tetapi kalau hanya satu kontestan nilai kompetisinya tidak ada. Artinya dari teori demokrasi di sana tidak terwujud. Di sini saya menyebutkan ada kesepakatan elit untuk mengampulasi demokrasi di Pilkada Empat Lawang dan Ogan Ilir," paparnya.

Kemungkinan-kemungkinan kontestasi Pilkada di Empat Lawang dan Ogan Ilir hasilnya kotak kosong bisa menang bisa saja terjadi. Namun keterlibatan KIM Plus Plus disebut Ade Indra bisa memenangkan calon tunggal.

"Empat Lawang dan Ogan Ilir tidak mungkin di menangkan oleh kotak kosong. Sebab, bersatunya KIM Plus Plus di sana membuat kerja mesin politik akan maksimal bekerja," pungkasnya.

Bagaimana

Kotak Kosong Bisa Terjadi di Empat Lawang dan Ogan Ilir?

Paslon Haji Budi Antoni (HBA) - Heny Verawati tidak mengembalikan berkas

kekurangan hingga batas akhir yang ditentukan.

Dengan belum mengembalikan berkas tersebut, Budiman memastikan, Pilkada Empat Lawang, hanya akan diikuti 1 paslon yakni Joncik Muhammad dan Arifai.

Awalnya KPU Empat Lawang mengembalikan berkas pasangan Haji Budi Antoni (HBA) - Heny Verawati.

Lalu KPU Kabupaten Ogan Ilir resmi menutup pendaftaran Bakal Calon usai masa perpanjangan tiga hari lalu. KPU Ogan Ilir memastikan hanya ada satu Bakal Calon yang lolos dalam masa pendaftaran Panca Wijaya Akbar-Ardani menjadi pasangan tunggal.

Kendati melawan kotak kosong, namun Panca Ardani tetap menargetkan 90 persen angka kemenangan di Pilka-



Lantaran salah satu partai pengusung PKB telah memberikan dukungan ke paslon lain yakni Joncik Muhammad - Arifai.

Hal tersebut berbenturan dengan keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran.

Sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, paslon HBA - Heny belum juga melengkapi berkasnya dan dipastikan Joncik Muhammad - Arifai menjadi pasangan tunggal di Pilkada Empat Lawang.

da Ogan Ilir 2024 mendatang.

Untuk meraih angka kemenangan sebesar 90 persen tersebut, tentunya harus didukung oleh seluruh mesin partai yang telah mengusung dan mendukung.

Sebagaimana diketahui, pada Pilkada Ogan Ilir 2024 ini, pasangan Panca Ardani didukung oleh 18 partai politik yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

"Mengapa mesin partai harus dijalankan? Karena untuk mengantisipasi perlawanan kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 nanti," ujar Panca.

"Ini sejarah baru di Kabupaten Ogan Ilir terjadinya lawan kotak kosong. Namun ini bukanlah sebuah prestasi tetapi justru jadi momok menakutkan," ungkap Panca.

Ditambahkan Panca, ini merupakan amanah yang ditiptkan di pundak mereka. Untuk itu, walaupun Parpol sudah memberikan rekomendasi hendaknya bisa membantu.

"Seluruh parpol hendaknya membantu kami juga menyukseskan program-program ke depan," pintanya. •

3 SRIKANDI BEREBut KURSI JATIM 1

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memastikan dan mencatat sejak pembukaan 27-29 Agustus 2024 ada tiga pasangan bakal calon (Bacalon) Cagub – Cawagub 2024. Menariknya, tiga bakal calon gubernur merupakan kalangan perempuan yang berimbas pada meningkatnya keterwakilan mereka di ranah politik.

Hadirnya ketiga pasangan ini membuat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim akan berlangsung semarak. Selain itu masyarakat juga mempunyai banyak alternatif pilihan yang akan mereka coblos sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur lima tahun ke depan.

Pasangan Khofifah - Emil didukung banyak partai yang berasal dari KIM plus PKS.

Pasangan Risma - Zahrul didukung

puan dalam pendidikan tinggi di Jatim.

IPG Provinsi Jatim pada tahun 2022 mencatatkan nilai 92,08, sementara angka nasional berada di 91,63. Tingginya tren IPG ini turut menunjukkan peningkatan aspirasi yang bermuara menjadi partisipasi politik perempuan, baik aktif maupun pasif.

"IPG ini juga mengukur partisipasi perempuan dalam aktivitas perekonomian. Artinya, peranan perempuan untuk berdaya secara ekonomi mendorong kemunculan kelas menengah

fikasi. Visi dari pasangan ini adalah : Bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju 'Indonesia Emas 2045'.

Misi yang dibawa : 1. Jatim Sejahtera: Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.

2. Jatim Kerja: Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing.

3. Jatim Cerdas: Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

4. Jatim Sehat: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).

5. Jatim Akses: Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.

6. Jatim Berkah Amanah: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.



tiga partai yakni PDIP, Hanura dan Partai Ummat.

Pasangan Luluk - Lukmanul mendapat dukungan penuh dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Pilkada Provinsi Jawa Timur (Jatim) kali ini, seluruh kandidat calon gubernur merupakan tokoh perempuan. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Luluk Nur Hamidah. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam kesetaraan gender di dunia kepemimpinan Indonesia.

Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga, Febby Risti Widjayanto, SIP, MSc berpendapat,

terdapat peningkatan keterwakilan perempuan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan partisipasi perem-

yang memiliki aspirasinya sendiri terhadap perpolitikan daerah," ujar Febby seperti dikutip dari akun Unair.

Faktor lainnya adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi. Secara nasional, Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan dalam pendidikan tinggi lebih besar, yakni 33,87%, dibandingkan dengan laki-laki yang berada di angka 29,12%.

Didukung 15 Partai Politik

Banyak yang memprediksi kalau pasangan Khofifah - Emil menjadi pasangan paling berpeluang untuk menang karena didukung 15 partai yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda dan Partai Prima yang tidak lolos veri-

7. **Jatim Agro:** Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

8. **Jatim Harmoni:** Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.

9. **Jatim Lestari:** Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.

Bawa Isu Kesejahteraan Sosial

Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam kontestasi Pilgub Jatim 2024 bakal membawa banyak isu sosial yang belum terjawab hingga saat ini. Perempuan yang sempat menjabat sebagai Menteri Sosial itu menyebut, di Jatim masih banyak permasalahan sosial yang perlu untuk segera mendapatkan intervensi.

Risma mengungkapkan, salah satu permasalahan yang tampak saat ini seperti banyaknya warga yang hingga hari ini masih terjebak di praktik Pekerja Migran Ilegal (PMI).

Menurut Risma, angkanya mencapai ratusan orang. Hal ini menunjukkan, permasalahan kesejahteraan ekonomi masih menjadi momok di Jatim.

"Sebetulnya kalau lihat ada TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), ada pekerja migran. Kemarin ada berapa ratus PMI-nya dari Jawa Timur," kata Risma pada awak media.

Risma mengatakan, permasalahan kesehatan. Jawa Timur menurut dia angka penderita kusta sangat banyak.

Bahkan Jawa Timur menduduki peringkat satu terbanyak di Indonesia. Artinya, intervensi masalah kesehatan pun tidak bisa main-main penanganannya. Itulah kenapa, masalah kesejahteraan sosial ini sangat penting untuk dikedepan

dalam fokusnya di pencalonan ini.

Hal ini berkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. Sebutlah semisal kesehatan, tentu berkaitan dengan faktor ekonomi. Lalu pendidikan dan infrastruktur.

"Saya nggak bisa kalau ngomong kesejahteraan, eh iya ciptakan lapangan pekerjaan. Bukan itu, tapi bagaimana seluruh sistem perekonomian itu betul-betul berjalan. Coba dicek beberapa daerah yang masih banjir. Kalau banjir kemudian habis pertanian. Kemarin juga banyak yang mengeluh pupuk juga," ujarnya.

Terkait pendidikan, dia juga mengungkapkan, di Jawa Timur masih banyak pesantren-pesantren kecil yang perlu untuk mendapat intervensi.



Yakin Raih 15 Juta Suara

Luluk Nur Hamidah - Lukmanul Khakim Bakal Pasangan Calon Gubernur Jatim yakin, bisa meraih 15 juta suara dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.

"Saya percaya itu target yang masuk akal ya, karena yang pertama adalah PKB sudah punya basis elektoral," kata Luluk.

Luluk mengatakan pihaknya juga sudah melakukan konsolidasi kekuatan di daerah-daerah di Jatim, sehingga menurutnya saat ini sudah cukup kuat untuk meraih banyak suara.

"Mungkin kemarin, mereka ada yang di partai lain, ada di beberapa tempat karena pilihan dan orientasi politik, tapi begitu hari ini adalah Pilgub yang memilih figur, itu semua batasan baju par-

tai kan bisa ditanggalkan," ucapnya.

Ia juga memastikan bahwa nanti jika terpilih menjadi Gubernur Jatim, akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, kekerasan terhadap perempuan, pendidikan, hingga infrastruktur.

Mereka juga berkomitmen untuk menjadikan Jatim sebagai kekuatan logistik nasional yang bertaraf internasional. Salah satu upaya yang akan dilakukan, yakni dengan membenahan secara menyeluruh.

"Kita harus betul-betul membenahi hulu sampai hilir, semua pusat-pusat dan basis-basis produksi keekonomian harus kita cek kembali dan ditata ulang, dan dikuatkan," ujarnya.

Sebagai calon pasangan yang pal-

ing muda dari dua calon lainnya, Luluk mengaku bahwa dirinya bersama pasangannya tidak memiliki beban masa lalu. Apalagi, dirinya juga lahir dari dunia aktivis.

"Tetapi muda aja kan tidak cukup, kita insyaAllah mewakili sebuah visi perubahan untuk Jawa Timur, mewakili sebuah gagasan yang insya Allah juga visioner untuk Jawa Timur," ucapnya.

Pengalamannya selama di DPR, lanjut dia, juga memberikan pemahaman mendalam tentang apa yang harus dilakukan di pemerintahan dan bagaimana merancang anggaran agar dapat menyelesaikan masalah secara efektif.

Luluk berencana, dalam membangun Jatim akan menerapkan pendekatan berbasis etika lingkungan, kekuatan budaya lokal, dan partisipatif yang memberdayakan masyarakat. •



SUKSES JALANKAN 3 KINERJA

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin mendapat dana insentif sebesar Rp 19,06 milyar lebih. Dana ini sebagai bentuk apresiasi Kabupaten Muba yang sukses menjalankan tiga kinerja penting.

Apresiasi ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.353 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kelompok kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut provinsi/kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2024. Penghargaan yang diterima mencakup tiga kategori penting yakni Kinerja Penurunan Stunting, Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah.

Atas kesuksesan itu Pemkab Muba menerima dana insentif mencapai Rp. 19.063.604.000.

Penyerahan penghargaan ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting Tahun 2024 yang dihelat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakar-

ta. Acara tersebut dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, dan dihadiri berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah.

Pj Bupati Muba, H Sandi Fahlepi, menekankan bahwa penghargaan ini mencerminkan dedikasi dan komitmen serius dalam penanganan stunting.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras Organisasi Perangkat Daerah dan dukungan masyarakat Muba," terangnya.

Muba bertekad untuk menurunkan angka stunting melalui program inovatif yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan, berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Sandi menambahkan, pendekatan kolaboratif dan berbasis data telah menunjukkan hasil nyata, dengan angka stunting di Muba kini turun menjadi 17,07 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.

Dr. Azmi Dariusmansyah selaku Kepala Dinas Kesehatan Muba, mengungkapkan, dari tahun 2021 hingga 2023, prevalensi stunting di Kabupaten

Musi Banyuasin berhasil turun sebesar 6,5 persen. Angka ini melebihi capaian provinsi dan nasional.

Bahkan Dinkes Muba menargetkan penurunan stunting lebih lanjut hingga mencapai 13,6 persen ke depan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan, dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 21,5 persen pada 2023.

Ia mengingatkan pentingnya evaluasi program dan penajaman intervensi agar lebih tepat sasaran.

Ma'ruf juga menekankan perlunya pemahaman yang benar mengenai stunting di masyarakat sebagai langkah awal untuk intervensi yang efektif. Ia berharap program penurunan stunting dapat terus disempurnakan untuk mewujudkan generasi unggul sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Dengan pencapaian ini, Muba menunjukkan bahwa kerja keras dan kolaborasi dapat membawa perubahan positif dalam upaya menurunkan angka stunting, menjadikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi mendatang.

Raih Piala WTN

Penghargaan cukup membanggakan juga diraih Kabupaten Musi Banyuasin langsung dari Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi yaitu Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2024 Kategori Kota Kecil.

Terpilihnya Kabupaten Muba sebagai penerima Piala WTN tahun 2024 kategori Kota Kecil tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Tahun 2024 Nomor KM 108 tentang penetapan pemerintah kota/kabupaten/provinsi sebagai penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha 2024.

Pencapaian Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendapatkan penghargaan WTN kategori kota kecil ini tidak lepas dari berbagai program dan inovasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Muba dan instansi terkait baik dari polres Muba, PUPR dan lainnya artinya semua sektor tata kelola transportasi di nilai baik untuk kategori kota kecil.

Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi menyampaikan terimakasih dan bangga bahwa berbagai inovasi yang dilakukan

oleh Pemkab Muba terbukti mampu mengubah wajah lalu lintas menjadi lebih baik.

Banyak perubahan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Muba untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih baik, penertiban angkutan, penambahan fasilitas, dan penganggaran perencanaan urusan perhubungan.

"Penghargaan Wahana Tata Nugra-

prestasinya, karena tahun ini, terdapat dua kategori penghargaan yang diberikan, yakni Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama. Piala WTN akan diberikan kepada 61 kota/kabupaten, dengan rincian Kota Raya (5 kota/kabupaten), Kota Besar (6 kota/kabupaten), Kota Sedang (23 kota/kabupaten), dan Kota Kecil (27 kota/kabupaten).



ha ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada provinsi, kota/kabupaten yang mampu menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Tahun ini, terdapat 102 kota/kabupaten yang menjadi peserta. Dinilai oleh tim secara obyektif dan independen dari berbagai aspek tentu saya bersyukur dan bangga dengan prestasi ini" lanjut Sandi

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengucapkan selamat kepada peserta termasuk Pemkab Muba atas

Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin diwakili Kepala Dinas Perhubungan Musni Wijaya menerima langsung, piala WTN yang prestisius itu langsung dari Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.

Kepala Dinas Perhubungan Muba Musni Wijaya berharap piala WTN tahun 2024 menjadi motivasi untuk insan perhubungan di kabupaten Muba bumi Serasan sekate ini untuk terus membangun sistem transportasi lebih baik lagi menuju Indonesia Emas 2045. •



DARI SEDIMENTASI KE EKSPOR PASIR LAUT

Keran ekspor pasir laut terbuka lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan aturan penunjangnya mendukung.

Aturan penunjang yang memungkinkan ekspor pasir laut itu tentu saja berasal dari instansi dengan portofolio perniagaan dalam dan luar negeri. Ya, Kementerian Perdagangan.

Nah, aturan sebelumnya yang masih melarang ekspor pasir laut ternyata sudah mengalami revisi. Revisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

"Revisi dua Permendag ini merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta merupakan usulan dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangan resmi pada, Senin, 9 September 2024.

Menurut Pak Dirjen Daglu, tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023. Tujuannya, antara lain, untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut. Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 itu merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk



Ekspor. Jadi, sudah dua aturan penunjang yang membuka keran ekspor pasir laut ini

Dari sisi Permendag Nomor 21 Tahun 2024, ketentuan-ketentuannya antara lain perusahaan pelaksananya sudah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan terdapat Laporan Surveyor (LS). Untuk dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tambahan pula, perusahaan eksportir pasir laut juga harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan demikian, Kementerian ESDM pun akan tercakup dalam urusan ekspor pasir laut.

Selain itu, pelaku usaha dan eksportir wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi persyaratan sebagai ET, pelaku usaha dan eksportir

dapat melengkapi persyaratan untuk memperoleh PE berupa Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut dari KKP dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Sedangkan jenis pasir laut yang dilarang diekspor diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024. Kedua Permendag diundangkan di Jakarta pada 29 Agustus 2024 dan akan berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

"Kami harap, pelaku usaha dapat menjalankan peraturan ini dengan

sebaik-baiknya sehingga berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia. Ketentuan ekspor ini akan mulai berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan," kata Dirjen Isy.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mengumumkan titik koordinat lokasi yang dapat dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Cakupannya menyebar di di laut Jawa, Selat Makassar, dan Natuna - Natuna Utara. "Penetapan lokasi pembersihan tentu dilakukan setelah kami melakukan koordinasi



dengan sejumlah pihak, dan melakukan kajian ilmiah di titik-titik itu,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2024. Menurut Menteri Sakti, sejauh ini terdapat tujuh lokasi pembersihan yang tersebar di laut Kabupaten Demak (Jawa Tengah), Kota Surabaya (Jawa Timur), Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang (ketiganya di Jawa Barat), juga perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan (Kalimantan Timur, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan pengumuman lokasi terse-

juan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), hingga pernyataan tidak memiliki riwayat pelanggaran Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan.

“Pelaku usaha juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan, salah satunya harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pengumuman ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 dan pemasukan dokumen persyaratan sejak tanggal diumumkan sampai dengan tanggal berakhirnya pengumuman,” sambungnya.

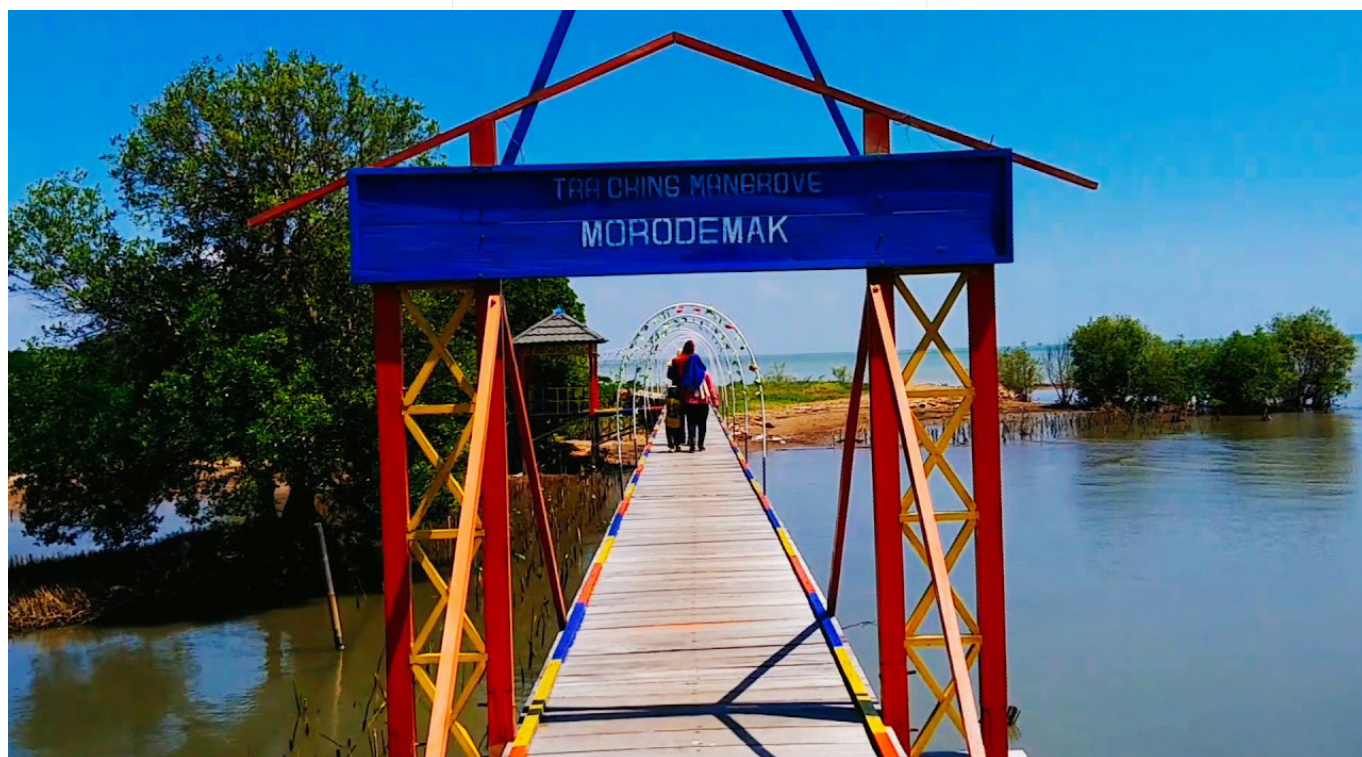
Pembersihan hasil sedimentasi di laut merupakan aturan yang tercakup dalam Peraturan Pemerintah (PP) No-

menyajikan pengelolaan tambang pasir laut hasil sedimentasi.

“Yang sudah mendaftar itu sedang kita teliti semua aspek. Tapi, belum bicara menyoal ekspor,” kata Kusdiantoro dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja KKP, Selasa, 30 Juli 2024.

Kusdiantoro menegaskan, pengelolaan pasir laut hasil sedimentasi ini masih diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Sedangkan untuk kebutuhan ekspor perizinannya akan melibatkan banyak Kementerian/Lembaga lainnya.

Selain itu, kata Kusdiantoro, pengeluaran izin pengelolaan tambang juga tidak asal diberikan. Banyak hal yang



but, KKP mempersilakan pelaku usaha memanfaatkan hasil sedimentasi dengan kriteria bergerak di bidang pembersihan hasil sedimentasi di laut, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut serta memiliki peralatan dengan teknologi khusus. Selanjutnya pelaku usaha lebih dapat mengirimkan proposal pemanfaatan. Antara lain memuat tujuan pembersihan, lokasi, volume, metode dan sarana pembersihan.

Proposal tadi juga harus memuat riwayat pengalaman bisnis pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan secara bertanggung jawab. Juga dokumen permohonan persetu-

mor 26 Tahun 2023. KKP pun telah membuat aturan turunan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 33 Tahun 2023 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Nah, meski persyaratannya ketat, peminat bisnis sedimentasi laut itu ternyata sudah puluhan perusahaan. Sekretaris Dirjen Pengelolaan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kusdiantoro mengemukakan sudah ada 66 perusahaan yang

perlu dikaji sampai pemerintah bisa mengeluarkan izin terkait pemanfaatan pasir laut itu. “Jadi kita belum ada dan belum pernah mengeluarkan izin terkait pemanfaatan sedimentasi ini,” ungkap Kusdiantoro.

Proses penerbitan izin penyedotan pasir itu harus melewati beberapa tahap yang panjang dan perlu verifikasi hingga validasi. “Masih panjang prosesnya, apalagi untuk ekspor karena di dalam negeri masih verifikasi, validasi, karena ini prinsip kehati-hatian sesuai arahan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di-jaga benar,” katanya.

la menambahkan, pemanfaatan pasir sedimentasi laut yang diutamakan untuk kepentingan domestik ini akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tim dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang meliputi kualifikasi perusahaan, kemampuan permodalan, hingga teknologi yang akan digunakan. "Jadi dipastikan teknologi yang digunakan tepat, kemampuannya, lalu yang pasti dia saat ditetapkan harus setor PNPB lima persen dari nilainya. Tidak sedikit itu," ungkapnya.

Toh PNPB (penerimaan negara bukan pajak) lima persen bukan halangan melihat minat para pengusaha. Ya harap maklum, setiap perusahaan mengajukan volume penambangan pasir laut yang bervariasi, yakni mulai dari 50 juta-200 juta meter kubik .



Pelaku usaha juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan, salah satunya harus memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Perusahaan-perusahaan itu, menurut rencana, bermitra dengan 51 perusahaan kapal isap pasir laut, serta 54 perusahaan pembeli pasir laut dari dalam dan luar negeri.

Sedangkan Menteri Sakti menyatakan, peminat utama pasir sedimentasi ini adalah pengusaha yang bakal melakukan pembangunan reklamasi di kawasan Jawa Timur, Surabaya, Pantai Indah Kapuk-Jakarta Utara hingga Batam, Kepulauan Riau. "Banyak (peminat) reklamasi di daerah Jawa Timur, Surabaya, Pantai Indah Kapuk, Kalimantan. Di daerah Batam juga banyak," ujarnya.

Jadi, bagaimana urusan sedimentasi hingga mengarah ke ekspor pasir laut? PP No 26 Tahun 2023 sudah menjawabnya. Pada bagian pemanfaatan hasil sedimen di laut dalam regulasi ini, disebutkan sedimen dapat digunakan untuk: a) reklamasi dalam negeri; b) un-

tuk pembangunan infrastruktur pemerintah; c) pembangunan prasarana oleh pelaku usaha; dan/atau d) ekspor.

Khusus untuk ekspor pasir laut, penghentian sementara sudah berlangsung sejak 2003. Landasannya adalah Keputusan Menteri Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Salah satu klausulnya menyebutkan penghentian itu akan ditinjau kembali, antara lain jika penetapan batas antara Indonesia dan Singapura sudah tuntas. Toh penetapan batas maritim dengan Singapura sudah beres. Tinggal sinkronisasi dengan Malaysia.

Mengapa urusannya dengan ne-



gara tetangga? Ini terkait dengan potensi Potensi volume sedimentasi laut itu sebanyak total 17,64 miliar meter kubik. Rinciannya, Laut Jawa sebanyak 5,58 miliar meter kubik, Selat Makassar berjumlah 2,97 miliar meter kubik, dan Laut Natuna-Natuna Utara mencapai 9,09 miliar meter kubik. Laut Natuna dan Natuna Utara yang dekat dengan Singapura paling banyak volumenya.

Dalam kaitan ini, aturan penunjang dari KKP sudah merinci hitungan bisnisnya. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Adapun harga patokan pasir laut untuk penghitungan tarif PNPB ditetapkan sebesar Rp93.000 per meter kubik untuk pemanfaatan pasir laut di dalam negeri serta Rp186.000 per meter kubik untuk pemanfaatan pasir laut di luar negeri. Harga patokan pasir laut itu mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Ta-

hun 2023, izin melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Izin pemanfaatan pasir laut berlaku selama tiga tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang.

Nah, melihat penerbitan PP No 23 Tahun 2023 hingga aturan-aturan penunjangnya, juga kajian-kajian yang telah dilaksanakan, penerapan regulasi ekspor pasir laut itu sudah melewati proses berliku dan memakan waktu. Apakah dalam implementasi atau eksekusinya berjalan lancar dan lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan mudratnya, waktu jua yang akan menjawabnya. Tiga tahun menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023. •



KELUAR ISTANA WAS-WAS GELOMBANG PHK

Gelombang pemutusan hubungan kerja masih menjadi ancaman ekonomi tahun depan. Bagaimana menyiasatinya?

Meninggalkan Istana untuk menghadiri acara para ekonom, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kemungkinan gelombang pemutusan hubungan kerja pada 2025. Presiden yang pada 20 Oktober 2024 mengakhiri masa tugas dua periode atau sepuluh tahun (2014-2024) mengemukakannya di acara pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Hotel Alila, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Jokowi menyebut ancaman gelombang PHK itu datang dari tiga perkembangan global yang tak terelakkan. Pertama, ujarnya, perlambatan ekonomi dunia

"Perlambatan ekonomi global, kita pada 2023 dari World Bank secara

global hanya tumbuh 2,7 persen. Kemudian pada 2024 ini diperkirakan hanya muncul 2,6 persen. Tahun depan dari World Bank diperkirakan naik sedikit 2,7 persen. Tapi, masih jauh dari yang diharapkan oleh semua negara.

Kita bisa tumbuh di 5,1 persen. Ini menjadi hal yang patut kita syukuri, karena ekonomi global hanya tumbuh 2,6-2,7 persen," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Kongres ISEI yang berlangsung pada Kamis, 19 September 2024.

Menurut Jokowi, bank sentral di setiap negara belakangan ini menetapkan kebijakan moneternya. Hal ini dilakukan untuk menekan angka inflasi. "Artinya apa? Kalau kebijakan moneter direm, industri pasti akan turun produksinya, otomatis. Perdagangan

gan global juga akan turun ekspektasinya, kata Presiden.

Maka, lanjut Presiden, dunia sekarang ini menghadapi sebuah gejolak, dan tantangan yang tidak mudah. Semua negara mengalami termasuk Indonesia. Bahkan negara maju banyak yang masuk ke jurang resesi, seperti Inggris.

"Kita tahu 96 negara sudah menjadi pasien IMF. Ini sebuah angka yang menurut saya sangat mengerikan. Oleh sebab itu, kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi kita," ucapnya.

Nah, faktor kedua, menurut Jokowi, terjadi peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja. Antara lain munculnya kecerdasan buatan, artificial intelligence (AI) dalam bentuk oto-



Kita tahu 96 negara sudah menjadi pasien IMF. Ini sebuah angka yang menurut saya sangat mengerikan. Oleh sebab itu, kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi kita.

masi analitik. Setiap hari, sambung Jokowi, dunia teknologi terus memunculkan hal-hal yang baru, yang bisa menggerus lapangan pekerjaan.

"Semua sekarang ini masuk ke sana semuanya, ke otomasi semuanya. Awal kita hanya otomasi mekanik, kemudian muncul AI, muncul otomasi analitik. Setiap hari muncul hal-hal yang baru, dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta, sebuah jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut membuka lapangan kerja, justru di tahun 2025 ada 85 juta pekerjaan akan hilang, karena ada peningkatan otomasi di berbagai sektor," ujarnya.

Dan untuk faktor ketiga adalah gig

ekonomi. Pemerintah mencium banyak perusahaan yang lebih memilih pekerja freelance, untuk mengurangi risiko. "Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan akan memilih pekerja independen, yang freelance, dan kontrak jangka pendek untuk mengurangi resiko ketidakpastian global yang terjadi.

Kita lihat trennya sedang menuju ke sana. Dan yang bekerja itu, bisa

saya sekarang maupun ke depan kita harus kepada pasar kerja. Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja, sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan," sambungnya.

Dia meminta masyarakat tidak terlalu larut dengan situasi global, meski terus diikuti. Jangan sampai terbawa skenario ekonomi global, karena harus selalu melihat angka-angka dan mengkalkulasi dengan perhitungan yang cermat.

"Oleh sebab itu saya berharap. Dari



bekerja di sini, bisa di negara lain," ungkap Gubernur DKI Jakarta yang menjabat tak sampai tiga tahun itu karena mengikuti Pilpres 2014 dan terpilih menjadi Presiden.

Dengan tiga faktor itu, Jokowi menyarankan kepada anggota ISEI untuk merancang ekonomi ke depan. Misalnya pemanfaatan bonus demografi untuk membuat Indonesia menjadi negara maju. "Kalau Bapak Ibu bertanya ke saya fokus ke mana, kalau

ISEI sudah menyampaikan kajiannya. Ada sebuah desain tapi taktis, rencana tapi rencana yang taktis, strategi tapi strategi yang taktis, dan detail. Kalau ada ini kita harus belok ke mana, kalau dicegat di sini kita harus menuju ke mana. Hal yang taktis seperti yang kita perlukan. Bukan rencana makro yang sulit diimplementasikan di situasi yang sangat sulit. Menurut saya, hilirisasi jadi kunci," tandasnya.

Pada sisi lain, Organisasi Pekerja

Seluruh Indonesia (Ops) menyebut selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak ada pertumbuhan dan perkembangan signifikan dalam hal penciptaan lapangan kerja. "Saat ini kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak sedang baik-baik saja," kata Saepul Tavip pada akhir Agustus 2024.

Menurutnya, kehadiran Undang-undang Cipta Kerja yang semula diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja justru menjadi kiamat bagi kaum pekerja. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Saepul mengungkapkan bahwa sepanjang

Menurut dia, investasi asing yang masuk ke Tanah Air juga disebut berkualitas rendah lantaran menawarkan upah murah. Hal ini, sambungnya, sejalan dengan kebijakan upah murah yang menjadi spirit dari UU Cipta Kerja.

Setiap tahun, Saepul menyebut kenaikan upah minimum tidak mampu menjawab kebutuhan riil pekerja. Akibatnya, banyak pekerja yang terjerat pinjaman online demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketimbang mengendalikan masalah pengangguran, pemerintah Jokowi justru menciptakan pengang-

hak-hak lainnya.

Di sisi lain, adanya jaminan kehilangan pekerja sebagai solusi dalam mengatasi masalah ekonomi pekerja pasca PHK dinilai tidak cukup efektif. Persyaratan dan prosedur yang berbelit-belit menjadi penyebab banyak pekerja belum menikmati fasilitas tersebut.

"Hubungan kerja yang semakin bersifat fleksibel seperti kontrak, outsourcing, magang, harian lepas, kemitraan, membuat Pekerja tidak mungkin mendapatkan manfaat tersebut," ujarnya.

Sedangkan Kementerian Keten-



2014-2024 atau 10 tahun pemerintahan Jokowi, ada tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal.

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, 8,5 juta orang terserap oleh lapangan pekerjaan di sektor formal. Angka ini turun menjadi dua juta orang pada periode kedua.

Investasi yang masuk ke Indonesia, kata dia, nyatanya tidak bersifat padat karya melainkan padat teknologi, di mana tidak mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia dengan tingkat pendidikan yang masih sangat rendah.

guran-pengangguran baru. Hal tersebut tercermin dari maraknya PHK, tidak hanya di sektor manufaktur, tapi juga di sektor jasa, perbankan, telekomunikasi, dan niaga. "Yang lebih parah, ketika PHK terjadi, nilai pesangon yang diterima oleh pekerja semakin menurun," ujarnya.

Menurunnya nilai pesangon, lanjut dia, akibat dari hadirnya UU Cipta Kerja yang banyak memangkas besaran uang pesangon. Tak hanya itu, besaran pesangon juga dipangkas oleh pengusaha-pengusaha nakal yang penuh siasat agar pekerja tidak mendapat hak atas uang pesangon dan

gakerjaan mencatat jumlah PHK dari Januari hingga akhir Agustus mencapai 46.240 pekerja. Meski ada tren kenaikan, Kemnaker berharap angka PHK tidak lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 64.000.

Nah, soal angka 85 juta lapangan kerja yang hilang itu adalah hasil kajian World Economic Forum (WEF) sejak 2020, beriringan dengan pandemi COVID-19.

"COVID-19 telah mempercepat kedatangan masa depan pekerjaan," kata Saadia Zahidi, Direktur Pelaksana, Forum Ekonomi Dunia. "Percepatan otomatisasi dan dampak dari

resesi COVID-19 telah memperdalam kesenjangan yang ada di seluruh pasar tenaga kerja dan membalikkan keuntungan dalam pekerjaan yang dibuat sejak krisis keuangan global pada tahun 2007-2008.

Ini adalah skenario gangguan ganda yang menghadirkan rintangan lain bagi para pekerja di masa sulit ini. Jendela kesempatan untuk manajemen proaktif atas perubahan ini semakin tertutup. Bisnis, pemerintah, dan pekerja harus merencanakan untuk segera bekerja sama guna menerapkan visi baru bagi tenaga kerja global," ungkap Saadia Zahidi, Direk-

jaan ekonomi hijau, peran di garis depan ekonomi data dan kecerdasan buatan, serta peran baru dalam bidang teknik, komputasi maya, dan pengembangan produk.

Berkaitan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan, struktur ketenagakerjaan yang dimaksud adalah sebanyak 53,68 persen angkatan kerja di Indonesia yang tingkat pendidikannya hanya sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024. Berikutnya, sebanyak 59,17 persen penduduk pekerja masih

jumlah tantangan termasuk dari sisi struktur internal ketenagakerjaan di Indonesia," katanya dalam Rakerkonas APINDO di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 29 Agustus 2024.

Secara kewilayahan pun tingkat pengangguran tertinggi cenderung berada di perkotaan yaitu mencapai 5,89 persen pada 2024. Sementara dari juta pengangguran Indonesia menunjukkan 5,87 juta di antaranya mereka sedang mencari pekerjaan baik baru lulus SMA, SMK, Dipoloma, maupun S1.

"Itu tantangan dari internal sektor ketenagakerjaan," ujar Ida.



tur Pelaksana WEF kala itu.

Meski 85 juta lapangan kerja hilang, justru akan muncul 97 juta peran baru di seluruh ekonomi mapan yang memerlukan perawatan, dalam industri teknologi informasi dan komunikasi (revolusi industri ke-empat), seperti kecerdasan buatan, dan dalam bidang pembuatan konten. Tugas-tugas yang harus dipertahankan keunggulan komparatifnya oleh manusia meliputi pengelolaan, pemberian saran, pengambilan keputusan, penalaran, komunikasi, dan interaksi. Akan ada lonjakan permintaan bagi pekerja yang dapat mengisi peker-

bergerak di sektor informal dan angka kelompok setengah pengangguran yang masih tinggi yaitu mencapai 12,12 juta orang.

Kemudian, relatif masih tingginya tingkat pengangguran yakni yang tertinggi pada kelompok usia muda 15-19 tahun sebanyak 17,4 persen dan 20-24 tahun sebanyak 15,94 persen. Selanjutnya, pengangguran dengan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 8,6 persen sedangkan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 6,73 persen.

"Kita masih dihadapkan pada se-

Meski demikian, Ida menuturkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia berdasarkan data BPS per Februari 2024 turun menjadi 4,82 persen yang merupakan terendah sejak 10 tahun terakhir. Ia pun mengatakan untuk mengatasi tantangan struktur ketenagakerjaan ini masyarakat dapat memanfaatkan adanya teknologi digital yang membuat banyak jenis pekerjaan baru bermunculan.

Maka, kualitas sumber daya menjadi kunci. Jika biaya pendidikan mahal, setidaknya literasi digital dan kompetensi TIK pada umumnya menjadi syarat yang tak bisa ditawar. •

AIR

Gunawan Effendi

Seharusnya kini lebih ke air. Karena sebelumnya sudah lebih ke tanah.

Begitulah, Indonesia sering kita sebut sebagai Tanah Air tercinta. Namun, tanah agaknya lebih mendapat perhatian daripada air. Paling tidak, kita sudah memiliki kementerian dengan portofolio bidang pertanian.

Namun, portofolio air belum menjadi kementerian khusus. Baru sampai level teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jadi, apa hubungannya Tanah Air dengan kota, bahkan pusat peradaban? Baiklah, sejarah telah mencatat, peradaban-peradaban besar dunia, purba maupun modern, umumnya tumbuh dan berkembang mengikuti aliran sungai. Sebut saja Eufrat dan Tigris di kawasan barat Asia, atau Nil di Afrika. Kemudian Danube yang melintasi 10 negara di Eropa, juga Thames di Inggris, Volga di Rusia, juga Gangga di India.

Daftar sungai akan semakin panjang jika mencakup pula Yangtze di Tiongkok, atau Mekong yang mengalir dari dataran tinggi Tibet hingga melintasi lima negara Asia Tenggara sebelum bermuara di laut China Selatan. Tambah panjang lagi daftarnya jika melintas ke Amerika, baik Kanada, Amerika Serikat dan Amerika Selatan: Mulai dari Yukon dan Missisipi di utara hingga Amazon di selatan. Jangan lupa pula sungai-sungai di Australia, Yara di Melbourne atau Swan di Perth, misalnya.

Nah, dengan memahami sungai-sungai itu, akan lebih mudah bagi kita mafhum bahwa peradaban manusia tumbuh dan berkembang dipengaruhi aliran air di lingkungan kehidupannya. Itulah sebenarnya yang membawa kita memahami ekosistem sebagai entitas fisiologi, biologi, ekonomi dan bisnis, maupun politik. Bersama aliran sungai-sungai penting itulah sejarah peradaban manusia melintas.

Tak berbeda dengan sungai-sungai di Nusantara. Kerajaan masa purba, kolonial, maupun pasca kemerdekaan

kian menegaskan sungai, aliran air, sangat mempengaruhi perjalanan bangsa. Mulai dari pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan di hulu, akhirnya aliran sungai membawa produk-produk itu ke hilir hingga muara. Muara-muara sungai penting kemudian menjadi pusat perdagangan, industri, dan jasa. Akhirnya menjadi kota. Begitu banyak tempat menggunakan muara, terutama di bagian barat dan tengah Indonesia, sebagai pusat perdagangan di masa lalu, bahkan hingga kini. Ada muara tempat pertemuan dua atau lebih aliran sungai, ada pula muara tempat bertemunya sungai dengan laut.

Ringkas cerita, banyak sungai di Indonesia menumbuhkan peradaban agraris, (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan). Semakin berkembang sektor agraris itu, berkembang pula industri pengolahan (manufaktur), hingga perdagangan dan jasa di muara atau hilirnya. Semisal Bengawan Solo dan Kali Brantas di Jawa Tengah dan Timur. Juga Citarum di Jawa Barat. Sepanjang aliran kedua sungai itu adalah limpahan kisah tentang padi, tebu,

tembakau, atau komoditas agraris lainnya, bahkan hingga sekarang.

Namun, semakin ke sini, tampak lah ekonomi politik kita cenderung ahistoris terhadap peran sungai dalam pengembangan wilayah. Boleh jadi juga ke depan, kita mempertim-

bangkan aliran sungai sebagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemekaran daerah kabupaten, kota, maupun provinsi. Jadi, benar-benar mencakup tanah dan (aliran) air.

Pengembangan kota, dan industri pun hendaknya memperhitungkan aliran sungai sebagai bagian tak terpisahkan dari pertimbangan ekonomi politik. Dari sungailah kita akan lebih mudah melanjutkannya ke kawasan maritim di laut lepas.

Kita sudah memiliki kementerian dengan portofolio tanah, bahkan maritim. Selanjutnya kementerian dengan portofolio air mungkin perlu menjadi pertimbangan. Atau kita serahkan saja portofolio air menjadi bagian dari otonomi daerah? •





MENYELARASKAN APBN DAN POSTUR KABINET

Rancangan kabinet kementerian beriringan dengan urusan fiskal. Jadi, pembahasan Rancangan Undang-Undang Kementerian pun memerlukan sinkronisasi dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di tengah menghangatnya isu postur dan personel kabinet, dinamika pembahasan RAPBN 2025 antara pemerintah dan lembaga legislatif sebelum pengesahan menjadi Undang-Undang berlangsung intensif. Memerlukan penyelarasan.

Secara normatif, berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU APBN diambil keputusan oleh DPR selambat-lambatnya duabulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis

RAPBN 2025 dan nota keuangannya.

Dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibacakan Adisatrya Suryo Sulisto menyebutkan RAPBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan. Pemerintahan saat ini yang menyusun RAPBN 2025, tapi yang menjalankan dan mempertanggungjawabkan pemerintahan 2024-2029.

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Per-

2025 ini lain dari biasanya karena disusun dan dilaksanakan oleh presiden serta pemerintahan yang berbeda. Dengan begitu, sambungnya, akan muncul tantangan secara internal berupa sinkronisasi kebijakan serta program-program dengan anggaran dan pembiayaan yang tersedia.

Toh Fraksi Golkar mengapresiasi sikap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang memberikan keleluasaan serta mengakomodir program-program Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Fraksi partai Golkar menyatakan menyetujui RUU APBN Ta-



belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Jadi, sama seperti RUU Kementerian Negara, penetapan APBN 2025 batasnya adalah 30 September 2024. Keesokan harinya, untuk kali ini, berlangsung pula pelantikan Anggota DPR, MPR, dan DPD periode 2024-2029.

Khusus untuk RUU APBN, pada mulanya pembahasan awal berlangsung mulus-mulus saja. Beberapa hari setelah RAPBN 2025 sampai di DPR, Seluruh fraksi DPR menyatakan setuju terhadap

sidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Selasa, 20 Agustus 2024.

Menurut juru bicara fraksi terbesar di DPR itu, RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya hanya sebatas menjelaskan alokasi anggaran dari berbagai bidang tanpa kejelasan transformasi struktural yang akan dicapai. Dia berharap petani, nelayan, buruh, UMKM, kegiatan ekonomi rakyat dan lainnya mendapat akses untuk mencapai kesejahteraan melalui alokasi program berkualitas dalam APBN. Fraksi PDIP setuju RUU APBN 2025 dibahas lebih lanjut.

Sedangkan juru bicara fraksi Golkar, Agung Widyantoro, menilai RAPBN

hun Anggaran 2025 dan Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Selanjutnya, Fraksi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili Sri Meliyana, mengatakan fraksinya mengapresiasi kebijakan Jokowi yang memberikan ruang terhadap pemerintahan baru dalam menentukan program kerja ke depan. Sehingga, sambungnya, pemerintahan baru bisa langsung bekerja merealisasikan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Misalnya program makan bergizi

gratis untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan koperasi serta meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. "Demikian pandangan fraksi Gerindra DPR agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku," usulnya.

Senada dengan itu, juru bicara fraksi partai Nasdem, Fauzi Amro. Menurutnya APBN 2025 krusial dalam proses transformasi ekonomi di Indonesia. APBN 2025 menjadi tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga diharapkan memberikan pondasi yang kuat dalam menjamin keberlanjutan pembangunan.

Menurut Fraksi Nasdem, APBN 2025 dituntut menyiapkan ruang fiskal optimal sehingga tahun pertama pemerintahan baru dapat segera melaksanakan berbagai program kerja prioritas. Keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan mampu mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045. "Fraksi partai Nasdem menyatakan menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut," harapnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun menyetujui RUU APBN 2025 serta Nota Keuangannya untuk ditindaklanjuti pembahasannya. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, yang berpendapat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2 persen dalam RUU APBN 2025 relatif lebih tinggi dari estimasi lembaga keuangan internasional (IMF) yang memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen. Fraksi PKB justru mengusulkan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025 dipatok 5,3 persen.

Selain itu, Ratna meminta pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap investasi sehingga mampu memberikan nilai tambah yang tinggi khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Tercatat pada 2013 setiap Rp1 triliun investasi yang masuk bisa menyerap 4.594 orang tenaga kerja. Namun, kata dia, pada 2023 setiap Rp1 triliun investasi hanya menyerap 1.285 tenaga kerja.

Pemerintah ke depan, sambungnya, harus meningkatkan investasi di sektor

padat karya karena mampu menyerap tenaga kerja lebih tinggi begitu juga multiplier effect yang ditimbulkan. "Fraksi PKB menyatakan persetujuannya agar RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku," ujar anggota Komisi VII DPR itu.

Persetujuan terhadap RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya juga disampaikan fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Vera Febyanthi.

but secara umum RAPBN 2025 butuh penajaman agar lebih sehat, kredibel, dan berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat. Penetapan target tahun 2025 harus lebih kredibel dan dapat direalisasikan. Menurut dia, 2025 merupakan periode awal pemerintahan baru sehingga membangun optimisme kepada masyarakat dan dunia usaha agar ekonomi bisa bergerak lebih cepat. Berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan ketimpangan dapat diatasi lebih cepat. "Demikian pandangan umum fraksi PKS



Fraksi PD menghendaki kebijakan yang disusun dalam APBN 2025 harus mampu menjawab tantangan nasional dan global serta menyesuaikan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2030. "Fraksi Partai Demokrat DPR menyatakan dapat menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat I dan II di DPR," harapnya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili Netty Prasetyani, menye-

DPR RI terkait keterangan pemerintah mengenai RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya," ujarnya.

Juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Riski Sadig, menilai APBN 2025 penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang menuju yang akan datang. Fraksi PAN

berharap RUU APBN 2025 beserta nota keuangannya menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tujuannya untuk memberantas kemiskinan, memperkecil ketimpangan sosial dan ekonomi serta membuka lapangan kerja. "Fraksi PAN menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut ke tahap berikutnya," paparnya.

Persetujuan terakhir disampaikan fraksi PPP melalui juru bicaranya, Mu-

dan terukur. Dimulai dari penguatan penerimaan negara, belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. "Fraksi PPP dapat menyetujui RUU APBN 2025 untuk dibawa pada tahap pembahasan selanjutnya," ujarnya.

Namun, dalam dinamika politik berikutnya, muncul kemungkinan bertambahnya jumlah kementerian sehingga



hammad Aras, yang menjelaskan penyusunan RAPBN 2025 beserta Nota Keuangannya menjadi yang terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. RAPBN 2025 ini akan mengantarkan proses transisi kepemimpinan menuju pemerintahan baru. Partai berlabel Ka'bah itu meminta pemerintah tetap menjaga keberlanjutan reformasi baik pendapatan dan belanja serta melakukan inovasi untuk pembiayaan defisit APBN 2025.

Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan menyeluruh, bertahap,

memerlukan aneka penyesuaian. Penyesuaian seperti itu toh tetap harus tunduk pada norma berupa APBN yang terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Sejauh ini, salah satu rincian RAPBN 2025 masih menggunakan format kementerian dan lembaga yang mengacu kepada Undang-Undang Kementerian Negara yang masih dalam proses revisi. Kementerian Keuangan membeberkan rancangan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam Rancangan Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Total ada 86 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran di tahun depan dengan nilai anggaran Rp 1.160,08 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan rancangan belanja K/L itu merupakan hasil pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024. "Ini angka-angka terakhir setelah kita perhitungkan Raker Bang-



Fraksi PAN menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut ke tahap berikutnya.

gar terakhir plus arahan Pak Presiden terpilih," kata Isa saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa, 10 September 2024.

Dari daftar ini tampak 10 kementerian yang mendapat alokasi jatah anggaran belanja terbesar yakni Kementerian Pertahanan senilai Rp 166,26 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebesar Rp 126,62 triliun. Selanjutnya, Kementerian PUPR dengan alokasi anggaran sebesar Rp 116,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,74 triliun, Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun, Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun, Kementerian Sosial Rp 79,58 triliun dan Kementerian Agama Rp 79,16 triliun.

Bagaimana sinkronisasi atau keselarasan antara anggaran dan postur K/L? Ya paling lambat 30 September 2024 batas waktunya. ●



DAFTAR ANGGARAN BELANJA 86 K/L DALAM RAPBN 2025

- | | | |
|--|---|---|
| 1. 001 MPR Rp 969,20 miliar | 277,50 miliar | 56. 087 ANRI Rp 293,79 miliar |
| 2. 002 DPR Rp 6,69 triliun | 29. 042 Kemenkop UKM Rp 937,17 miliar | 57. 088 BKN Rp 798,34 miliar |
| 3. 004 BPK Rp 6,15 triliun | 30. 047 Kemen PP dan PA Rp 300,65 miliar | 58. 089 BPKP Rp 2,47 triliun |
| 4. 005 MA Rp 12,68 triliun | 31. 048 Kemen PAN dan RB Rp 392,98 miliar | 59. 090 Kemendag Rp 1,85 triliun |
| 5. 006 Kejaksaan Rp 24,27 triliun | 32. 050 BIN Rp 7,04 triliun | 60. 092 Kemenpora Rp 2,33 triliun |
| 6. 007 Setneg Rp 2,47 triliun | 33. 051 BSSN Rp 1,53 triliun | 61. 093 KPK Rp 1,23 triliun |
| 7. 010 Kemendagri Rp 4,79 triliun | 34. 052 Wantanas Rp 54,67 miliar | 62. 095 DPD Rp 1,30 triliun |
| 8. 011 Kemenlu Rp 9,89 triliun | 35. 054 BPS Rp 5,70 triliun | 63. 100 KY Rp 184,53 miliar |
| 9. 012 Kemenhan Rp 166,26 triliun | 36. 055 Kemen PPN/Bappenas Rp 1,97 triliun | 64. 103 BNPB Rp 1,42 triliun |
| 10. 013 Kemenkumham Rp 21,20 triliun | 37. 056 Kemen ATR/BPN Rp 6,45 triliun | 65. 104 BP2MI Rp 494,61 miliar |
| 11. 015 Kemenkeu Rp 53,19 triliun | 38. 058 Perpustakaan Rp 721,68 miliar | 66. 106 LKPP Rp 156,71 miliar |
| 12. 018 Kementan Rp 29,37 triliun | 39. 059 Kemen Kominfo Rp 7,72 triliun | 67. 107 Basarnas Rp 1,49 triliun |
| 13. 019 Kemenperin Rp 2,51 triliun | 40. 060 Polri Rp 126,62 triliun | 68. 109 KPPU Rp 105,37 miliar |
| 14. 020 Kemen ESDM Rp 3,90 triliun | 41. 063 BPOM Rp 2,56 triliun | 69. 110 Ombudsman RI Rp 255,59 miliar |
| 15. 022 Kemenhub Rp 31,45 triliun | 42. 064 Lemhanas Rp 187,08 miliar | 70. 111 BNPP Rp 267,14 miliar |
| 16. 023 Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun | 43. 065 BKPM Rp 681,88 miliar | 71. 112 BPK-BATAM Rp 1,99 triliun |
| 17. 024 Kemenkes Rp 105,64 triliun | 44. 066 BNN Rp 2,45 triliun | 72. 113 BNPT Rp 626,4 miliar |
| 18. 025 Kemenag Rp 79,16 triliun | 45. 067 Kemen DES, PDT & Transmigrasi Rp 2,31 triliun | 73. 114 Setkab Rp 428,95 miliar |
| 19. 026 Kemenaker Rp 4,80 triliun | 46. 068 BKKBN Rp 4,40 triliun | 74. 115 Bawaslu Rp 2,41 triliun |
| 20. 027 Kemsos Rp 79,58 triliun | 47. 074 Komnas HAM Rp 160,52 miliar | 75. 116 LPP RRI Rp 1,07 triliun |
| 21. 029 KLHK Rp 6,23 triliun | 48. 075 BMKG Rp 2,82 triliun | 76. 117 LPP TVRI Rp 1,52 triliun |
| 22. 032 KKP Rp 6,22 triliun | 49. 076 KPU Rp 3,06 triliun | 77. 118 BPK-SABANG Rp 53,49 miliar |
| 23. 033 Kemen PUPR Rp 116,22 triliun | 50. 077 MK Rp 611,48 miliar | 78. 119 Bakamla Rp 1,08 triliun |
| 24. 034 Kemenko Polham Rp 277,31 miliar | 51. 078 PPATK Rp 354,56 miliar | 79. 120 Kemenko Marves Rp 274,92 miliar |
| 25. 035 Kemenko Ekon Rp 459,77 miliar | 52. 083 BIG Rp 352,29 miliar | 80. 121 BPIP Rp 374,43 miliar |
| 26. 036 Kemenko PMK Rp 250,97 miliar | 53. 084 BSN Rp 223,87 miliar | 81. 123 LPSK Rp 229,92 miliar |
| 27. 040 Kemenpar Rp 1,72 triliun | 54. 085 Bapeten Rp 156,72 miliar | 82. 124 BRIN Rp 5,84 triliun |
| 28. 041 Kementerian BUMN Rp | 55. 086 LAN Rp 328,95 | 83. 125 Bapanas Rp 329,96 miliar |
| | | 84. 126 OIKN Rp 6,39 triliun |
| | | 85. 127 Barantin Rp 1,42 triliun |
| | | 86. Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun |



MASIH MUNGKIN BERUBAH

Kemungkinan perubahan rancangan hingga saat-saat akhir pengesahan Undang-Undang tetap terbuka. Baik untuk RUU Kementerian Negara maupun RUU APBN 2025.

Postur kabinet kementerian memang harus selaras dengan pos-pos anggaran yang disusun. Bayangkan saja jika ada Kementerian Pengairan, misalnya, namun pos anggarannya ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Begitulah, maka salah satu proses penyelarasan itu menyangkut revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk postur termasuk personelnya. Sedangkan untuk anggarannya sudah pasti terkait dengan pembahasan RUU APBN sebelum disahkan oleh DPR untuk diundangkan.

Toh upaya menyelaraskan kedua RUU tadi memang berproses. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan telah mengantisipasi anggaran pembentukan kementerian baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna mengakomodasi program presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Itu sudah dilakukan, supaya apa pun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih nanti akan bisa dilakukan se-

cara anggaran," kata Thomas kepada media di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam merumuskan anggaran pembentukan kementerian baru. Prabowo pun turut memberikan masukan dalam proses perumusan itu.

Namun, Thomas mengaku, belum ada keputusan final terkait hal tersebut. "Tentunya ada (masukan dari Prabowo). Tapi, karena ini prosesnya berlanjut dan minggu depan DPR akan menentukan, jadi kita tunggu saja," ujarnya.

Yang dikemukakan oleh Thomas memang bidang anggaran. Sedangkan pos-pos anggaran yang akan mengeksekusinya berada di postur kementerian. Untuk postur kementerian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan, penambahan pos kementerian pada kabinet yang kelak dipimpin Presiden Prabowo Subianto tidak lain untuk op-

timalisasi tugas-tugas kementerian terlebih memenuhi janji kampanye pilpres 2024.

"Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final h-7 atau h-5, mungkin begitu," kata Dasco menjawab wartawan di gedung DPR RI kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis, 12 September 2024.

Dia menjelaskan, penambahan maupun pemisahan kementerian yang ada sekarang ini belum bisa dipublikasikan ke masyarakat karena saat ini formasinya masih disimulasikan. Malah ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai posisi



Itu sudah dilakukan, supaya apa pun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih nanti akan bisa dilakukan secara anggaran,

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Saya enggak bisa jawab soal itu karena kita belum pastikan," ujar Dasco

Pada titik inilah pertemuan Menkeu Sri Mulyani dengan Prabowo menjadi penting. Keduanya pun saling menggugah pertemuan itu dalam med-sosnya masing-masing.

Dasco menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Sri Mulyani beberapa waktu lalu sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Dia menambahkan, Prabowo, Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sering melakukan brainstorming, terutama terkait pembahasan APBN.

Pertemuan mereka pun tidak hanya terjadi sesekali. "Nah sehingga brainstorming yang dilakukan bukan hanya

kali kemarin, kebetulan saja kali kemarin ter-publish," ungkapny.

Sebelumnya, dalam akun media sosial Instagram @smindrawati, Bu Menkeu mengungkapkan pertemuan dengan Prabowo untuk melaporkan perkembangan terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan 2025. "Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih @prabowo," untkap posting di

Kemudian, mereka bertiga juga membahas perkembangan terkini Rancangan Undang-undang (RUU) RAPBN 2025 yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sri Mulyani dan Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo, telah menerima arahan-arahan presiden terpilih Prabowo mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.

"Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029. Excellent and



akun Instagram pribadinya yang mulai tayang pada, Senin, 9 September 2024.

Untuk itu, Sri Mulyani selaku Bendahara Negara melaporkan perkembangan pelaksanaan APBN 2024 lantaran outlook APBN ini akan ditutup pada Desember 2024 saat pemerintahan presiden terpilih Prabowo. "Dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan," kata Sri Mulyani

very fruitful discussions," ungkap Sri Mulyani.

Diskusi yang disebut Bu Menkeu membuahkan hasil itu antara lain berbentuk perubahan postur anggaran belanja pada RAPBN 2025. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, perubahan porsi anggaran belanja tersebut diputuskan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Men-

teri Keuangan II Thomas Djiwandono, bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Perubahannya, antara lain, porsi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) mengalami kenaikan dari Rp 1.094,65 triliun menjadi Rp 1.160,08 triliun. "Jadi kami sudah sisir, disampaikan kepada Pak Presiden Terpilih dan beliau betul-betul meneliti satu per satu bersama Ibu Menteri dan Pak Wamen. Ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan, jadi untuk belanja K/L yang tadinya di raker Banggar terakhir itu Rp 1.094,66 triliun, itu hasilnya menjadi Rp 1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan

dari Rp 556,7 triliun menjadi Rp 491,2 triliun," kata Pak Dirjen Anggaran.

Dengan demikian, total anggaran belanja secara keseluruhan dalam RAPBN 2025 tidak mengalami perubahan dari usulan sebelumnya, yakni sebesar Rp 2.701,44 triliun. Dirjen Isa memastikan, perubahan postur anggaran belanja K/L dan non K/L ini tidak akan memperlebar defisit APBN 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen PDB.

"Kan besarnya (total anggaran belanja) tidak berubah. Ini hanya digeser-geser dari non K/L yang tadinya disimpan, sekarang setelah konsultasi

kan dividen yang akan dibayarkan oleh BUMN sebesar Rp4 triliun sehingga totalnya naik menjadi Rp90 triliun," kata Bu Menkeu, Rabu, 4 September 2024.

Dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sri Mulyani mengemukakan proyeksi kenaikan dividen BUMN sebesar Rp4 triliun tersebut akan menjadi tambahan bagi pendapatan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun. Selain itu, terdapat peningkatan PNPB lain sebesar Rp4,26 triliun yang disumbang oleh beberapa kementerian/lembaga penting yang memang selama ini menjadi penyumbang



yang sangat signifikan," ujarnya saat rapat panja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Kenaikan anggaran belanja K/L itu diambil dari porsi anggaran belanja non K/L yang semula diusulkan sebesar Rp 1.606,78 triliun menjadi Rp 1.541,35 triliun. Penambahan anggaran belanja K/L diambil dari belanja non K/L untuk program pengelolaan belanja lainnya yang semula diusulkan sebesar Rp 556,65 triliun menjadi Rp 491,22 triliun.

"Untuk program belanja non-K/L praktis tidak ada perubahan, kecuali tentunya belanja lainnya berkurang karena sebagian kita geser ke belanja K/L

dengan presiden terpilih sudah ditentukan," ungkapnya di luar ruangan rapat DPR..

Toh sebelumnya Menkeu Sri Mulyani sudah mengungkapkan peningkatan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam RAPBN 2025. Perubahan tersebut berasal dari proyeksi kenaikan pada kekayaan negara yang dipisahkan (KND) dan kontribusi kementerian/lembaga terhadap PNPB.

"Untuk PNPB ada beberapa perubahan yang telah dibahas di dalam Panja, terutama terkait penerimaan dari kekayaan negara yang Dipisahkan yaitu proyeksi peningkatan kinerja dari BUMN yang akan menimbulkan kenai-

dari PNPB tersebut.

Kementerian dan lembaga tersebut meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan kenaikan Rp510 miliar, Kepolisian RI (Polri) dengan kenaikan Rp2,59 triliun. Kemudian, dari Kementerian Perhubungan dengan kenaikan PNPB sebesar Rp890 miliar, serta Kementerian Hukum dan HAM dengan kenaikan Rp260 miliar. Dengan demikian dari sisi penerimaan negara bukan pajak, ada kenaikan Rp8,26 triliun, yang terdiri dari kekayaan negara dipisahkan Rp4 triliun dan PNPB dari kementerian/lembaga sebesar Rp4,26 triliun.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil

Nazara menyebut bahwa penyusunan RAPBN 2025 pada masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto memang menuntut kehati-hatian. Menurut dia, RAPBN 2025 yang disusun oleh pemerintah saat ini bakal dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk itu, penyusunan RAPBN 2025 ini juga harus memasukkan beberapa program yang diusung Prabowo ketika kampanye..

Suhasil menuturkan APBN memiliki peran penting untuk menjaga perekonomian, termasuk pada masa transisi pemerintahan. Pada tahun ini, pemer-

Memang RAPBN 2025 juga memuat program Quick Win presiden terpilih antara lain program makan bergizi gratis, peningkatan kelas rumah sakit, renovasi sekolah, dan cetak sawah. "Ini adalah bentuk keberlanjutan yang sangat-sangat diapresiasi oleh dunia internasional. Bagaimana kelanjutan seperti ini, keberlanjutan seperti ini, bisa disusunkan di dalam ruang fiskal dan juga ruang politiknya," tandasnya.

Nah, untuk ruang politik yang diemukakan Wamenkeu I, DPR mengagendakan pengesahan RUU kementerian Negara menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna, Kamis, 19 Sep-

tem, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Toh sebelum sampai paripurna, kata Wihadi, kemungkinan perubahan pada RUU tetap terbuka.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Senin, 9 September 2024. Sehari setelahnya, yakni Selasa (10/9), Baleg DPR RI juga menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Ta-



intah juga harus menjalankan APBN 2024 sekaligus menyiapkan RAPBN 2025 untuk dijalankan oleh pemerintah baru.

Ia menyebut penekanan mengenai kualitas belanja menjadi kunci dalam menyusun RAPBN transisi. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR perlu menyusun RAPBN 2025 secara teliti agar berbagai program prioritas dapat terakomodasi. "Presiden terpilih memberikan banyak sekali penekanan di dalam titik-titik yang menjadi prioritas anggaran ke depan dan ini kami masukkan," ujarnya, Minggu, 15 September 2024.

tember 2024. Selain RUU Kementerian Negara, akan diparipurnakan pula RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ketua Badan Legislasi DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan dua draf RUU tersebut sebelumnya sudah disetujui pada rapat kerja di Badan Legislasi bersama dengan pemerintah, yang berarti RUU tersebut sudah selesai dibahas pada tingkat pertama untuk selanjutnya dibahas di tingkat kedua, yakni rapat paripurna.

"Sudah, sudah rapim (rapat pimpinan), sudah Bamus (Badan Musyawarah)," kata Wihadi di Kompleks Parle-

hun 2006 tentang Wantimpres pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR guna disahkan menjadi undang-undang.

Salah satu poin penting dalam RUU Kementerian adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah. Namun, perubahan postur kementerian dan lembaga tetap harus selaras dengan postur APBN-nya. Jadi, kita tunggu hasil akhirnya.●

ANGGARAN CADANGAN UNTUK KEMENTERIAN BARU

Pengesahan RAPBN 2025 menjadi APBN tinggal ketuk palu di rapat paripurna. Anggaran pembentukan kementerian baru masuk di pos cadangan lain-lain.

Pemerintah beserta anggota Badan Anggaran DPR RI sepatutnya untuk membawa RUU APBN 2025 ke tahap Pengambilan Keputusan Tingkat II atau Rapat Paripurna pada Kamis, 19 September 2024. Pada rapat yang sama, terjadwal pula pengesahan UU Kementerian Negara.

"Apakah hasil rapat kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan dalam Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang, Setuju?" kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Jakarta, Selasa, 17 September.

Hasil rapat disepakati oleh sembilan fraksi partai, dengan delapan setuju,

serta satu yang setuju dengan catatan. Dalam rapat tersebut, Said menyampaikan tidak ada perubahan terhadap postur APBN 2025.

Kesepakatan itu menyangkut antara lain pemerintah menetapkan defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun. Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2025 dipatok mencapai Rp513,6 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro

2025, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7 persen, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel. Sedangkan lifting minyak 605 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5-5 persen, kemiskinan 7-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia (IMM) 0,56, nilai tukar petani (NTP) 115-120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.

Dalam rapat itu, Menteri Keuangan RI



Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, selama pembahasan, Banggar dan pemerintah menyadari bahwa APBN merupakan instrumen yang sangat penting. Menurut dia, APBN menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan, dari mulai COVID-19 pandemi, kenaikan harga komoditas, kenaikan suku bunga, hingga terjadinya perang yang menimbulkan disrupti.

Ke depan, Menkeu berharap APBN dapat terus digunakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Anggaran adalah wujud janji kita kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat. Menuju tanah terjanji, Indonesia yang tata, titi, tentrem, kerta raharja," ucapnya.

Tak urung Bu Menkeu berpamitan dengan terbata-bata dan tetes air mata meskipun tetap berusaha menyungging senyum ketegarannya. Menkeu Ani mengemukakan, sudah lebih dari lima tahun dalam pemerintahan ini telah berinteraksi dengan DPR RI. Dia mengakui banyak hal yang telah dilalui bersama DPR. "Berkolaborasi, beradu argumen, berpikir keras untuk sama-sama terus mewujudkan kecintaan kita kepada Indonesia dalam membentuk, menyusun APBN," sambungnya.

Selanjutnya, dengan suara bergetar Bu Menkeu mengatakan bahwa masa jabatannya akan berakhir beberapa waktu lagi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Hari ini adalah titik di mana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," ujar dia.

Setelah mengambil jeda beberapa detik untuk menahan genangan air mata, Bu Menkeu menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah bekerja sama dengannya selama ini. "Kami tahu perjuangan menciptakan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan berakhir. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan baik ini, selain ber-

terima kasih dan memberi apresiasi tinggi kepada DPR, Banggar, kepada tim kami Kementerian Keuangan mulai dari Pak Wamen Suahasil, Wamen Tommy, Thomas Djiwandono, eselon I dan seluruh pelaksana," sambungnya.

Sempat mengusap air mata dan meneguk air putih di gelas yang telah tersedia, Sri Mulyani menyampaikan pegawai Kementerian Keuangan telah bekerja keras untuk memastikan APBN dirancang dan dipertanggungjawab-

Usai hening sejenak, peserta rapat dari anggota DPR RI hingga jajaran pemerintah kemudian berdiri dan bertepuk tangan (standing applause) untuk Menkeu Ani.

Di rapat itu Sri Mulyani menyampaikan lagi bahwa pengelolaan keuangan negara ke depannya harus tetap mengedepankan kompetensi disertai kejujuran. "Tentu apa yang selama bertahun-tahun kita kerjakan bersama tidak bisa dikatakan telah paripurna,



kan dengan baik. "Saya tahu bahwa mereka bekerja keras dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga, untuk memastikan APBN dirancang, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Saya berharap, kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih semuanya," ucap Sri Mulyani

tidak pula dapat dikatakan sempurna. Untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang semakin prudent, efektif, dan berkerakyatan, kiranya para pengelola keuangan negara ke depannya terus selalu mengedepankan kompetensi, kecakapan, dan yang paling penting, kejujuran," ujarnya.

Bendahara Negara itu juga menyampaikan bahwa perancangan hingga

● INFO KHUSUS

pembahasan APBN 2025 telah menjadi tanggung jawab yang diemban bersama. Ia menyebut keuangan negara bukan sekadar urusan akuntansi, melainkan juga mandat konstitusi.

Sebagai momen terakhir rapat bersama anggota Banggar, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh anggota yang hadir sekaligus meminta untuk terus mengawal penyelengga-

dang yang belum diubah.

Sedangkan mengenai anggaran jika ada kementerian baru, RAPBN 2025 juga memberi ruang untuk itu. "Di dalam rancangan undang-undang APBN tahun 2025 yang sudah kami setuju khususnya pasal 51, memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian, atau badan, atau memecah kementerian yang ada," ujar Ketua Banggar DPR

juannya hanya lewat komisi-komisi sebagai mitra," kata Said.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui, jumlah kementerian pada masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memang akan bertambah.

Menurut dia, penambahan itu mencakup pemisahan dan penggabungan.



raan APBN 2025. "Bapak dan ibu sekalian, anggota Banggar, teman-teman saya di pemerintah, untuk bersedia menyediakan 'samudera pengampunan' dan maaf. Mari kita sama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," ucapnya.

Lantas, bagaimana dengan keselarasan antara RAPBN 2025 dengan RUU Kementerian Negara. Masih ada celah atau ruang jika UU Kementerian Negara kelak tak menyebut jumlah absolut kementerian sebagaimana perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, sehingga tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-un-

Said Abdullah kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa, 17 September 2024

Toh Said menegaskan, postur APBN 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Maka anggarannya kemudian disiapkan di cadangan lain-lain," kata dia.

Meski begitu, ia belum mengungkapkan secara terperinci besaran alokasi anggaran cadangan tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini hanya menegaskan bahwa anggaran untuk kementerian dan badan yang baru dibentuk cukup dibahas melalui komisi-komisi terkait di DPR RI. "Karena ini tidak ada hubungan dengan postur, karena sudah dicadangkan anggarannya sekitar, saya lupa, maaf. Maka sebenarnya nanti persetu-

"Ada kementerian yang dipisah, ada kementerian yang memang digabung. Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Muzani juga mengemukakan, Presiden terpilih menginginkan penambahan kementerian kelak bisa membuat kinerja pemerintahan semakin maksimal karena setiap lembaga/kementerian akan fokus menangani urusan tertentu. "Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program, yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," tandasnya.

Alhasil, masih ada babak selanjutnya. Kita tunggu pada tanggal mainnya. ●

info indonesia

www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

Network

INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

 www.infoindonesia.id

 facebook @infoindonesia.id  twitter : @_infoindonesia

 Instagram @info_indonesia.id  YouTube : infoindonesiatv



info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

EDISI #47 SEPTEMBER 2024



**PRABOWO
GANDENG
MESRA
MEGAWATI**